DENNY J.A.

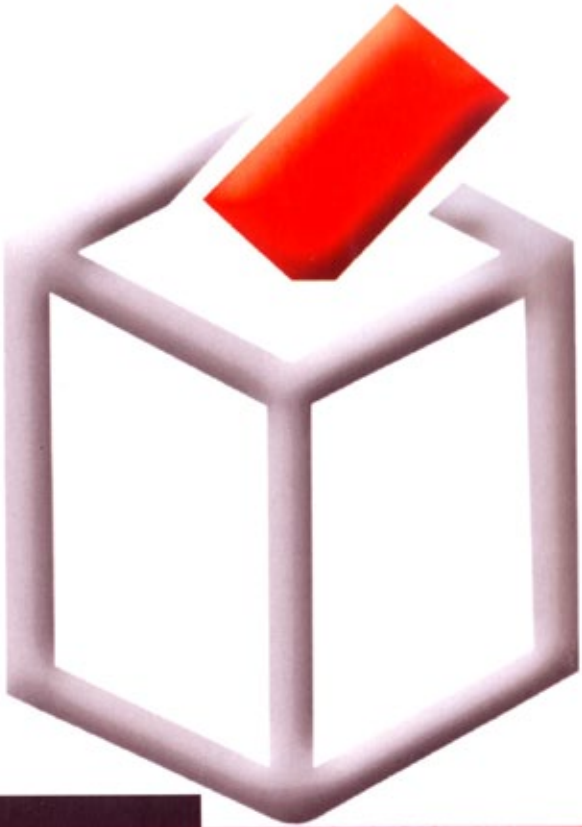

MEMPERKUAT PILAR KELIMA

Pemilu 2004 Dalam Temuan Survei LSI

Editor:
Fransiskus Surdiasis

LKiS

DENNY J.A

Sanksi Pelanggaran Pasal 44
Undang-undang Nomor Tahun 1987 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau member izin untuk itu, dipidana dengan penjara paling lama 7 (tuijuh tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hal Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Memperkuat Pilar Kelima
Pemilu 2004 dalam Temuan Survei LSI
Denny J.A.

xii + 124 halaman: 14,5 x 21 cm
1. Ilmu Politik
2. ISBN : 979-25-5235-9

Penyunting Naskah: Fransiskus Surdiasis
Rancang Sampul: Imam Syahirul Alim
Setting/layout : Santo

Penerbit
LKIS Yogyakarta
Salakan Baru No.1 Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Tlp. (0274) 387194/7472110
Faks. (0274) 417762

Cetakan I: Agustus 2006

Untuk Tiga Matahari :

Mulia Jayaputri Istriku,

Rafi dan Rami Anakku

PENGANTAR

JIKA demokrasi berarti kedaulatan rakyat, maka berarti rakyatlah yang harus menjadi pusat grafitasi dari keseluruhan aktivitas politik yang berkaitan dengan pengaturan negara. Inilah prinsip dasar sebuah demokrasi ideal.

Kemajuan praktek demokrasi bisa ditelusuri di sepanjang spectrum ini: seberapa jauh rakyat dan aspirasi mereka menjadi pusat perumusan kebijakan public sekaligus referensi utama bagi setiap lembaga yang bertugas melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan public, entah partai politik, kelompok kepentingan, bahkan di level individual politisi sekalipun.

Negara-negara dengan praktek demokrasi yang telah berumur panjang umumnya telah menjadikan rakyat mereka sebagai referensi utama politik. Sedangkan bagi negara-negara yang demokrasinya baru dan sedang bertumbuh seperti Indonesia, praktek seperti ini masih harus terus didorong. Di negara demokrasi baru ini rakyat kadang hanya di dengar saat pemilu, itu pun sekadar mendapatkan dukungan mereka di bilik suara pada hari pencoblosan. Setelah itu politik kembali menjadi milik kaum elit, para politisi.

Idealnya, politik adalah sebuah ruang di mana aneka kepentingan didengar dan dinegosiasikan untuk kemudian dirumuskan dalam sebuah kebijakan publik yang mengikat semua dengan berlandaskan pada prinsip moral: untuk kepentingan sebanyak-banyaknya orang.

Itu berarti perlu ada sebuah mekanisme yang bisa memastitakan suara stakeholder utama negara yakni masyarakat luas itu, terdengar. Bagaimana membuat suara rakyat itu diketahui atau terdengar? Disinilah arti penting dari proses pengumpulan opini publik melalui praktek poling atau jajak pendapat.

Jika demokrasi adalah perkara kedaulatan rakyat, maka salah satu sendi uamanya adalah lembaga jajak pendapat. Karena itulah institusi jajak pendapat disebut sokoguru atau pilar demokrasi kelima, di luar institusi eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers independen.

Sebagai sebuah institusi, jajak pendapat perlu dibangun secara benar guna mencapai fungsinya sebagai sokoguru demokrasi. Keperluan itu semakin terasa untuk negara-negara yang tengah membangun demokrasinya seperti Indonesia.

Dalam konteks inilah kehadiran lembaga jajak pendapat antara lain Lembaga Survei Indonesia menjadi teramat penting. Kehadiran mereka ikut mendorong sekaligus merawat demokrasi Indonesia yang masih pada tahap awal ini, dengan terus-menerus merekam dan kemudian mengartikulasikan apa yang menjadi asirasi publik luas. Lembaga-lembaga ini hadir dengan sebuah misi: menjadikan rakyat banyak sebagai pusat grafitasi politik, karena itulah demokrasi yang sesungguhnya.

LSI dibentuk pada tahun 2003 dan semenjak saat itu telah melakukan sejumlah survei opini publik dan secara reguler pula mengumumkan hasil-hasil temuan survei tersebut kepada publik luas melalui media masa. Pada masa Pemilu 2004, lembaga ini mencatatkan sumbangan yang sangat berarti melalui hasil sejumlah riset yang secara tepat menggambarkan aspirasi dan perilaku politik masarakat: dari isu yang mereka anggap paling penting, partai yang akan mereka pilih hingga presiden yang mereka inginkan. Semua ini terekam dalam survei LSI dengan tingkat akurasi dan presisi yang terbukti dalam hasil Pemilu 2004.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan Denny J.A, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia dari 2003-2004, yang berkaitan dengan sebagian hasil survei tersebut, yang dipublikasikan di sejumlah media atara lain Suara Pembaharuan, Media Indonesia,

dan Republika. Tulisan-tulisan dalam buku ini selain merupakan hasil kerja sebuah lembaga jajak pendapat, juga merupakan iktiar penulisnya untuk membuat lembaga jajak pendapat benar-benar menjadi lembaga yang kredibel sehingga memberi sumbangan yang berarti pada pembangunan demokrasi Indonesia. Karena itulah buku kumpulan tulisan ini diberi judul: Mempekuat Pilar Kelima : **Pemilu 2004 Dalam Temuan Survei LSI.**

Terdapat 26 artikel yang membahas aneka hasil temuan survei dan bagaimana hasil ini digunakan sebagai perspekif untuk melihat peluang partai dan kandidat presiden maupun proses politik seperti konvensi partai Golkar.

Untuk memudahkan pembaca, tulisan-tulisan ini dikelompokkan secara berurutan berdasarkan tahun publikasinya. Pengelompokan ini diharapkan membantu pembaca melihat perkembangan dai perkiraan-perkiraan tersebut sekaligus konteks waktunya.

Akhirnya selamat membaca, semoga buku kecil ini memberi sumbangan pada upaya kita untuk terus merawat demokrasi di Indonesia.

Jakarta, Agustus 2006

Fransiskus Surdiasis

Editor

DENNY J.A

DAFTAR ISI

Pengantar

Daftar Isi

Pendahuluan: Politik Jajak Pendapat

Prediksi 2003

- Menebak Presiden 2004
- Kemenangan Kembali Partai Golkar
- Kegagalan Partai Politik
- Merindukan Kembali Orde Baru
- Manuver Konvensi Partai Golkar
- Manuver Partai Golkar Berikutnya
- Ironi Politik Amien Rais
- Tumbuhnya Muslim Demokrat
- Hidayat Nurwahid, Presiden SMS?
- Kampanye Melawan Politisi Hitam
- Menjadi Presiden Melalui SMS

Prediksi 2004

- Potret Buram Pemilih
- Menghitung Peluang SBY
- Peta Kekuatan Politik Pasca Pemilu 2004
- Jajak Pendapat Untuk Capres
- Wiranto versus Megawati
- Pemilu Capres Mengejutkan

- Golkar di Antara Dua Capres
- SBY Versus Megawati
- Jika SBY Versus Megawati Hari ini
- Potret Warna-Warni Presiden SBY
- George Bush Mengutip Data LSI
- SBY-JK Masih Populer?

Sumber Naskah

Daftar Buku Denny J.A

PENDAHULUAN

Politik Jajak Pendapat

Ada yang baru dalam politik masyarakat menyambut pemilu 2004. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, menjelang pemilu ini media masa dipenuhi oleh aneka pengumuman jajak pendapat. Begitu banyak lembaga yang seolah berlomba membuat jajak pendapat.

Lihatlah judul yang dipasang aneka Koran. Misalnya, " Si A Menyodok Si B." Di lain hari, harian itu melaporkan sebagai headline, "Si X Nomor Bontot." Ada pula yang melaporkan hasil jajak pendapat mengikuti klasifikasi sepakbola, " Calon Presiden Divisi Utama dan Calon Presiden Divisi Dua."

Di dunia bebas memang semua pihak punya hak membuat jajak pendapat. Namun motivasi dan tingkat kepakaran masing-masing lembaga tentu dapat berbeda. Ada lembaga yang serius menjaga " kesucian" data lewat metodologi yang sangat ketat. Lembaga itu memang sangat ingin memotret opini publik agar pemerintah dan aneka pihak merespon.

Tampaknya ada pula lembaga yang membuat jajak pendapat karena pesan sponsor. Hasilnya sudah diarahkan kepada tokoh tertentu. Bagi pihak yang paham, sangat mudah sekali mengenali jajak pendapat pesanan itu.

Ada pula jajak pendapat yang dibuat dengan maksud bersih, namun sembrono karena tidak paham metodologi ataupun tidak peduli. Bagaimana membedakan yang baik dan yang buruk di antara jajak pendapat yang cukup banyak itu?

***

Jajak pendpat merupakan salah satu penemuan terpenting di dunia kebijakan publik. Penemuan jajak pendapat dalam kebijakan publik sama pentingnya dengan penemuan pinisilin dalam ilmu kedokteran, atau penemuan roda dalam dunia otomotif.

Melalui jajak pendapat, hanya dengan mengunakan seribu atau dua ribu responden, kita dapat mengetahui persepsi, aspirasi, harapan atau ketakutan dua ratus juta penduduk satu negara. Hal ini dapat dianalogikan dengan satu kuali besar sup ayam. Hanya mencicipi satu sendok sup itu kita sudah dapat tahu rasa dari keseluruhan satu kuali sup ayam. Tentu saja analogi itu hanya tepat, jika pengambilan responden dan keseluruhan jajak pendapat itu mengikuti metodologi yang benar dan ketat.

Ilmu statistik sudah menyumbangkan sejenis revolusi dalam kebijakan publik. Akibatnya begitu mudah kita mengetahui apa kehendak mayoritas masyarakat. Agar tidak ada jarak lebar antara kebijakan publik dengan opini publik, antara politik elit dengan politik yang tumbuh dimasyarakat, jajak pendapat menjadi momentumnya.

Amerika Serikat punya Gallup Poll. Secara reguler lembaga ini merekam opini publik untuk diketahui oleh siapa pun yang berkepentingan. Tidak ketinggalan, di setiap tahun pemilu, Gallup Poll juga memprediksi presiden AS berikutnya. Sejak Perang Dunia Kedua, ketepatan prediksi Gallup Poll itu sungguh mengagumkan. Publik AS dapat tahu siapa presiden berikutnya seminggu sebelum pemilu, dengan membaca hasil jajak pendapat Gallup Poll.

AS diuntungkan oleh kesejahteraan mayoritas rakyatnya. Lebih dari 90 % populasi di AS sudah memiliki telepon. Gallup Poll sangat mudah sekali merekam opini public hanya melalui telepon. Bahkan sebulan sebelum pemilu presiden, Gallup Poll dapat melakukan jajak pendapat setiap hari secara nasional, hanya dengan mengajukan satu pertanyaan saja. Biayanya relatif murah. Pelakanaan surveinya relatif mudah.

Namun dunia ketiga seperti Indonesia punya problem yang berbeda. Rumah tangga pemilik telepon tidak lebih dari 10 % populasi. Jika kita mentah-mentah mengikuti Gallup Poll, hanya menggunakan telepon, 90 % populasi tidak akan terwakili. Jika ini yang kita tempu, sudah dapat dipastikan, untuk jajak pendapat mengenai pemilu hasilnya pasti menyesatkan. Yang terambil bukan suara populasi, tetapi hanya suara kelas menengah perkotaan.

Untuk dunia ketiga, ada contoh lembaga jajak pendapat yang baik. Di Filipina, SWS (Social Weather Station) memiliki reputasi internasional. Karena jumlah pemilik telepon di Filipina sama sedikitnya dengan Indonesia, metode jajak pendapat yang dikembangkan oleh SWS adalah wawancara tatap muka ke seluruh wilayah negeri. Biaya survei pun menjadi sangat mahal.

Seperti Gallup Poll, SWS juga punya kemampuan memprediksi presiden Filipina berikutnya. Seminggu sebelum pemilu dilaksanakan, SWS sudah mengumumkan siapa presiden yang akan terpilih, lengkap dengan ranking 1 sampai 12. Hasilnya menakjubkan. Setelah kotak suara dihitung, komposisi ranking presiden dan persentase suara yang diperoleh tidak banyak beda.

***

Mungkin masih sulit bagi kita untuk memberikan penilaian mana lembaga jajak pendapat yang baik di Indonesia. Namun sangat mudah untuk menentukan mana jajak pendapat yang buruk, jika ia bermaksud mengukur popularitas calon presiden atau partai. Beberapa criteria di bawah ini dapat dijadikan sejenis tips.

Jika jajak pendapat itu dilakukan melalui telepon, secepatnya hasilnya lebih baik dibuang saja. Hasilnya sudah pasti salah dan berbeda dengan suara pemilih nasional dalam pemilu yang sesungguhnya. Suara mayoritas massa yang tidak punya telepon sangat mungkin berbeda dengan suara segelintir kelas menengah

yang memiliki telepon. Lembaga yang menggunakan telepon untuk mengukur hasil pemilu, adalah lembaga yang ingin mudah saja, dengan membayar harga yang murah. Namun, tanpa disadari lembaga itu sudah menyesatkan opini public.

Seandainya pun jajak pendapat itu dengan wawancara tatap muka, tetapi dilakukan hanya terbatas pada 4 kota, atau 10 kota, atau 15 kota, hasilnya juga selayaknya tidak perlu ditoleh. Mayoritas populasi Indonesia justru tidak tinggal di kota. Perilaku pemilih di desa sangat mungkin berbeda dengan yang tinggal di kota. Mereka yang popular di kota bisa jadi sama sekali tidak dikenal di desa.

Jika survei dilakukan secara nasional dengan wawancara tatap muka, perlu juga diperiksa karakteristik respondennya. Penting untuk diketahui apakah ada karakteristik responden yang berbeda secara mencolok dengan karakteristik populasi. Misalnya, mereka yang berpendidikan menengah ke atas di sampel itu terlalu banyak dibandingkan persentase mereka terhadap keseluruhan populasi. Sekali lagi hasilnya dapat menyesatkan.

Hasil Pemilu 2004 menjadi hakim bagi aneka lembaga survei yang menjamur menjelang pemilu. Siapa yang dapat memberikan prediksi yang akurat, dialah yang akan bertahan lama dan dipercaya. Sisanya, hanya dianggap sekadar ingin " bermain-main" atau berpolitik saja dengan opini publik. *

PREDIKSI 2003

Menebak Presiden 2004

SOEGENG Sarjadi Syndicated membuat jajak pendapat tentang presiden RI mendatang. Hasilnya cukup mencengangkan. Pasangan favorit jatuh kepada Hamengkubuwono yang didampingi oleh Yusuf Kalla. Rangking kedua ditempati oleh Nurcholish Madjid yang juga didampingi oleh Jusuf Kalla. Rangking ketiga oleh pasangan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Seandainya yang membuat penelitian ini Gallup Poll dari Amerika Serikat, atau Social Weather Station (SWS) dari Filipina, para pakar di Indonesia juga masih tercengang. Namun pakar tidak akan berdebat lagi masalah keabsahan metodologi ataupun kredibilitas kedua lembaga jajak pendapat itu. Baik Gallup ataupun SWS sudah melakukan survei pre-election berkali-kali. Hasil jajak pendapat mereka terbukti kebenarannya.

Persoalannya, yang melaksanakan jajak pendapat di atas adalah Soegeng Sarjadi Syndicated. Lembaga ini belum teruji kompetensi

dan kredibilitasnya dalam melaksanakan jajak pendapat. Selama ini Soegeng Sarjadi dikenal sebagai aktivis, pengusaha dan politisi. Bahkan sebagai politisi, ia cukup lincah, bergerak dari Golkar, lalu ke PDI, lalu berseberangan dengan PDIP Megawati.

Hal yang sah saja jika publik bertanya seberapa jauh Soegeng Sarjadi mampu untuk netral dalam jajak pendapat isu presiden yang sarat politik. Tidak berarti seorang pedagang atau politisi pasti tidak mampu mentransformasikan diri menjadi patron lembaga penelitian yang obyektif atau akademisi yang netral. Namun respon yang tidak mudah dari para pakar menunjukkan bahwa Soegeng Sarjadi masih butuh waktu untuk diterima dalam dunia penelitian.

***

Lalu mengapa hal ini perlu kita beri perhatian? Jajak pendapat kini menjadi aktivitas baru. Pers dan aneka lembaga penelitian mencoba melakukan jajak pendapat itu secara reguler. Namun, tanpa metodologi yang valid, jajak pendapat itu bukan saja berujung kepada hasil yang keliru. Lebih dari itu, hasilnya dapat menipu dan memanipulasi opini publik.

Karena jajak pendapat di Indonesia merupakan ' barang baru' , sangat mungkin mereka mengulangi kesalahan fundamental yang juga dialami aneka lembaga penelitian profesional, bahkan di AS sekalipun. Mereka yang mengambil kelas statistik, public opinion ataupun riset penelitian untuk gelar Master apalagi Ph.D di AS, misalnya, segera dijejali oleh dua kasus kesalahan.

Pertama, kesalahan prediksi pemilihan presiden antara Roosevelt versus Landon di tahun 1936. Kedua, kesalahan prediksi pemilihan presiden antara Thomas E. Dewey versus Harry S. Truman di tahun 1948.

Tahun 1936, majalah Literary Digest membuat prediksi berdasarkan jajak pendapat yang mereka kerjakan. Menurut majalah ini, Landon akan memenangkan pemilihan presiden dengan memperoleh angka sekitar 57 %. Namun kenyataannya, Landon kalah telak dan hanya mendapatkan suara 39%. Majalah itu dengan segera dijauhi publik, dan kemudian bangkrut.

Tahun 1948, Gallup, Ropper and Crossley mengulangi kesalahan Literary Digest. Menurut tiga lembaga itu, Thomas E. Dewey dari partai Republik akan memenangkan pertarungan dengan mudah. Tiga lembaga itu membuat prediksi dengan angka yang berbeda, 49% versus 44%, 52% versus 45%, dan 50% versus 45%. Namun ketiganya punya kesimpulan yang sama, bahwa Dewey akan mengalahkan Truman. Hasil sebenarnya, justru Truman yang menang dengan angka 50%-45%.

Buruknya prediksi itu menjadi titik hitam sejarah Gallup, khususnya. Namun lembaga ini kemudian terus menerus memperbaiki desain risetnya. Kini Gallup menjadi salah satu lembaga jajak pendapat yang paling terpercaya di dunia. Sejak tahun 1952, ramalan yang dibuat Gallup atas presiden Amerika Serikat selalu benar.

Kesalahan yang dilakukan Literary Digest di tahun 1936, dan Gallup, Roper serta Crossley di tahun 1948 adalah kesalahan metodologi. Jajak pendapat berangkat dari ilmu statistik. Melalui kecanggihan statistik, hanya dengan responden sebanyak 1500 orang, dapat diketahui pilihan 200 juta penduduk.

Namun, responden itu tidak dapat diambil secara 'sembarangan'. Keanekaragaman opini publik luas tidak dapat diwakili responden jika mereka tidak dipilih berdasarkan tahapan yang benar. Sangat mungkin segmen tertentu diwakili lebih banyak daripada yang seharusnya. Sementara segmen populasi lain tidak terwakili sama sekali. Akibatnya, hasil jajak pendapat itu tidak benar-

benar menggambarkan opini publik atau pilihan pemilih keseluruhan populasi.

Ada pula masalah dengan bentuk pertanyaan. Walau substansinya sama, namun penggunaan redaksi pertanyaan yang berbeda, dapat menghasilkan jawaban yang berbeda pula. Masalah wording dalam penyusunan kuesioner tidak kalah riskan. Oleh sebab itu begitu banyak buku yang dikarang mengenai bagaimana mengelabui (membohongi) public melalui statistic.

Kredibilitas dari penyelenggara jajak pendapat menjadi variabel berikutnya yang dapat mempengaruhi jajak pendapat. Menjelang pemilihan presiden di Amerika Serikat, muncul banyak sekali aneka lembaga jajak pendapat baru. Diantaranya jajak pendapat partisan, yang dimotivasi untuk memenangkan tokoh tertentu. Seluruh metodologi dan pertanyaannya ' dipelintir' sedemikian rupa, agar membuat tokoh tertentu kalah dan tokoh tertentu menang.

Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah political machinery. Dalam pemilihan presiden, preferensi dan pilihan awal responden tidak final. Begitu banyak swing voters, pemilih yang sebenarnya ragu-ragu. Mesin politik di era kampanye sangat efektif merubah pilihan swing voters itu. Mereka yang sebelumnya memilih tokoh A tetapi dengan ragu-ragu dapat berbalik memilih tokoh B setelah bekerjanya kampanye.

Soegeng Sarjadi Syndicated sudah memulai sebuah tradisi jajak pendapat yang baik. Lembaga ini tidak perlu berkecil hati jika belum mendapatkan kepercayaan publik. Namun sekali lembaga ini menunjukan ketepatan prediksinya, kepercayaan publik akan datang dengan sendirinya. Memang tidak mudah memprediksi Presiden RI 2004 secara ilmiah. Namun, sekedar meneak dalam rangka ' setengah menghibur-setengah serius' memang juga tidak dilarang dalam demokrasi. *

Kemenangan Kembali Partai Golkar?

AKANKAH Partai Golkar kembali memenangkan Pemilu 2004 dan memimpin kembali pemerintahan? Pertanyaan itu segera timbul setelah membaca hasil survei yang baru saja dipublikasikan oleh CESDA, LP3ES. Survei dilaksanakan secara acak di 13 provinsi, dengan jumlah 3.000 responden, melalui metode wawancara tatap muka. Tak hanya populasi pemilik telepon yang dijangkau oleh survei itu, tetapi juga populasi masyarakat bawah yang biasanya tidak disentuh oleh jajak pendapat melalui telepon.

Menurut survei, memang hanya 45% dari responden yang sudah menentukan partai pilihannya jika pemilu diselenggarakan di hari itu, hari ketika wawancara survei dilakukan. Hasilnya cukup mengejutkan. Golkar melampaui PDIP dengan selisih suara yang sangat jauh. Golkar memperoleh suara tertinggi 18%, sementara PDIP merosot menjadi 7%. Partai besar lain, seperti PAN, PPP, PKB dan PK berada di urutan berikutnya.

Padahal baru lima tahun usia gerakan reformasi. Saat itu kita ingat publik luas mencaci semua yang menjadi mesin politik Orde Baru. Presiden Soeharto dipaksa turun setelah 32 tahun memerintah. Militer dikecam dan akhirnya kini diasingkan dari politik. Sementara itu, Golkar dituduh sebagai mesin politik Orde Baru yang dianggap bertanggung jawab pula atas krisis yang terjadi saat itu.

Aneka gugatan kekuatan publik atas Golkar dilakukan. Sebagian menginginkan Golkar dihukum untuk tidak boleh mengikuti satu atau dua putaran pemilu. Sanksi itu diangap cara memutuskan era reformasi dengan era sebelumnya. Banyak pula yang meminta Golkar dibubarkan. Tidak hanya demonstran di jalan yang melawan Golkar, bahkan Gus Dur yang saat itu menadi preiden, secara resmi juga mengeluarkan dekrit yang membubarkan Partai Golkar.

Apakah itu berarti era hujatan atas Golkar sudah berlalu? Sebaliknya, kini dengan gagah perkasa Golkar kembali menjadi partai paling favorit, setidaknya berdasarkan hasil survei CESDA, LP3ES itu?

***

Hasil surve CESDA, LP3ES itu hanya mungkin dianalisis jika kita mengasumsikan dulu bahwa metodologi penelitian itu dilakukan secara benar. Hasil survei dengan demikian memang mencerminkan realitas politik yang sesungguhnya secara nasional. Dengan asumsi itu, ada beberapa hal yang dapat membuat partai Golkar kembali menjadi favorit.

Pertama-tama terjadi perubahan political mood yang sangat radikal di kalangan publik luas atas reformasi. Lima tahu lalu, mereka begitu antusias dengan suasana reformasi. Harapan mereka atas reformasi begitu tinggi. Mereka menyenangi segala hal yang berhubungan dengan politik reformasi. Sekaligus mereka juga menjauhi segala hal yang menjadi musuh politik reformasi.

Namun setelah lima tahun, harapan atas reformasi kandas. Kekecewaan demi kekecewaan atas reformasi tumbuh. Akibatnya mereka justru marah dengan semua atribut yang berhubungan dengan reformasi. Sebaliknya, nostalgia keindahan masa silam sebelum reformasi teringat. Dalam psikologi kolektif pihak yang kecewa, keindahan masa kini dikalahkan oleh keburukannya. Sebaliknya, keburukan masa lalu dikalahkan oleh keindahannya. Partai Golkar diuntungkan dengan perubahan political mood itu.

Perubahan political mood atas era baru tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir di semua negara komunis di Eropa Timur, bahkan di Rusia, juga terjadi. Karena lambatnya hasil konkret perubahan, publik luas marah dengan situasi sekarang dan meminta kondisi sebelum perestroika dan glasnost dikembalikan.

Lihatlah apa yang terjadi di Polandia misalnya. Lech Walesa dan partainya, solidaritas, menjadi pahlawan perubahan politik di sana. Walesa pun segera terpilih sebagai presiden. Partainya menjadi pemenang utama pemilu mengalahkan partai komunis yang dulu berkuasa. Namun secara cepat political mood publik luas berubah. Lech Walesa dan partainya kembali ditinggalkan. Sementara itu, partai komunis yang dulu dijauhi melakukan metamorfosa, mengubah nama, dan kembali memenangkan pemilu.

Banyak hal yang membuat perubahan political mood di Indonesia terhadap reformasi. Saat ini public luas meresakan secara konkret kesultan ekonomi. Jumlah pengangguran terbuka ataupun setengah terbuka kini melampaui angka 40 juta. Harga terus menaik. Sementara itu investasi dalam dan luar negeri tidak kunjung menggembirakan. Indonesia menjadi salah satu paria di Asia.

Dengan segera publik membandingkan situasi ini dengan Indonesia sebelum reformasi. Saat itu, Indonesia bahkan dianggap sebagai Macan Asia. Stabilitas ekonomi dan tingginya pertumbuhan

pembangunan di Indonesia membuat Indonesia menjadi kajian aneka ekonom internasional. Pak Harto juga menjaga subsidi yang tinggi bagi rakyat banyak karena memang kita sedang punya banyak pendapatan.

Di bidang politik, kebebasan era reformasi tidak lagi dirasakan sebagai berkah oleh public luas. Segala hal yang menjadi berkah karena sudah rutin dipraktikkan dan diterima akan kembali menjadi biasa. Sebaliknya, mereka justru melihat aneka ketidakstabilan politik yang dibawa reformasi. Dalam waktu empat tahun kita sudah mengganti empat presiden. Partai besar dilanda perpecahan internal. Muncul pula aneka konflik horizontal. Gerakan separatisme juga berkembang.

Dengan segera publik luas kembali merindukan masa politik di era Orde Baru yang tenang dan terkendali. Pelanggaran hak asasi di era itu dan pengekangan kebebasannya tidak diingat-ingat lagi. Karena kecewa dengan masa kini, nostalgia atas masa lalu hanya mengenang yang baik-baiknya saja. Sekali lagi, Golkar diuntungkan dengan perubahan political mood itu.

Yang juga membuat Golkar mampu mendominasi kembali politik adalah bertahannya pemilih tradisional. Setiap partai besar memiliki pemilih tradisional dan fanatiknya sendiri. Apa pun yang terjadi dengan partai itu, dan sebagus apa pun program yang di tawarkan partai lain, pemilih tradisional tetap memilih partai itu. Sebagian komunitas NU, misalnya, akan tetap memilih PKB dan Gus Dur, tidak peduli apa pun yang dikerjakan Gus Dur. Sebaian pengagum Bung Karno, misalnya, tetap memilih PDIP dan Megawati walau langit bakal runtuh.

Setiap partai yang sudah mengakar seperti Golkar juga memiliki pemilihnya yang loyal. Apalagi Golkar sudah mendominasi politik Indonesia dalam jangka waktu yang sangat lama. Indoktrinasi Golkar

dan identifikasi diri dengan Golkar terjadi di sebagian pengikutnya. Sekian lama Golkar menjadi pemenang tunggal dalam pemilu yang memang tidak demokratis. Dibandingkan dengan partai lain, pemilih tradisional Golkar mungkin lebih banyak.

Perlu pula disinggung, yang membuat Golkar mampu bangkit kembali adalah leadership dari Akbar Tandjung sendiri. Walau ia terkena sanksi hukum, lebih dari ketua umum lain, Akbar Tandjung paling sering turun ke daerah. Ia persiapkan secara rapi aneka program menghadapi pemilu. Ia pun terbuka dengan inovasi untuk memajukan partainya.

Dibandingkan dengan semua partai lain, mungkin Golkar adalah partai yang paling siap dan terencana menghadapi Pemilu 2004. Aneka mobilisasi dan skenario strategi menghadapi pemilu 2004 sudah dimulai. Banyak pula gubernur di daerah yang tetap berhasil dikuasai oleh pendukung Golkar. Leadership Akbar Tandjung niscaya berperan besar dalam mengantarkan kembali Golkar sebagai pemenang pemilu kelak.

***

Apakah Golkar akan benar-benar memenangkan Pemilu 2004 dan kembali memimpin pemerintahan di Indonesia? Prospek kea rah sana memang ada. Namun tentu saja, masih banyak persoalan di depan yang dapat mengubah semua prediksi.

Untuk konsisten dengan hasil pemilu CESDA, LP3ES, masih ada sebanyak 55% responden yang belum menentukan pilihan partai politik. Jumlah itu terlalu banyak. Partai mana yang nantinya akan dipilih oleh mereka di tahun 2004 nanti, masih mungkin menjadi pemenang pemilu yang sesungguhnya. Partai itu bisa saja Golkar. Namun bisa saja PDIP. Bahkan secara teoretis mungkin pula suara itu diberikan kepada satu atau dua partai baru.

Masih ada waktu lebih dari sepuluh bulan sebelum pemilu 2004 dilaksanakan. Selama masa itu banyak hal masih mungkin terjadi. Dalam politik, bahkan peristiwa yang terjadi dalam satu hari dapat mengubah segalanya. Masa kampanye dan strategi kampanye akan pula menentukan siapa yang akan dipilih oleh 55% responden yang belum menentukan pilihan itu. Sementara itu, mereka yang sudah punya pilihan, masih mungkin berubah pikiran pula.

Sekali lagi, semua analisis ini dibuat dengan asumsi bahwa survei CESDA, LP3ES itu dilakukan dengan benar. Jika tidak, semua hasil berikut analisis yang dibuat kolom ini sudah salah sasaran. *

Kegagalan Partai Politik

DEMOKRASI mustahil dapat stabil di sebuah negara jika negara itu tidak memiliki partai politik yang kuat. Sementara mustahil ada sistem kepartaian yang kuat jika mayoritas penduduk tidak terikat secara emosional dan rasional kepada partai yang ada.

Kenyataan ini yang kita kawatirkan terjadi di Indonesia setelah membaca hasil survei CESDA, LP3ES. Pada pertengahan Juni 2003, CESDA mempublikasi hasil surveinya secara acak di 13 provinsi. Survei mengambil responden sebanyak 3000 penduduk, dengan komposisi lelaki dan perempuan yang sama banyaknya, dengan metode wawancara tatap muka.

Ada dua temuan penting yang berhubungan dengan partai politik. Pertama, semua partai besar yang menang pemilu tahun 1999 mengalami pengurangan perolehan jumlah suara. PDIP yang dulu memperoleh suara lebih dari 30%, dan menjadi pemenang pemilu, merosot ke urutan kedua, dengan perolehan suara hanya 7%. Golkar

memang menyodok menjadi pemenang pemilu berdasarkan survei, namun dengan perolehan suara yang merosot menjadi di bawah 20%. PAN, PPP, PKB, dan PK berada di urutan berikutnya.

Kedua, mayoritas responden belum punya pilihan partai politik. Sebanyak 55% responden masih bebas. Mereka tidak terikat secara emosional dan rasional pada partai manapun. Padahal tersedia enam partai besar pemenang pemilu tahun 1999. di samping itu, tersedia pula puluhan partai baru.

Mengapa partai politik yang ada gagal menarik minat para pemlihnya? Tidakkah ini berarti mayoritas penduduk Indonesia terpisah dari kehidupan partai politik? Lalu aneka dinamika dunia kepartaian dan pemerintahan hanya tumbuh ibarat buah cangkokan yang tidak menyatu dengan aspirasi dan harapan politik kongkret masyarakat?

***

Jika kita asumsikan survei CESDA dilakukan secara benar, apa signifikansi dari temuannya? Besarnya jumlah responden (55%) yang tidak terkait secara emosional dan rasional kepada partai politik manapun menjadi bencana. Ada jarak yang lebar antara dunia kepartaian dengan publik luas. Ada jarak yang menganga antara pengurus partai dan masa. Partai politik hanya menarik pengurus partai atau segelintir public. Namun mayoritas publik merasa tidak terwakili oleh dinamika partai politik itu.

Partai politik telah gagal menjadi representasi politik masyarakat. Akibatnya, aspirasi, harapan, ketakutan, keinginan politik publik luas tidak tertangkap dan tersalurkan melalui dunia kepartaian yang ada. Jika publik luas ingin perubahan, keinginan itu juga tidak akan disalurkan melalui partai politik yang ada. Yang kemudian berkembang adalah politik di luar partai, yang lebih sulit dikendalikan

dan dikompromikan. Huru-hara dan politik jalanan selalu menjadi alternatif dan saluran bagi kekeceawaan politik.

Dunia parlemen akan pula mengalami isolasi yang sama. Mereka yang menjadi anggota DPR atau DPRD melalui partai politik yang ada. Jika kendaraannya saja, seperti partai politik, sudah berjarak dengan publik luas, DPR dan DPRD akan pula berjarak. Padahal di DPR dan DPRD itu aneka hukum yang mengatur bulat lonjongnya negara dibuat. Jika DPR dan DPRD terisolasi dari aspirasi politik masyarakat, semua produknya, termasuk UU ataupun Perda selalu mungkin tidak mencerminkan apa yang riel berkembang di masyarakat.

Parlemen menjadi asyik dengan ilusi dan kepentingan politisi di dalamnya. Aneka debat dan konflik di parlemen murni menggambarkan dinamika anggota parlemen itu sendiri. Dalam konstruksi seperti ini, mustahil pula kita mempunyai parlemen dengan kepercayaan publik yang tinggi.

***

Hasil survei CESDA itu menggambarkan partai politik yang ada sudah gagal menjalankan fungsi modernnya. Selama ini partai hanya diperlakukan sebagai mesin pencetak suara menjelang pemilu saja. Sekali pemilu selesai, dunia kepartaian tidak dikembangkan sebagaimana layaknya partai modern di negara demokrasi yang matang.

Dunia kepartaian, misalnya, tidak dijaga fungsinya untuk terus menerus menjadi artikulator publik luas. Padahal harapan, kekecewaan, aspirasi politik masyarakat adalah organisme yang terus berkembang dan hidup. Aspirasi itu perlu terus menerus diperbaharui dan disalurkan melalui aneka instrumen partai. Upaya pembaruan ini agaknya lupa dikerjakan. Akibatnya muncul jarak yang semakin lebar antara kepentinagan pengurus partai dengan dinamika politik masyarakat di luar partai.

Partai juga tidak menjaga fungsinya sebagai civic edukator. Partai seharusnya tidak hanya meminta publik untuk dicoblos dalam pemilu. Lebih mendasar dari itu, partai modern melakukan pendidikan politik dan pencerahan kepada publik luas. Apa itu demokrasi, mengapa negara kita terus terpuruk, bagaimana agar politik stabil, apa yang seharusnya diketahui warga negara adalah tema-tema yang seharusnya terus " didoktrinkan" oleh partai kepada publik luas. Civic education dapat menambah keterikatan rasional dan emosional pemilih terhadap partai politik.

Yang paling kentara, partaipun tidak memperluas komunitas politinya. Partai hanya menjadi dunia para pengurus, keluarga, dan handai taulannya saja. Komunitas partai politik tidak diperluas menjangkau segmen yang lebih luas, misalnya, menjangkau kaum buruh, guru, manusia berusia lanjut, mahasiswa, pengusaha. Penjangkauan itu harus pula dilakukan secara sistematis. Karena tidak ada pembinaan dan perluasan komunitas, tidak heran pendukung partai cenderung terus menurun.

Mengapa hal ini terjadi? Dunia kepartaian modern adalah hal yang baru di Indonesia. Selama ini, sejak merdeka sampai sekarang, kecuali di tahun 1950an, kita hidup dalam dunia partai yang dikendalikan dan dibonsai. Tidak ada keharusan bagi parpol saat itu untuk tumbuh karena hasil pemilu sudah diatur. Ketika reformasi dimulai di tahun 1998, para pemimpin belum menyadari sepenuhnya bagaimana partai seharusnya dikembangkan.

Di sisi lain, ini pula akibat buruk dari rangkap jabatan. Umumnya ketua umum partai besar juga menjadi pejabat. Ada yang menjadi presiden, wapres, ketua DPR bahkan menteri. Waktu mereka sudah disibukkan dengan urusan kenegaraan yang luar biasa banyak dan complicated. Akibatnya, partai di Indonesia tumbuh secara pas-pasan. Jelas ini berita buruk bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. *

"Merindukan Kembali" Orde Baru?

REFORMASI baru saja berlangsung empat tahun. Rezim Orde Baru dan tokoh utamanya baru saja dijatuhkan empat tahun lalu. Namun kini, mayoritas public luas sudah kembali "merindukan" Orde Baru. Sengaja dipasang tanda kutip pada kata "merindukan" itu, karena arti sebenar-benarnya bukanlah ingin Orde Baru kembali. Tetapi, ini hanya persepsi bahwa mereka lebih senang situasi ekonomi dan politik di era Orde Baru itu.

Demikianlah salah satu temuan survei yang dilakukan oleh LSI (Lembaga Survei Indonesia) pada Agustus 2003. Sampel diambil secara acak dan berjenjang secara nasional. Jumlah responden sebanyak kurang lebih 2.000 orang dari 220 desa yang tersebar di semua provinsi. Hanya Aceh yang tidak dijadikan sampel akibat darurat militer yang terjadi di wilayah itu. Responden yang dianalisis cukup representatif mengambarkan proporsi populasi diukur dari data demografisnya.

Para responden itu ditanya: menurut mereka apakah system pemerintahan Orde Baru lebih baik atau system pemerintahan sekarang yang lebih baik? Cukup mengejutkan, sebanyak 56% responden menyatakan system pemerintahan Orde Baru lebih baik. Hanya sekitar 27% yang mengatakan system pemerintahan sekarang yang lebih baik.

Empat tahun setelah jatuhnya Orde Baru sebenarnya bukan waktu lama. Namun waktu sependek itu sudah cukup untuk membangkitkan kembali SARS (Saya Amat Rindu Soeharto). Gejala apa itu? Apa konsekuensi politiknya? Bagaimana cara mengatasinya?

***

Responden juga digali soal opininya mengenai demokrasi. Apakah menurut mereka demokrasi itu system terbaik? Mayoritas responden menyatakan percaya, demokrasi merupakan system politik terbaik, walau hanya sekitar 60% responden. Berarti kerinduan pada Orde Baru itu tidak benar-benar, karena mereka tidak berkomitmen pada system demokrasi.

Ketika ditanya soal evaluasi mereka terhadap pemerintahan demokratis sekarang, jawabannya menjadi jelas. Mereka memang sedang " marah" atau kecewa dengan produk dan hasil kerja pemerintahan sekarang. Mereka rindu Orde Baru lebih karena kemarahan atas kinerja pemerintahan demokratis saja. Bahasa mudahnya, buat apa demokrasi atau reformasi, jika perut terus lapar?

Susahnya lapangan kerja, harga yang membumbung, pengangguran, berkurangnya subsidi, krisis ekonomi, adalah aneka isu yang menurut mereka harus menjadi prioritas pemerintah. Sementara justru di isu itulah mereka merasa situasi sekarang lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Semakinlah mereka " marah" atas situasi sekarang.

Konsekuensi dari " kerinduan" Orde Baru itu adalah " hukuman" kepada aneka partai yang membawa semboyan reformasi. Berbagai partai itu gagal bertambah besar. PDIP pada 1999 menjadi partai utama ang membawa semboyan reformasi. Pada 1999, hanya PDIP yang mampu melampaui Golkar, partai yang selalu menang dalam pemilu Orde Baru. Perolehan suara PDIP sekitar 32% pada 1999.

Namun, jika pemilu diselenggarakan hari ini (pada hari diadakannya survei pada bulan Agustus), perolehan PDIP diperkirakan hanya 20% lebih sedikit. PDIP bukan bertambah besar, tetapi justru mengerucut.

Tidak hanya PDIP yang terkena hukuman, partai alternatif lain juga mengalami nasib yang sama. Pada 1999, yang juga membawa semboyan reformasi adalah PAN, PKB, dan PBB. Tiga partai itu memang masih di bawah Golkar, namun mereka lolos thresold dan mereka menjadi alternatif dari PDIP. Perolehan PAN, PKB, dan PBB juga stagnan. Mereka memang tidak merosot drastis seperti PDIP, namun mereka juga tidak betambah.

Partai baru yang lahir setelah Pemilu 1999 juga mengalami nasib sama. Aneka partai dengan tokohnya sudah pula mengibarkan semboyan reformasi. Antara lain partai PIB, PNBK, Partai PDK, Partai Pelopor, dan Partai Bintang Reformasi. Mereka acap kali meneriakkan reformasi mati muda atau mati suri. Partai didirikan untuk kembali membuat reformasi di rel yang benar.

Nasib partai baru itu lebih parah lagi. Mereka bukan saja kecil dukungannya. Mereka bahkan terancam tidak lolos threshold 3%. Nama partai itu belum dikenal public luas. Para pemimpin partai memang tokoh terkenal bagi pembaca Koran. Namun, pemilih Indonesia yang berjumlah 145 juta menyebar di desa dan kota seluruh Indonesia. Hanya 5%-20% dari mereka yang membaca Koran.

Memang tidak bisa diklaim bahwa ada hubungan kausal, sebab-akibat, antara "kerinduan" terhadap Orde Baru dan kegagalan

partai yang membawa semboyan reformasi. Namun dua gejala itu datang bersamaan. Pemilu acap kali menjadi "pengadilan" bagi partai yang dianggap bertanggung jawab atas buruknya situasi.

***

Semua partai itu bermasalah akibat berbagai sebab. Secara umum mereka memang terkena dampak macro kekecewaan public atas situasi reformasi. "kerinduan" akan Orde Baru merupakan ekspresi konkret dari kemarahan atas leadership dan kinerja aneka partai itu.

Sebagian kegagalan partai untuk tumbuh juga perkara manajemen. Ketua umum partai dengan bendera reformasi-PDIP, PAN, PBB- adalah pejabat negara. Selagi memangku ketua umum, mereka juga menjadi presiden, ketua MPR, atau menteri. Waktu dan tenaga mereka sudah habis terkuras untuk mengurus negara. Konsentrasi untuk partai menjadi semakin sedikit.

Rangkap jabatan sebenarnya tidak bermasalah. Asalkan ada delegasi kekuasaan kepada pelaksana harian partai untuk konsolidasi. Upaya konsolidasi cukup terlambat. Justru ketika pemilu akan dimulai lagi, elit partai menjadi supersibuk. Mereka lupa untuk membangun partai sejak awal.

Sedangkan bagi partai baru, persoalannya ada nuansa lain. Sangat sulit membuat pemilih mengenal nama partai baru itu. Jumlah partai sudah terlalu banyak. Hanya Golkar, PDIP, dan PPP yang dikenal luas, mengingat tiga partai itu sudah hadir di era Orde Baru. Tetapi, untuk partai PIB, PNBK, Partai PDK? Dibutuhkan kampanye yang sangat massif untuk memperkenalkan nama partai itu kepada para pemilih. Itu sudah menyangkut kesiapan modal, kesiapan SDM, dan juga jaringan.

***

Apa hubungan gejala di atas bagi politik Indonesia di masa datang? Demokrasi hanya dapat tumbuh subur di " tanah" yang pas. Hanya publik yang puas atas kinerja pemerintahan demokrasi yang bersedia membela demokrasi dari uapaya menggantinya.

" Kerinduan" akan Orde Baru menjadi sinyal yang mengkhawatirkan. Jika terjadi kudeta terhadap politik demokrasi, misalnya, maka perlawanan terhadap kudeta itu tidak akan keras. Mungkin sebagian justru mengharapkan kudeta itu sebagai solusi cepat perbaikan situasi.

Demokrasi juga sulit mengakar dan terkonsolidasi jika dunia kepartaian tidak kunjung melembaga. Semua negara demokrasi yang matang hanya memiliki tiga sampai lima partai. Semakin sedikit partai di parlemen, semakin baik karena memudahkan negosiasi.

Situasi yang ada, partai bukannya bertambah sedikit akibat perolehan partai di parlemen yang membesar. Dengan melihat perolehan yang ada, jika pemilu dilaksanakan hari ini, jumlah partai yang lolos threshold sangat mungkin bertambah.

Pada 1999, parlemen hanya mempunyai pemain enam partai politik yang lolos threshold. Kini, jika pemilu dilaksanakan hari ini, pemain itu bertambah enam, dengan masuknya PKS (Partai Keadilan dan Sejahtera).

Demokrasi hanya menjadi stabil jika mayoritas warga negara puas dengan perolehan reformasi. Jika tidak, reformasi dan demokrasi kita rawan karena demokrasi berlangsung dalam situasi banyak orang yang lapar. *

Manuver Konvensi Partai Golkar

UNTUK kepentingan Partai Golkar sendiri, konvensi calon presiden Golkar semestinya diperluas. Ujung dari konvensi itu jangan dipersempit hanya memilih calon presiden, calon wakil presiden, yang akan diajukan Partai Golkar. Sebaiknya, konvensi memilih calon yang diberikan hak prerogatif saja, untuk menentukan paket capres dan cawapres Golkar pada 2004 nanti, dengan persetujuan DPP partai.

Katakanlah yang terpilih dalam konvensi nanti adalah satu tokoh, tokoh A. Maka sang tokoh memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang layak ia majukan sebagai calon presiden dan calaon wakil presiden.

Calon itu kelak tidak harus dirinya yang menang konvensi. Ia berhak mengajukan calon atau pesaing lain, di luar dirinya sendiri. Ini dilakukan semata-mata karena perhitungan rasional atas siapa yang paling mungkin dipilih oleh 145 juta pemilih di seluruh Indonesia.

Dengan manuver itu, konvensi Golkar memperoleh dua keuntungan. Pertama, konvensi terhindar dari kesalahan fatal dalam politik praktis. Adalah suatu kenyataan bahwa mereka yang menang konvensi tidak otomatis adalah tokoh yang juga populer di mata pemilih.

Konvensi hanya dipilih oleh kurang dari enam ratus pimpinan partai. Sementara pemilih yang sebenarnya adalah 145 juta rakyat yang hidup di berbagai kota dan desa. Apa gunanya menang dalam konvensi tetapi pasti kalah dalam pemilu karena hasilnya sudah dapat diduga.

Kedua, dengan memberikan hak prerogatif itu, ruang manuver Golkar dalam pencalonan presiden nanti bertambah luas. Sang tokoh yang menang konvensi, dengan dukungan partai, dapat bermanuver mencalonkan tokoh lainnya yang saat itu sangat popular. Sungguh pun tokoh lain yang dicalonkan, tetapi Golkar dan yang menang konvensi dapat bernegosiasi untuk mendominasi cabinet.

***

Mungkin ini rekomendasi terbaik yang dapat diberikan kepada Golkar jika kita melihat hasil survei pemilu terakhir. Dalam enam bulan ini, ada beberapa survei yang dikerjakan oleh beberapa lembaga, namun dengan hasil yang kurang lebih sama. Lembaga itu cukup ternama, dengan metodologi yang terjaga, misalnya IRI, IFES, dan LP3ES. Terakhir, LSI juga mengeluarkan hasil survey nasional, dengan hasil yang juga saling menguatkan.

Sebagaimana yang dilakukan IRI dan IFES, LSI juga mengambil sampel national. Namun, LSI mengambil responden dari 220 desa di seluruh provinsi Indonesia, kecuali Aceh, yang sedang dalam darurat militer.

DENNY J.A

Sampel diambil secara standar dengan multistage random sampling. Wawancara tatap muka. Control dan spot-check di lapangan dilakukan untuk mengontrol data. Sampel yang dianalisis sebanyak 1.976 responden, yang secara proporsional menggambarkan karakter populasi Indonesia hasil sensus BPS 2000.

Sebagaimana dipublikasikan oleh lembaga lain, LSI juga sampai pada kesimpulan yang sama. Partai Golkar akan kembali mendominasi parlemen, jika pemilu diselenggarakan " hari ini" (di hari survei, bulan Agustus 2003). Perkiraan perolehan Golkar sebanyak sekitar 30% dan mengalahkan PDIP yang anjlok. Persentase yang diperoleh Golkar memang berbeda-beda di antara lembaga survei. Namun urutannya tetap sama, bahwa Golkar nomor satu.

Soal calon presiden, aneka lembaga survey itu juga punya temuan yang sama. Dua yang terpopuler masih Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, mengalahkan yang lainnya. Dalam putaran pertama, agaknya dua tokoh itu yang akan lolos dalam pemilu presiden, jika pemilu dilaksanakan "hari ini" .

Aneka calon presiden Partai Golkar banyak yang berbakat. Namun, waktu terlalu sedikit untuk membuat mereka dikenal oleh 145 juta pemilih. Apa daya, akibatnya, semua calon yang ikut konvensi partai Golkar memang masih jauh di bawah Megawati ataupun Susilo Bambang Yudhoyono. Jika tidak ada manuver yang brilian melalui konvensi, Golkar dapat menang di parlemen, namun nihil besar dalam pertarungan presiden.

Memilih partai untuk parlemen dan memilih tokoh untuk calon presiden adalah dua hal yang berbeda. Calon presiden partai yang menang pemilu belum tentu terpilih. Sementara calon presiden partai kecil mungkin saja bisa terpilih.

Di Amerika Serikat hal itu biasa terjadi dalam pemilihan presiden langsung. Kongres atau parlemen dikuasai oleh Partai Republik,

misalnya. Tetapi presiden dikuasai oleh calon dari partai Demokrat. Atau sebaliknya, Kongres dikuasai Partai Demokrat. Partai Republik di Kongres minoritas saja. Tetapi presiden yang terpilih justru dari kalangan Partai Republik.

Selaku calon partai terbesar dalam pemilu 2004, Golkar harus cerdas membaca gejala. Jauh lebih baik bagi Golkar jika di samping menjadi partai terbesar di parlemen juga menguasai pemerintahan eksekutif. Tapi apa yang harus dilakukan? Proses konvensi sudah berjalan dan tidak dapat dibalik atau dibatalkan.

***

Inovasi tambahan dibutuhkan. Konvensi tetap dilanjutkan. Satu calon yang akan dipilih dalam konvensi tetap pula diteruskan. Bedanya, Golkar membuka manuver tambahan. Yang menang konvensi diberikan pula hak prerogatif untuk menentukan paket capres dan cawapres Partai Golkar, tentunya dengan persetujuan DPP Partai Golkar.

Capresnya nanti, bisa saja tokoh yang menang konvensi itu sendiri, jika ia memang makin populer. Namun, jika sampai dihari pendaftaran calon presiden, tokoh yang menang konvensi mudah dikalahkan, ia dan Partai Golkar masih punya ruang bermanuver. Ia, misalnya, dapat menunjuk tokoh lain yang populer untuk menjadi calon resmi Golkar, dengan persetujuan DPP. Namun, sungguhpun capres dan cawapresnya diambil dari tokoh luar, ia dan DPP Golkar tetap mendominasi susunan kabinet.

Ibaratnya, badan yang subur dari Golkar hanya butuh ' kepala' yang laku dijual di mata pemilih. Namun tetap saja, de facto, Golkar dan tokoh yang menang konvensi itu yang berkuasa menentukan cabinet. In tentu dapat dilakukan melalui negosiasi dan kesepakatan dengan mereka yang bersedia dicalonkan Partai Golkar.

DENNY J.A

Politik Indonesia pasca-2004 sangat ditentukan oleh inisiatif Partai Golkar. Bukan PDIP yang nantinya menjadi komando di parlemen, tetapi Golkar. Sebagai calon partai yang terbesar, Golkar berperan menjadi King Maker. Untuk menjadi King Maker, manuver yang paling brilian adalah memberikan hak prerogatif itu kepada siapa pun yang nanti memenangkan konvensi Partai Golkar. *

Manuver Partai Golkar Berikutnya

SETIAP negara demokratis memiliki partai utama. Terutama jika negara itu sedang bertransisi menuju demokrasi, partai utama itu yang menjadi pengawal efektif agenda perubahan agar mengalami konsolidasi. Demikianlah, transisi di Afrika Selatan dikawal oleh ANC. Transisi demokrasi di India dikawal oleh partai Kongres. Di Jepang, transisi demokrasi dikawal oleh LDP.

Bagaimana dengan transisi demokrasi di Indonesia? Partai mana yang paling mampu menjadi partai utamanya? Posisi itu kini sedang diperebutkan oleh PDIP dan Golkar. Lima tahun lalu, PDIP terkesan akan berkembang menjadi partai utama politik baru Indonesia. Dalam Pemilu 1999, pemilu pertama yang demokratis sejak 32 tahun Orde Baru, PDIP berhasil menjadi partai terbesar. Ia mengalahkan Golkar, partai yang selalu menjadi pemenang mayoritas tunggal dalam pemilu Orde Baru.

Tetapi, menjelang pemilu berikutnya, lima tahun kemudian,

PDIP tampak goyah. Kurangnya konsolidasi partai dan buruknya leadership dalam partai itu membuatnya tidak tumbuh semakin besar. Sebaliknya, Partai Golkar kembali menguat. " Tongkat komando" yang kini dipegang PDIP segera beralih ke Partai Golkar. Tentu itu dengan asumsi jika sampai pemilu 2004 kelak tidak ada perubahan yang substansial dari PDIP. Juga itu dengan asumsi sampai pemilu 2004 itu Partai Golkar tidak pula membuat kesalahan yang besar.

Namun, sebagai calon partai utama Indonesia di asa transisi, saat ini Golkar juga punya problem. Golkar muncul sebagai fenomena partai terbesar tetapi tanpa tokoh. Sungguhpun Golkar berpeluang dominan di parlemen, namun tokoh Partai Golkar tidak sepopuler tokoh di luar Golkar untuk menjadi presiden.

Banyak tokoh yang sudah menyiapkan diri ikut dalam " kontes" konvensi partai Golkar untuk memperoleh tiket calon presiden dari Partai Golkar. Berdasarkan hasil survei, berbagai nama itu masih kalah jauh dari Megawati Soekarnoputri ataupun Susilo Bambang Yudhoyono. Golkar agaknya perlu manuver tambahan agar ia tidak hanya dominan di parlemen, tetapi juga menguasai kabinet pemerintahan.

***

Fenomena yang biasa dalam politik demokratis, jika banyak lembaga survei yang melakukan riset sebelum pemilu. Ada lembaga survei yang baik, namun jauh lebih banyak lembaga survei yang buruk, jika dilihat dari metodologi dan penarikan sampelnya. Untuk survei nasional dengan metode wawancara langsung (tatap muka), dapat direnungkan hasil yang dibuat oleh tiga lembaga yang standar dalam soal metodologi. IRI, IFES, dan LSI, berujung pada hasil yang kurang lebih sama. Jika pemilu dilaksanakan hari itu (disaat survey), Partai Golkar menjadi partai terbesar. Analisis yang dibuat LSI lebih detail lagi. Partai Golkar bukan saja berpeluang menjadi partai utama

dalam pemilu 2004 kelak. Partai Golkar juga berkembang menjadi miniatur masyarakat Indonesia.

Partai Golkar unggul dari partai lainnya di semua pulau besar. Tak hanya di Papua, Sulawesi, atau Kalimantan, tetapi di Sumatera bahkan di Jawa, Partai Golkar mengalahkan PDIP, apalagi partai lain. Di kalangan pemilih Islam, bahkan santri, Partai Golkar juga mengalahkan PPP dan PKB. Di kalangan umat kristiani dan Katolik, bahkan Partai Golkar mengalakan PDIP.

Ketika pemilih dipilih berdasarkan pendapatan dan pendidikan, hasilnya lebih mengejutkan lagi. Yang ternyata menjadi partainya wong cilik, bukan PDIP, tetapi Golkar. Jumlah pemilih yang miskin dan berpendidikan rendah lebih banyak yang memilih Golkar ketimbang PDIP. Dilihat dari pemilih terpelajar dan kaya, Golkar juga mengungguli partai lainnya termasuk PAN, yang selama ini diasosiasikan sebagai partai kelas menengah kota.

Ada empat alasan mengapa Partai Golkar kembali dominan, padahal reformasi yang menghujat Partai Golkar baru berlangsung kurang dari lima tahun.

Pertama, publik mempersepsikan bahwa reformasi gagal. Public kecewa dengan perubahan yang dibawa oleh reformasi, baik di wilayah ekonomi maupun politik. Akibatnya, semua partai yang membawa label reformasi mengalami penghukuman.

Mayoritas public saat ini merasa system pemerintahan Orde Baru lebih baik. Di kala begitu banyak pengangguran dan harga meningkat, public "bernostalgia" tentang kondisi ekonomi era Orde Baru yang tumbuh pesat.

Di kala kerusuhan dan gerakan separatisme meluas, public juga merindukan stabilitas yang dibentuk oleh Orde Baru. Di kalangan mayoritas "pecinta" Orde Baru itu, memang jauh lebih banyak

suara yang ditumpahkan kepada Partai Golkar. Publik secara spontan, mungkin, mengasosiasikan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi Orde Baru dengan Partai Golkar. Kegagalan reformasi di mata public justru menguntungkan Partai Golkar.

Kedua, public mempersepsikan bahwa saat ini yang paling penting adalah krisis ekonomi. Masalah KKN memang tetap penting. Masalah kerusuhan juga tetap penting. Masalah keadilan juga tidak dapat diremehkan. Namun lebih dari 60% public luas mengidentifikasikan krisis ekonomi harus menjadi prioritas pemerintahan.

Ketika mereka ditanya, partai mana yang paling mampu mengatasi krisis ekonomi, sekali lagi jumlah terbesar menunjuk Partai Golkar. Bagi mereka Golkar lebih menjanjikan untuk mengatasi isu yang mereka anggap paling penting. Citra teknokratis dan pemecah masalah lebih didapatkan dari partai Golkar ketimbang partai lainnya. Ini tidak pula terlepas dari kegagalan PDIP meyakinkan publik luas mengenai keberhasilan ekonomi pemerintahan Megawati.

Ketiga, yang membuat Golkar membesar adalah tingkat loyalitas pemilih. Dalam setiap pemilu adalah hal umum jika pemilih berganti partai. Pada 1999, ia misalnya memilih Partai A, pada 2004 kelak, ia berganti memilih Partai B. Semua pemilih di semua partai menunjukkan perpindahan suara.

Cukup mengejutkan, PDIP menjadi partai yang pemilihnya termasuk yang paling tidak loyal. Agaknya banyak pemilih PDIP pada 1999 hanyalaj karena aksi protes dan simpati atas penderitaan yang diterima PDIP. Namun setelah empat tahun berkuasa, PDIP terlihat " sibuk" bertengkar, antara lain, soal " pemilihan gubernur" , banyak suara pemilih yang lari.

Loyalitas pemilih Golkar ternyata yang paling tinggi dibanding partai lainnya. Pemilih PKB dan PKS juga punya loyalitas yang tinggi, tetapi masih d bawah Partai Golkar. Pertautan emosional pemilih

itu dengan Partai Golkar agaknya cukup terbina. Sosialisasi loyalitas partai dalam kehidupan keluarga dan akar sejarah hubungan pemilih itu dengan Golkar, memang lebih lama terbina. Tidak peduli gonjang-ganjing yang menimpa Ketua Umum Partai Golkar, banyak pemilih itu yang loyal kepada Golkar sebagai partai.

Keempat, yang juga membuat Golkar berpeluang menjadi partai utama adalah posisinya yang pas. Politik Indonesia diwarnai oleh spectrum nilai Islam di sebelah kanan dan nilai kebangsaan/nasionalis di sebelah kiri. PBB dan PPP ada di sebelah kanan spectrum politik itu. PDIP ada di sebelah kiri. Posisi Golkar ada di tengah. Ia dapat masuk ke dalam komunitas Islam, namun juga dapat masuk dalam komunitas nasionalis.

Posisinya sebagai partai tengah itu membuatnya paling banyak mendapat limpahan suara yang lari dari partai lain. Suara yang lari dari PDIP di sebelah kiri, banyak yang nyangkut ke Golkar. Sebaliknya, suara yang hijrah dari Partai Islam, juga banyak yang lari ke Golkar. Ketika partai lain menjadi stagnan atau semakin kecil, tidak heran, Golkar justru semakin besar karena posisinya yang di tengah itu.

***

Namun, Partai Golkar juga memiliki persoalan lain yang kurang menguntungkan. Di satu sisi, sebagai partai, Golkar akan berjaya di parlemen. Namun di sisi lain, partai itu kehilangan figur publik yang populer. Semua tokoh yang ikut Konvensi Partai Golkar, kalah jauh dengan tokoh di luar Partai Golkar dalam hal popularitas sebagai calon presiden.

Dalam waktu dekat, tanggal 20 Oktober 2003 ini, partai Golkar akan memilih dan menetapkan lima calon utamanya sebagai calon presiden/wakil presiden. Pada Februari 2004, atau sesudah pemilu legislatif, calon itu disusutkan menjadi satu. Sejauh ini nama yang menonjol adalah Wiranto, Akbar Tandjung, dan Surya Paloh.

Konvensi Golkar memang sudah membuahkan hasil. Inovasi konvensi membuat Partai Golkar menjadi pusat perhatian public. Namun, yang baru terasa dari konvensi itu justru meningkatkan popularitas partai. Sementara popularitas tokoh Golkar, yang ikut konvensi, belum memperlihatkan kenaikan yang berarti. Di luar sana, masih nama Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono yang paling dipilih, berdasarkan hasil survei beberapa lembaga yang kredibel.

Jika memang Golkar ingin menjadi partai utama, manuver tambahan diperlukan. Untuk mengendalikan pemerintahan, tidak cukup Golkar hanya dominan di parlemen. Golkar harus pula dominan di pemerintahan eksekutif. Menjelang ulang tahun Golkar pada 20 Oktober ini, kita menunggu manuver selanjutnya dari Partai Golkar, agar juga punya kaki yang kuat di pemerintahan pasca Pemilu 2004. Hanya manuver tambahan itu yang membuat Golkar tidak menjadi fenomena " Partai Terbesar tanpa Tokoh Populer" . *

Ironi Politik Amien Rais?

DIBANDINGKAN semua calon presiden yang ada, persuasi politik Amien Rais adalah yang paling modern. Gaya kampanyenya mirip para calon presiden Amerika Serikat. Tidak segan-segan, minggu lalu Amien manggung dengan rock band, Slank, ikut berdendang di panggung. Ia jumpai pula rakyat banyak di pasar dan pusat keramaian.

Ia merekam suaranya dalam tembang campur sari reformasi secara masal di kaset. Tak ketingggalan, manuver koalisi untuk memperbesar pengelompokan politik ia lakukan secara cerdas. Karena manuvernya, muncul istilah Koalisi Partai Islam Menghadang Megawati. Atau yang terbaru: kekuatan reformasi melawan kekuatan status quo Megawati.

Dihitung dari kapabilitas pribadi apalagi integritas pribadi, Amien Rais juga tergolong calon presiden terdepan. Setelah lima tahun reformasi, keunggulan Amien di dua hal penting di atas semakin

kentara. Namun, sangat mungkin, Pemilu 2004 justru menjadi akhir politik Amien Rais. Inilah ironi politik Amien Rais. Apa kesalahannya?

Survei nasional yang dilakukan LSI (Lembaga Survei Indonesia) menunjukan bahwa sulit bagi Amien Rais untuk lolos ke babak kedua pemilihan presiden. Suara yang diperolehnya terpaut jauh bukan saja dari Megawati Soekarnoputri atau Susilo Bambang Yudhoyono. Amien Rais bahkan memperoleh suara di bawah Gus Dur, Hamzah Haz, dan Akbar Tandjung.

Survei LSI itu dilakukan Agustus 2003 lalu. Pemilihan sampel dilakukan dengan mengikuti metodologi standar, wawancara tatap muka. Responden dipilih secara acak berjenjang. Didapat jumlah responden sebanyak 2.240 dari 220 desa dan kota seluruh Indonesia, kecuali Aceh yang sedang darurat militer. Setelah dibersihkan, data yang siap dianalisis sebanyak 1.976.

Dilihat dari berbagai karakternya, mulai dari proporsi usia, pendidikan, etnis, dan agama, sampel yang didapati untuk menyerupai proporsi populasi Indonesia hasil sensus Biro Pusat Statistik tahun 2000. ketika ditanya partai apa yang dipilih di tahun 1999 lalu, proporsi partai yang dipilih juga menyerupai proporsi hasil pemilu 1999. Data yang diolah LSI sangat representative mewakili calon pemilih Indonesia di tahun 2004 kelak.

***

Dalam demokrasi, yang akan terpilih melalui pemilihan langsung memang bukan mereka yang paling kompeten. Tetapi yang akan dipilih rakyat adalah mereka yang paling dikenal dan disukai.

Komunitas pemilih Indonesia terbagi dalam komunitas Islam yang sangat besar. Mereka adalah komunitas yang secara emosional tersentuh oleh symbol dan aspirasi politik Islam. Di samping itu juga ada komunitas 'kebangsaan', yang secara formal mereka

juga beragama Islam atau lainnya, namun tidak bersandar kepada sentimen dan symbol politik Islam. Dilihat dari perjalanan sejarah Indonesia, porsi komunitas kebangsaan terus meningkat.

Persoalan Amien Rais adalah posisinya yang tanggung dalam spektrum politik yang ada. Di kalangan komunitas Islam, Amien tidak sepenuhnya merepresentasikan aspirasi ideal komunitas itu. Di babak pertama pemilihan presiden, jika PKB atau NU juga punya calon presiden, hampir dapat dipastikan suara santri NU akan memilih calon PKB atau calon NU, dan meninggalkan Amien Rais. Apalagi Amien Rais sudah pula punya sejarah menaikkan tetapi berbalik menjatuhkan Gus Dur dari kursi presiden.

Suara komunitas Islam di luar NU juga tidak penuh tumpah ke Amien Rais. Di sana ada pula figur lain yang tidak kalah pamor. Ada Hamza Haz, ketua umum partai dengan simbol Islam juga. PPP bahkan lebih besar dari PAN pimpinan Amien Rais. Dalam nilai dan aspirasi Islam, PPP juga lebih tegas daripada PAN. Hamzah Haz juga lebih berani memainkan simbol Islam daripada Amien Rais.

Tidak hanya Hamzah Haz, di sana ada pula Yusril Ihza Mahendra. Memang Yusril tidak memimpin partai besar. Namun, secara individual ia luas dikenal dan disukai oleh terutama kalangan wanita. Suara komunitas Islam terbagi ke bayak tokoh. Amien Rais di kalangan ini saja bahkan bukan yang paling popular.

Di sisi lain ada pula komunitas kebangsaan yang tidak kalah banyaknya. Mereka adalah pemilih PDIP, Golkar, dan aneka partai lain yang lebih pluralis dan mencitrakan diri sebagai partai yang kurang lebih sekuler. Pada mulanya mereka juga pecinta Amien Rais. Namun, karena manuver yang dibuat Amien Rais sendiri, sebagian dari mereka sudah pergi meninggalkannya.

***

DENNY J.A

Di tahun 1997 dan 1998, Amien Rais menjadi magnet perubahan. Ia adalah lokomotif yang mampu menghimpun kekuatan anti Orde Baru. Berdiri di belakang Amien Rais, berbagai tokoh dengan spektrum agama, aliran politik, serta ideologi yang beragam. Mereka menemukan Amien Rais sebagai altenatif pemimpin.

Namun di tahun 1999, setelah pemilu, Amien Rais terjebak memainkan isu keislaman. Ia memotori lahirnya Poros Tengah yang sangat masterpiece dalam politik praktis. Di tengah pertarungan Megawati, selaku pemenang pemilu, versus Habibie, Amien berhasil menghimpun kekuatan lain.

Melalui aneka manuver yang sangat historis, akhirnya yang memenangkan pertarungan presiden adalah Poros Tengah, dengan calon presiden Gus Dur. Apa yang dilakukan Amien Rais adalah hal yang lumrah saja. Siapapun yang berada dalam posisi Amien Rais sangat mungkin melakukan hal sama.

Tetapi segera mereka yang tidak suka simbol keislaman bermain dalam arena politik praktis, mulai meninggalkan Amien Rais. Dalam komunitas kebangsaan, figur Amien Rais makin tenggelam. Komunitas ini punya tokoh yang pamornya jauh lebih dipercaya yang dianggap taat asas untuk tidak memainkan kartu agama di dunia politik praktis. Tokoh itu seperti Megawati atau Susilo Bambang Yudhoyono.

Posisi Amien Rais sangat tanggung di dua komunitas itu. di kalangan Islam, ia kalah Islam dibandingkan Gus Dur atau Hamzah Haz. Di kalangan politik kebangsaan dan pluralis, ia kalah pluralis dibandingkan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Jika ia ingin mencitrakan dirinya kembali sebagai pemimpin Islam, ia semakin kehilangan suara dari kalangan kebangsaan. Jika ia semakin ingin tampil sebagai tokoh pluralis, ia akan semakin kehilangan suara dari komunitas Islam.

Seandainya pun karir politik Amien Rais memang berakhir di tahum 2004, ia dan pendukungnya tidak perlu berkecil hati. Lebih daripada menjadi presiden, Amien Rais sudah sangat harum dengan posisinya sebagai Bapak Reformasi. *

Tumbuahnya Muslim Demokrat

HARI itu, enam ahli, diplomat, dan reporter dari negara asing menelpon saya. Mereka ada yang berasal dari kedutaan, kantor berita ataupun lembaga penelitian. Sebagian berasal dari Australia, Amerika Serikat. Sebagian lagi dari Jerman, Kanada, dan Belanda. Mereka merespon sebuah berita di halaman pertama The Jakarta Post, 18 November 2003, yang berjudul " Muslim Voters Favor Pluralism." Harian itu memberitakan bahwa selama lima puluh tahun terakhir terjadi perubahan yang signifikan dalam pemilih muslim Indonesia. Bahkan di kalangan pemilih muslim yang taat beribadah sekalipun, telah terjadi moderasi, pluralisasi, bahkan demokratisasi mereka semakin cenderung dan simpati kepada tokoh atau partai yang mengusung isu pluralisme.

Koran itu mengutip survey yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia. Adapun survey itu dilaksanakan secara nasional, di 220 desa dan kota di semua provinsi kecuali Aceh. Wawancara dilakukan

tatap muka pada akhir bulan Agustus 2003. sample yang didapat secara kongruen menggambarkan populasi pemilih Indonesia nanti di tahun 2004. Dari sample itu, bersandar pada ritual dan ketaatan beribadahnya, didapatkan pemilih non-muslim sekitar 10%, pemilih muslim yang sangat dan cukup religius sekitar 45%, dan muslim sekuler sebesar 45%.

Berbeda dengan yang diopinikan umumnya media Barat, hasil survey menunjukkan bahwa pemilih muslim yang religius sekalipun, mayoritas mereka tidak anti-demokrasi. Sebaliknya, mereka mendukung dan punya komitmen dengan prinsip demokrasi.

Kepada mereka ditanyakan pendapat mengenai lima pertanyaan standar demokrasi. Antara lain, apakah mereka setuju atau tidak setuju bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik. Apakah mereka setuju atau tidak setuju bahwa demokrasi sumber kekacauan negara. Hal yang sama ditanyakan soal pemilu yang bebas, kompetisi, serta hubungan demokrasi dan pembangunan ekonomi. Sekitar 60% dari pemilih muslim yang religius itu memberikan jawaba positif atas demokrasi.

Berbeda pula dengan yang sering diopinikan media Barat, pemilih muslim yang paling religius sekalipun di Indonesia sangat nasionalistik. Mereka tidak anti-nasionalisme. Sebaliknya, mayoritas mereka cinta negara dan bersedia berperang membela negara. Bahkan persentase pemilih muslim yang bersedia berperang membela negara lebih tinggi ketimbang pemilih non-muslim.

Menanggapi temuan LSI ini, umumnya warga asing itu bertanya, "bagaimana bisa?" Apakah penelitian itu dilaksanakan dengan benar?" Atau mereka juga bertanya, bagaimana Anda menjelaskan fenomena terorisme? Atau fenomena Jamaah Islamiyah?

***

Pemilih muslim Indonesia, baik yang sekuler dan yang sangat religius, belum pernah diteliti secara serius oleh pengamat Barat yang paling serius sekalipun. Umumnya studi yang mereka lakukan adalah studi antropologis dengan jumlah sample yang terbatas. Sebaik apapun fasilitas riset yang mereka punya, tentu mereka tidak bisa mengklaim bahwa temuan mereka adalah representasi dari keseluruhan populasi Indonesia.

Studi yang menggunakan pendekatan survey, wawancara tatap muka, dengan sample secara random dan skala nasional, belum banyak dilakukan. Pendekatan kuantitatis itu sendiri memang gejala baru dalam dunia akademis Indonesia.

Jika dikalangan ahli saja banyak yang bias mengenai karakter yang riil dari pemilih muslim Indonesia, apalagi di kalangan awam. Umumnya pengamat awam dari dunia Barat sangat terpengaruh oleh opini yang dibentuk media. Padahal media umumnya hanya memberitakan sisi sensasi bersandar pada pandangan selintas.

Terutama sejak Tragedi 11 September, di kalangan warga asing, umat Islam mendapatkan sorotan dan citra yang negatif. Bom yang meledak di Bali dan di Hotel Marriot, semakin menambah imajinasi negative mereka. Apalagi semakin banyak pula dikabarkan warga Indonesia, lulusan pesantren, yang ditangkap di luar negeri. Di seputar negara Asia, ramai dibicarakan ekspor teroris dari muslim Indonesia.

Temuan yang dihasilkan LSI memberikan gambaran yang sesungguhnya. Memang ada sekelompok ekstrem di Indonesia, yang anti-demokrasi dan anti-nasionalisme. Namun jumlah mereka sangat kecil, sekitar 1-2% saja. Di samping itu, kelompok ekstrem ini menyebar merata. Mereka tidak hanya ada di kalangan muslim yang religius, tetapi juga muslim sekuler, dan bahkan pemilih non-muslim sekalipun.

Fenomena ekstrem minoritas ini adalah fenomena universal, yang ada di semua negara. Di Jepang, ada minoritas sekte yang meracuni terowongan kereta api. Di Amerika Serikat juga banyak ekstrem Protestan yang melakukan bunuh diri bersama. Di Jerman, ada pula ekstrem yang anti-imigran dan pengagum Hitler.

Namun mayoritas muslim Indonesia, bahkan di kalangan pemilih muslim yang sangat dan cukup religius, yang taat beribadah, mereka adalah pendukung demokrasi. Lima puluh tahun terakhir ini, tumbuh secara signifikan muslim democrat.

***

Evolusi pemilih muslim Indonesia dapat pula dilihat dari dua titik waktu. Misalnya direntangkan pemilu pertama di tahun 1955 dan sekitar lima puluh tahun kemudian dalam pemilu 2004 nanti. Hasil survei LSI menunjukkan terjadinya moderasi dan demokratisasi yang cukup signifikan di kalangan pemilih muslim itu.

Di tahun 1955, kita mempunyai empat partai Islam yang memperjuangkan syariat Islam di dunia public. Partai Masyumi, Partai NU, Perti, dan PSII berjuang untuk sebuah formalitas politik Islam, baik bernama negara Islam ataupun Piagam Jakarta. Jumlah total mereka saat itu diukur dari pemilih sekitar 43%.

Dalam pemilu 1999, dan juga dari hasil survey LSI 2003, partai yang secara langsung ataupun tidak mengusung syariat Islam di dunia public adalah PPP, PBB dan PKS. Total pemilih mereka jika pemilu dilaksanakan hari ini hanya sekitar 14% saja. Terjadi penurunan yang sangat drastis sejak tahun 1955, dari sekitar 43% menjadi hanya 14% saja di tahun 2003.

Ke mana NU yang dulu mendukung Partai NU dan Muhammadiyah yang mendukung Partai Masyumi? Telah terjadi perubahan yang signifikan pada dua organisasi itu. NU kini mengidentifikasikan diri

dengan PKB, yang memperjuangkan pluralisme dan partai terbuka. Muhammadiyah jga banyak yang pergi ke PAN dan Golkar, yang juga memperjuangkan pluralisme dan partai terbuka. Pemilih muslim Indonesia kini memang sudah sangat berbeda. *

Hidayat Nur Wahid, Presiden SMS?

JIKA pemilihan presiden secara langsung tahun 2004 dikerjakan seperti yang terjadi di Liputan Enam SCTV, pemenangnya sudah jelas. Hidayat Nur Wahid mengalahkan secara telak sekali tidak hanya tokoh dari partai baru. Dalam jajak pendapat melalui SMS itu, bahkan Hidayat melampaui tokoh senior dalam politik Indonesia seperti Amien Rais, Akbar Tandjung, Hamzah Haz, Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan Megawati Soekarnoputri.

Kini ramai dipercakapkan inovasi baru dari SCTV untuk menjaring pendapat public melalui SMS. Inovasi ini jelas punya pengaruh politik yang besar untuk dua hal. Pertama, Liputan 6 SCTV adalah salah satu siaran berita favorit yang ditonton publik hampir di seluruh Indonesia. Jajak pendapat SMS itu diulang-ulang berhari-hari dan masuk secara mendalam ke lubuk opini publik.

Kedua, celakanya, banyak pula publik yang tidak memahami metodologi jajak pendapat. Hanya karena diikuti lebih dari

50.000 responden, dan dianggap jauh lebih banyak dibandingkan responden lembaga jajak pendapat resmi yang hanya sekitar 2.000, jajak pendapat SMS itu dianggap lebih menggambarkan kenyataan. Terbentuklah sebuah rumor dan spekulasi bahwa tahun 2004 nanti, Hidayat Nur Wahid menjadi presiden Indonesia yang keenam.

Jelas ini sudah distorsi opini yang luar biasa. Sebuah jajak pendapat melalui SMS, apalagi untuk konteks Indonesia, seharusnya hanya berfungsi sebagai hiburan saja. Jajak pendapat melalui SMS itu tidak menggambarkan situasi pemilih yang sebenarnya. Dalam jajak pendapat dengan metodologi yang serius, misalnya, Hidayat Nur Wahid bahkan tidak termasuk sepuluh besar.

***

Segmen pemilih dengan SMS itu hanyalah populasi yang sangat, sangat, dan sangat kecil saja. Sengaja kata 'sangat' itu diulang berkali-kali karena karakter dari pemilih SMS itu yang sangat khusus.

Pemilik telepon di Indonesiasaja kurang dari 10% populasi negeri ini. Pemilik SMS juga tidak banyak, hampir sama sedikitnya dengan pemilik telepon. Di antara pemilik SMS, yang aktif dalam dunia politik dan peduli dengan partisipasi politik juga sekitar 15-20%. Persentase aktvis itu didapatkan melalui survei LSI yang menanyakan tingkat partisipasi publik. Di antara yang peduli politik, yang bersedia dimobilisasi dan aktif untuk program SMS mungkin tinggal separuhnya.

Jika ditotalkan, yang peduli politik dan memiliki SMS itu hanya 20% dikali 10%. Atau total populasinya hanya 2% itu, yang bersedia memobilisasi dan dimobilisasi hanya separuhnya. Dengan kata lain, realitas pemilih SMS di SCTV itu paling banyak hanya wakil dari 1% saja dari keseluruhan pemilih Indonesia di tahun 2004 kelak. Dengan kata lain, sekitar 99% pemilih Indonesia tidak terwakili dalam jajak pendapat SMS itu.

Wajar saja jika Hidayat Nur Wahid memperoleh persentase yang tinggi. Segmen pemilih dengan karakter pemakai SMS yang aktivis dan berpartisipasi politik memang banyak dari kalangan kampus, terpelajar, dan anak muda kota. Dalam segmen ini memang sejak dulu diketahui berada dalam dominasi jaringan Partai Keadilan (PK), atau sekarang PKS.

Metodologi SMS ini sangat berbeda dengan jajak pendapat wawancara tatap muka seperti yang dilakukan LSI (Lembaga Survei Indonesia), IFES, ataupun IRI. Walau sample ketiga lembaga ini jauh lebih kecil, sekitar 1.000 hingga 3.000 responden, sample ini mewakili keseluruhan populasi Indonesia. Sample itu diambil dengan metodologi yang ketat. Setiap warga negara dewasa, memiliki peluang dipilih yang sama, tidak peduli apakah ia punya handphone atau tidak, di desa atau di kota, kaya atau miskin, berpendidikan ataupun tidak.

Hasil survey LSI, IRI, dan IFES bahkan tidak pernah menghasilkan perolehan suara Hidayat Nur Wahid, bahkan untuk masuk sepuluh besar sekalipun. Tokoh yang bermoral dan tokoh yang popular adalah dua hal yang berbeda. Hidayat Nur Wahid selama ini memang dikenal sebagai tokoh dengan komitmen moral yang tinggi. Namun, ia belum termasuk tokoh popular. Public pemilih Indonesia yang berjumlah 145 juta itu belum banyak yang mengenal namanya.

Hasil jajak pendapat melalui SMS dengan sendirinya menjadi sangat berbeda dengan jajak pendapat sungguhan, yang menggunakan metodologi standar wawancara tatap muka. Jajak pendapat melalui SMS dan dimobilisasi hanya mewakili sekitar 1% dari populasi yang sebenarnya. Sementara jajak pendapat sungguhan mewakili 100% populasi yang sebenarnya.

***

Yang menjadi aneh, mengapa TV sekaliber SCTV mengambil program jajak pendapat melalui SMS itu? Bahkan TV lain, seperti TV7 dan juga Koran mulai bergairah untuk melakukan jajak pendapat melalui SMS yang sama.

Tentu banyak kemungkinannya. Pertama, mungkin ini hanya dianggap program intermezzo saja, sekedar hiburan. Mungkin para editor media itu tidak menyadari, atau tidak peduli bahwa hiburan itu dapat mempengaruhi opini public dan memberikan gambaran kenyataan yang salah.

Kedua, mungkin pula program secara bisnis memang menguntungkan. Bayangkan jika sekitar sejuta public berpartisipasi dengan membayar seribu rupiah per SMS, akan dikumpulkan dana semiliar rupiah secara mudah.

Di Amerika Serikat sekalipun, jajak pendapat melalui SMS dan internet juga dilakukan. Di AS, bahkan pemakai internet dan SMS, ditambah dengan pemilik telepon melampaui 90% dari keseluruhan populasi. Namun, karena tanggung jawab sosialnya, CNN atau Time yang melakukan jajak pendapat melalui internet, misalnya, memberikan keterangan. Secara eksplisit dan mencolok mata, di bawah jajak pendapat internet diberikan informasi bahwa jajak pendapat ini tidak ilmiah dan hanya untuk hiburan belaka. Publik yang tidak paham dunia jajak pendapat sangat terbantu dengan keterangan tambahan itu. Publik hanya akan membaca hasil jajak pendapat melalui internet atau SMS sebatas hiburan saja.

Semakin berpengaruh sebuah media, semakin besar pula tanggung jawab media untuk tidak memberikan opini yang menyesatkan. Apalagi terhadap public Indonesia yang mayoritasnya belum dapat membedakan mana jajak pendapat sungguhan, mana yang hiburan belaka. Untungnya Hidayat Nur Wahid cukup paham hal ini, tidak gede rasa, dan biasa-biasa saja menjadi presiden Indonesia favorit, versi SMS. *

Kampanye Melawan Politisi Hitam

PARA seniman banyak pula yang mulai turun gunung. Franky Sahilatua tidak lagi hanya bernyanyi soal keindahan alam atau gadis desa memetik teh di kebun. Ia juga mengubah lagu rakyat yang sangat popular di Amerika Serikat tentang penambang emas, She' ll coming around the mountain. Ia gubah lagu ini menjadi seruan perjuangan untuk tidak memilih politisi hitam. Dengarlah syairnya:

Jangan-jangan pilih mereka
Berpolitik untuk korupsi
Jangan-jangan pilih mereka
Berpolitik menipu rakyat

Jangan-jangan pilih mereka
Yang merampok uang negara
Jangan-jangan pilih mereka
Yang membuat rakyat sengsara

Ambil saja uang mereka
Tapi jangan pilih mereka
Ambil saja uang mereka
Tapi jangan pilih mereka

Menurut Franky. Lirik ini tengah diterjemahkan ke dalam dua belas bahasa daerah. Nada lagu ini juga sudah dikenal luas. Berbagai daerah sudah mengadaptasinya. Di jawa, misalnya, nada lagu dari Amerika Serikat itu diadaptasi menjadi Cucak Rowo. " agar tidak kering," ujar Franky, ia mengemas gerakan anti politisi hitam itu secara kultural dalam lagu. Sebagai seniman, ia ingin ikut memberikan ruh kepada kampanye untuk tidak kembali memilih politisi hitam dalam pemilu 2004.

***

Mungkin kita akan melihat realitas politik yang sangat berbeda di pemilu 2004 kelak. Tidak hanya lapangan dan stadion olah raga yang penuh oleh massa partai yang berkampanye. Pengadilan pun mungkin ikut penuh. Para politisi yang didaftarkan sebagai politisi hitam akan membawa aneka tokoh, aktivis, dan seniman ke meja hijau. Tentu saja, politisi itu menolak dimasukan ke dalam daftar politisi hitam dan menggugat balik.

Aktivis LSM dan seniman terus membagikan poster dan fliers. Mereka mungkin menempelkan lis negative para politisi hitam di pohon-pohon, di tembok, dan di tempat umum. Dalam poster itu, mungkin dipasang foto dan nama politisi hitam berikut daftar kesalahan mereka. Tidak lupa ada pesan yang sangat kuat dalam poster itu agar tidak memilih para politisi hitam.

Apa kriteria politisi hitam? Ini juga menjadi perdebatan yang hangat bahkan di kalangan aktivis LSM yang ingin menghadangnya. Sebagian ingin definisi yang minimal, aman dan terukur saja.

Misalnya, politisi hitam cukup untuk mereka yang punya kasus korupsi dan sedang di proses di pengadilan. Tak penting apakah keputusan pengadilan itu sudah final atau belum, namun itu sudah menjadi bukti hitam dan putih bahwa sang politisi dituduh tersangkut membobolkan uang negara.

Yang lain ingin kriteria politisi hitam diperluas. Termasuk didalamnya adalah kriteria pelanggaran HAM. Aktivis yang lain, ingin pula memasukan " ideologi" LSM-nya dalam daftar kriteria politisi hitam. Yang bergerak di lingkungan hidup, ingin perusak lingkungan hidup dimasukan pula dalam daftar.

Yang aktif di isu politik perempuan, ingin agar politisi hitam itu juga mencakup para politisi yang anti kesamaan gender, apalagi yang melakukan kejahatan gender. Yang kecewa dengan kinerja parlemen, bahkan ingin pula agar absensi di parlemen menjadi criteria politisi hitam. Mereka tidak disiplin dan malas menjalankan tugasnya sambil terus saja mengambil gajinya. Bukankah ini juga pemborosan dan " perampokan uang negara?"

Mungkin tidak semua data yang dikeluarkan oleh koalisi LSM itu valid. Ada data dan informasi yang mungkin masih abu-abu dipandang dari kacamata hukum murni. Area ini yang akan menjadi bahan gugagatn balik politisi hitam. Tak ketinggalan, melalui aneka sumberdayanya, para politisi hitam akan memobilisasi perlawanan, dan gantian membuat aktivis LSM menjadi tertuduh.

Gugatan balik ke pengadilan hanya salah satu cara. Pilihan lain, politisi hitam itu ikut pula membuat list dan daftar aktivis LSM yang hitam. Mereka juga mengklaim betapa banyak LSM dan tokohnya yang bermain api dengan uang dan donor internasional. Pemilu 2004 diramaikan bukan saja oleh persaingan antar politisi. Tidak kalah seru, terjadi pula perkelahian antara "politisi hitam" melawan LSM yang juga hitam."

***

Berdasarkan survey yang dibuat LSI, musuh terbesar dari kampanye anti politisi hitam justru bukan politisi hitam itu sendiri. Musuh ter besarnya adalah dukungan public luas. LSI menemukan data bahwa public pemilih Indonesia sudah sangat terlilit oleh persoalan ekonomi. Isu yang terpenting bagi mereka, bukan lagi isu korupsi atau politisi hitam. Isu yang terpenting adalah pemulihan ekonomi.

Hanya 5% dari pemilih yang menyatakan isu korupsi sebagai prioritas. Hanya 5% pula yang menyatakan penegakan hukum sebagai agenda utama. Sekitar 70% pemilih menyatakan kesulitan mencari kerja dan mahalnya harga sembako sebagai prioritas utama.

Dengan kesadaran seperti ini, pemilih sangat mudah termanipulasi oleh janji politisi. Sepanjang sang politisi pandai mengemas isu pemulihan ekonomi, apalagi jika ada hadiah jangka pendek dari sang politisi, pemilih bisa saja tergiur. Mereka tidak peduli bahwa sang politisi itu adalah politisi hitam versi aktivis LSM. Akibatnya, pemilu 2004 menjadi momentum untuk memapankan kembali politisi hitam dan praktek politik hitam.

Survei LSI dilaksanakan secara nasional di semua provinsi. Sekitar 2000 responden dipilih secara acak di sekitar 370 desa dan kota secara random. Semua kategori pemilih Indonesia secara proporsional terwakili dalam responden itu, baik kaya ataupun miskin, pemilik telepon ataupun bukan, pendidikan tinggi ataupun rendah, di pusat kota ataupun di balik gunung dan sungai. Justru karena metodologi survey yang sangat ketat, kita khawatir dengan kesadaran pemilih yang agak mengabaikan isu korupsi itu.

Agar kampanye Franky Sahilatua berhasil memang dibutuhkan pendidikan pemilih. Agar gerakan koalisi LSM untuk menghadang

politisi hitam memenuhi sasaran, kesadaran pemilih harus diubah terlebih dahulu.

Pendidikan pemilih mesti dilakukan secara luas tidak hanya menyangkut teknis pencoblosan. Yang jauh lebih penting adalah menyadarkan bahwa justru untuk memulihkan ekonomi, korupsi harus diberantas. Justru untuk membrantas korupsi, politisi hitam mesti dihadang. *

Menjadi Presiden Melalui SMS

Di tahun 2004 nanti kita mungkin punya dua presiden. Presiden pertama dipilih melalui pemilu yang langsung ditentukan sendiri oleh 145 juta rakyat yang berhak. Presiden kedua adalah versi SMS yang dihasilkan oleh berbagai polling TV dan koran. Hasil Pemilu 2004 dan hasil SMS bahkan mungkin tidak masuk dalam sepuluh besar presiden pilihan Pemilu 2004 yang sebenarnya.

Demikianlah sedang ngetrend jajak pendapat presiden melalui SMS. Tidak hanya TV swasta, kini Koran cetak dan Koran elektronik ikut pula meramaikan jajak pendapat SMS itu. Saya sendiri sudah membuat kritik yang keras atas metodologi jajak pendapat melalui SMS itu, dengan judul " Hidayat Nur Wahid, Presiden SMS" (Media Indonesia, 22 Desember 2003). Kolom itu bergulir menjadi debat hangat di berbagai mailing list, seperti Komunitas Pantau, Jaringan Islam Liberal dan Sabili.

Sudah ada TV yang memperbaiki kemasannya. Di akhir acara, disampaikan komentar bahwa jajak pendapat melalui SMS ini tidak dapat digeneralisasi, karena ia hanya mewakili pemilik handphone. Itupun tidak mewakili semua pemilik handphone yang dipilih secara random, tetapi yang aktif berpartisipasi saja atau yang bersedia dimobilisasi. Dihitung secara kasar, jajak pendapat via SMS itu paling banyak hanya mewakili 1% dari keseluruhan populasi pemilih. Sebanyak 99% lainnya sama sekali tidak terwakili.

Namun masih banyak pula media yang tampaknya tidak peduli. Hasil polling via SMS itu ditampilkan apa adanya, tanpa informasi tambahan sebagai panduan pemirsa atau pembaca. Editor TV atau koran itu seolah tidak peduli bahwa begitu banyak publik Indonesia yang belum paham metodologi jajak pendapat. Tanpa keterangan tambahan, media itu dapat memberikan opini dan realitas yang keliru.

***

Sebuah negara demokrasi yang kuat tidak hanya memerlukan partai politik yang kuat. Demokrasi juga membutuhkan lembaga jajak pendapat yang kredibel, dengan metodologi yang valid. Jajak pendapat yang serius itu- bukan melalui SMS atau telepon- dapat membantu pengambil kebijakan mengetahui opini publik secara makro dan berkala.

Dalam pemilu presiden di Amerika Serikat tahum 1996, Bob Dole, calon presiden dari Partai Republik tidak dikalahkan oleh Bill Clinton dari Partai Demokrat. Yang mengalahkan Bob Dole adalah team jajak pendapat.

Demikian seloroh soal pentingnya jajak pendapat dalam pertarungan pemilihan presiden di AS. Dua tahun setelah terpilih di tahun 1992, Bill Clinton saat itu berada dalam puncak

ketidakpopulerannya. Lalu ia kemudian mencari bantuan kepada Dick Morris, seorang penasihat politik kelas satu di AS.

Langkah pertama yang dilakukan Dick Morris adalah membuat jajak pendapat. Ia ingin tahu bagaimana sebenarnya public menilai Clinton. Ia juga mencari tahu, program, isu, harapan, ketakutan dan citra yang diinginkan oleh mayoritas pemilih. Hasil jajak pendapat itu ia gunakan untuk mengubah Clinton. Maka tahun 1996, Clinton muncul sebagai sosok baru, dengan program baru. Dengan mudah Clinton akhirnya terpilih kembali.

Jika dilakukan dengan metodologi yang benar, jajak pendapat memang dapat menggambarkan realitas. Lebih dari itu, bahkan ia dapat meramalkan hasil pemilu. Demikianlah yang terjadi di AS. Gallup Poll, hanya dengan responden berjumlah 1.200 orang saja, dapat meramalkan siapa presiden AS berikutnya. Sejak Perang Dunia Kedua, ramalan Gallup Poll benar dan terpercaya.

Jajak pendapat merupakan salah satu penemuan terpenting di dunia kebijakan publik. Penemuan jajak pendapat dalam kebijakan publik sama pentingnya dengan penemuan penisilin dalam ilmu kedokteran, atau penemuan roda dalam dunia otomotif. Melalui jajak pendapat, hanya dengan menggunakan seribu atau dua ribu responden, kita dapat mengetahui persepsi, aspirasi, harapan atau ketakutan dua ratus juta penduduk satu negara.

Hal ini dapat dianalogikan dengan satu kuali besar sup ayam. Dengan hanya mencicipi satu sendok sup itu, kita sudah dapat tahu rasa dari keseluruhan satu kuali sup ayam. Tentu saja analogi itu hanya tepat, jika pengambilan responden dan keseluruhan jajak pendapat itu mengikuti metodologi yang benar dan ketat.

Ilmu statistik sudah menyumbangkan sejenis revolusi dalam kebijakan publik. Akibatnya, begitu mudah kita mengetahui apa

kehendak mayoritas masyarakat. Agar tidak ada jarak lebar antara kebijakan publik dengan opini publik, antara politik elit dengan politik yang tumbuh di masyarakat, jajak pendapat menjadi mediumnya.

AS diuntungkan oleh kesejahteraan mayoritas rakyatnya. Lebih dari 90% populasi di AS sudah memiliki telepon. Gallup Poll sangat mudah sekali merekam opini public hanya melalui telepon. Bahkan sebulan sebelum pemilu presiden, Gallup Poll dapat melakukan jajak pendapat setiap hari secara nasional, hanya dengan mengajukan satu pertanyaan saja. Biayanya relatif murah. Pelaksanaan surveinya relatif mudah.

Namun Dunia Ketiga seperti Indonesia punya problem yang berbeda. Rumah tangga pemilik telepon tidak lebih dari 10% populasi. Jika kita mentah-mentah mengikuti Gallup Poll, hanya menggunakan telepon, 90% populasi tidak terwakili. Sudah dapat dipastikan, untuk jajak pendapat mengenai pemilu hasilnya pasti menyesatkan. Yang terambil bukan suara populasi, tetapi hanya suara kelas menengah perkotaan.

Untuk Dunia Ketiga, ada contoh lembaga jajak pendapat yang baik. Di Filipina, SWS (Social Weather Station) memiliki reputasi internasional. Karena jumlah pemilik telepon di Filipina sama sedikitnya dengan Indonesia, metode jajak pendapat yang dikembangkan oleh SWS adalah wawancara tatap muka ke seluruh wilayah negeri. Biaya survey pun menjadi sangat mahal.

***

Mungkin masih sulit bagi kita untuk memberikan penilaian mana lembaga jajak pendapat yang baik di Indonesia. Namun sangat mudah untuk menentukan mana jajak pendapat yang buruk, jika ia bermaksud mengukur popularitas calon presiden atau partai. Beberapa kriteria di bawah ini dapat dijadikan sejenis tips.

Jika jajak pendapat itu dilakukan melalui SMS dan telepon, hasilnya lebih baik dilihat sambil tersenyum. Hasilnya sudah pasti salah dan berbeda dengan suara pemilih nasional dalam Pemilu 2004 nanti.

Suara mayoritas massa yang tidak punya handphone dan telepon sangat mungkin berbeda dengan suara segelintir kelas menengah yang memiliki telepon. Lembaga yang menggunakan telepon untuk mengukur hasil pemilu adalah lembaga yang ingin mudah saja, dengan membayar harga yang murah. Namun tanpa disadari lembaga itu sudah menyesatkan opini public.

Seandainya pun jajak pendapat itu dengan wawancara tatap muka, tetapi dilakukan hanya terbatas pada 4 kota, atau 10 kota, atau 15 kota, hasilnya juga selayaknya dibaca juga dengan tersenyum. Mayoritas populasi Indonesia justru tinggal di kota. Perilaku pemilu di desa sangat mungkin berbeda dengan yang tinggal di kota. Mereka yang populer di kota bisa jadi sama sekali tidak dikenal di desa.

Jika survei dilakukan secara nasional dengan wawancara tatap muka, perlu juga diperiksa karakteristik respondennya. Penting untuk diketahui apakah ada karakteristik responden yang berbeda mencolok dengan karakteristik populasi. Misalnya, mereka yang berpendidikan menengah ke atas di sampel itu terlalu banyak dibandingkan persentase populasi. Sekali lagi hasilnya dapat menyesatkan.

Akhir kata, aneka TV dan koran tentu saja punya kebebasan untuk melakukan jajak pendapat dengan model SMS, sebuah model terburuk yang bisa dilakukan di zaman modern. Mereka bisa saja tidak peduli bahwa hasil dari SMS itu dapat mengelabui realitas yang sebenarnya. Mereka boleh saja tidak peduli publik mendapatkan informasi yang salah. Namun media yang baik semestinya memberikan keterangan

bahwa jajak pendapat melalui SMS ini hanya untuk hiburan saja, for entertainment only. *

PREDIKSI 2004

Potret Buram Pemilih

DI foto ini, berbagai tokoh masyarakat sedang bernyanyi. Mereka mengikuti irama nada Franky Sahilatua. Penyanyi lagu country ini kini acap menyanyikan lagu " kebangsaan" Gerakan Antipolitisi Busuk, " Jangan Pilih Mereka." Tampak Nurcholis Madjid, Faisal Basri, dan Teten Masduki. Mereka terus menumbuhkan kesadaran kepada pemilih agar jangan lagi memilih politisi busuk.

Suatu ketika mereka datang sedang berkampanye di Jakarta. Saat lain, mereka ke daerah ikut menumbuhkan dan meluaskan kampanye anti politisi busuk. Bahkan kampanye itu sudah meluas pula menjadi anti partai yang busuk. Jika partai besar banyak meletakkan politisi busuk di nomor jadi, maka partai itupun dibaiat menjadi partai busuk.

Tokoh garis keras gerakan ini berharap banyak pada pemilu 2004. Masa transisi yang panjang diharapkan berakhir dengan datangnya pemilu 2004. Lima tahun reformasi selama ini tidak memberikan hasil seperti yang diminta. Praktek politik busuk jauh lebih meluas dan liar justru setelah reformasi.

Secara normal, pemilu memang menjadi hari pengadilan bagi para politisi yang berprilaku busuk. Para teoretisi demokrasi, mulai dari Karl Popper sampai dengan Robert Dahl, memberi arti yang sangat penting kepada pemilu sebagai momentum untuk menyegarkan pemerintahan.

Hari pemilu menjadi mekanisme yang sangat aman, berguna dan damai untuk menyegarkan pemerintahan? Akankah terpilih tokoh dan partai yang lebih bersih dan kompeten? Ataukah pemilu 2004 justru akan memapankan kembali para politisi dan partai yang busuk?

***

Itu sangat tergantung pada 145 juta pemilih Indonesia yang akan berperan selaku hakim. Namun, menghadapi pemilu 2004, pemilih kita tidak dapat menjadi hakim yang baik. Jika tidak ada peubahan kesadaran yang berarti, pengadilan yang mereka lakukan tidak berujung kepada hukuman yang setimpal atas partai dan tokoh yang buruk. Potret buram pemilih kita membuat pemilu 2004 hanya menjadi ritual politik yang mahal, tetapi tanpa kemampuan menyegarkan pemerintahan.

Demikianlah salah satu hasil dari temuan survei LSI. Dua data survei LSI menunjang temuan ini. Survei pertama di 220 desa dan kota di semua propinsi kecuali Aceh, pada bulan Agustus 2003. Survei kedua dilaksanakan bulan November 2003, di 370 desa dan kota seluruh propinsi kecuali Aceh.

Metodologi yang digunakan di kedua survei itu adalah wawancara tatap muka dengan model multistage random sampling. Responden awal berjumlah sekitar 2200. Berdasarkan karakter demografisnya, sampel yang didapatkan LSI sangat proporsional dengan data populasi BPS 2000, dilihat dari prosentase di bidang pendidikan,

penghasilan, komposisi desa-kota, agama, dan sejumlah variabel lain. Melalui proporsionalitas itu dapat diklaim bahwa sample LSI merepresentasikan pemilih Indonesia pada pemilu 2004.

***

Beberapa potret buram pemilih menjelang pemilu 2004 dapat diidentifikasi. Pertama, pengetahuan pemilih mengenai pemilu tidak memadai. Banyak pemilih kita yang tidak tahu apa itu DPD atau KPU. Tidak sedikit pula mereka yang tidak menyadari bahwa presiden dipilih langsung. Dalam pemilu sekarang kita juga memilih DPR, DPRD, dan DPD. Jika terhadap lembaga yang dipilih saja mereka tidak tahu, tidak dapat pula diharapkan mereka mengetahui, apalagi menguji calon pemimpin yang akan mempengaruhi bulat lonjongnya negeri ini.

Kedua, mayoritas mereka juga apatis dan tidak yakin dapat mempengaruhi pemerintah. Kurang dari 20% pemilih yang meyakini bahwa ia dan orang lain sepertinya mampu mempengaruhi pemerintah. Dengan besarnya jumlah apatisme itu, mayoritas pemilih merasa terasing dengan persoalan yang melingkupinya. Karena apatis, merekapun tidak berupaya menjadikan pemilu sebagai hari pengadilan untuk memperoleh pemerintah yang lebih mampu.

Ketiga, pemilih cenderung memilih karena kewajiban dan hak, bukan untuk mencari pemimpin yang lebih baik atau keadaan yang lebih baik. Dari data LSI, tampak sekali bahwa meraka memilih dalam pemilu seperti melakukan ritual wajib saja (46,5%). Sedikit sekali yang menyadari bahwa pemilu dapat digunakan untuk memperjuangkan hidup agar lebih baik.

Keempat, pemilih cenderung mengharapkan hasil yang segera dan memberikan penilaian jangka pendek. Mayoritas pemilih tidak sabar dengan perubahan yang dibawa politik reformasi lima tahun

terakhir. Tidak heran, mayoritas pemilih sekarang (sekitar 60%) menganggap Orde Baru lebih baik ketimbang system sekarang. Tokoh dari masa silam, yang pandai memanfaatkan sentiment public yang sedang mengalami nostalgia politik ini, niscaya berpeluang kembali memenangkan pentas politik nasional. Indonesia akibatnya dapat kembali berjalan ke belakang, buka ke depan.

Kelima, tujuh tahun dalam kesulitan ekonomi membuat mayoritas pemilih tidak terlalu peduli dengan isu yang tidak berhubungan langsung dengan kesulitannya saat ini. Bagi mereka (70%) yang penting harga sembako murah dan tidak sulit mencari kerja. Berbagai isu yang penting untuk fondasi negara modern, seperti pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum hanya dianggap prioritas oleh sekitar masing-masing 5% saja.

***

Mengapa lima tahun reformasi justru menghasilkan potret buram pemilih? Ini gabungan dari banyak kegagalan. Mulai dari kegagalan pemerintah memenuhi janji reformasi, kegagalan komunikasi politik menjelaskan kesulitan yang ada, sampai kepada kegagalan partai untuk melakukan pendidikan politik. Akibatnya pemilih memasuki pemilu 2004 tidak dengan kesiapan para hakim yang baik di hari pengadilan.

Civil Society seperti NU dan Muhammadiyah dapat berperan besar mempengaruhi pemilih untuk lebih kritis dalam pemilu 2004. Sebanyak sekitar 35% dari pemilih mengidentifikasi diri dengan NU, dan sekitar 6% ke Muhammadiyah. Gabungan dua organisasi Islam ini saja sudah dapat merangkum hampir separuh dari total pemilih.

Jalan sangat terbuka bagi NU dan Muhammadiyah untuk ikut menjadikan pemilu 2004 sebagai momentum menyegarkan pemerintahan. Mobilisasi tokoh berpengaruh di NU dan Muhammadiyah terhadap kesadaran pemilih dapat membuat

pemilih berperan sebagai hakim yang lebih kritis bagi partai politik dan calon presiden 2004. Jika tidak, apa daya mungkin sekali kita kecewa dengan hasil pemilu 2004. *

Menghitung Peluang SBY

BERITA dikucilkannya SBY mulai meredup. Pihak SBY dan kelompok politik seputar Presiden Megawati, agaknya memilih cooling down. Pandangan yang tidak ingin memihak dalam kontroversi itu melihat persoalan tersebut hanya bagian dari komplikasi "cabinet pelangi." Istilah ini merujuk kepada konstruksi cabinet Megawati yang terdiri atas berbagai warna kekuatan politik, seperti pelangi.

Pemerintahan eksekutif setelah reformasi memang agak unik. Akibat tarik-menarik politik di MPR setelah reformasi, terjadi kumpul kebo dalam politik Indonesia. Dalam istilah yang lebih keren, terjadi unholy marriage antara berbagai kekuatan politik yang belum tentu punya platform yang sama.

Presiden seorang perempuan, berasal dari PDIP, partai yang anti-Piagam Jakarta. Wakil presiden datang dari PPP yang pernah memperjuangkan Piagam Jakarta dan pernah mengucapkan anti presiden perempuan. Sementara itu, cabinet berasal dari warna

warni pelangi politik, mulai Golkar, PAN, PPP, PKB (versi Matori), PBB dan beberapa purnawirawan.

Sudah patut diduga, menjelang pemilu, konstruksi cabinet pelangi itu akan bermasalah. Banyak tokoh di cabinet, apalagi yang datang dari kekuatan politik di luar partai presiden, punya bakat dan kompetensi menjadi presiden. Akan datang suatu masa dimana loyalitas sang menteri diragukan. Di satu sisi, sang menteri adalah bawahan presiden. Di sisi lain, dia juga pesaing dan akan menjadi lawan politik presiden dalam pemilu presiden 2004.

Dari segi legal formal, tidak ada yang salah dari tindakan presiden mengucilkan menteri yang bakal menjadi saingannya. Kelemahan Megawati dalam kasus di atas hanyalah dalam komunikasi politik. Jika dia menjelaskan kebijakan itu kepada SBY jauh hari sebelumnya, tidak akan muncul kontroversi. Apalagi dia menjelaskan pengucilan itu kepada pers dan publik luas. Publik akan lebih mudah menerima kebijakan pengucilan itu.

Kelemahan Megawati itu justru sejak dulu menjadi bidang kekuatan SBY. Dalam kontroversi itu, SBY terkesan menjadi pihak yang teraniaya. Reaksi keras, bahkan sangat keras, dari kelompok politik presiden atas SBY bermunculan. Sekali lagi, SBY menunjukan kematangan dan kekuatannya dalam komunikasi politik. Di hadapan publik, SBY terkesan tetap tenang, moderat, tidak ingin berpolemik, dan berpikiran positif. Kontan saja, simpati public jatuh kepadanya. Hasilnya, setelah kontroversi di atas meredup, SBY justru bertambah popular.

***

Sungguhpun kontroversi pengucilan SBY mulai meredup, pertanyaan seputar SBY sebagai calon presiden semakin nyaring. Di kalangan pers, apalagi di kalangan banyak kekuatan politik, selalu ditanyakan, kapankah SBY mundur dari cabinet. Pertanyaan yang

DENNY J.A

lebih mendasar lagi, seberapa besar peluang SBY sebagai presiden keenam RI? Mampukah SBY mengalahkan Amien Rais dan Megawati?

Para pakar dapat saja berspekulasi tentang peluang politik SBY. Namun, sehebat-hebatnya pakar itu, jika dia hanya berspekulasi dari belakang meja, kemungkinan salahnya sangat besar. Jauh lebih kuat jika peluang itu dihitung berdasarkan analisis yang mendalam dari data penelitian. Tiga lembaga yang kredibel, LSI, IFES, IRI, secara reguler melakukan survei nasional dengan metode tatap muka. Tiga lembaga itu berujung pada data yang mirip.

Jika dimobilisasi oleh partai yang mengakar, peluang SBY sebagai presiden RI sangat besar. Data pertama dapat kita ambil dari IRI. Di antara semua calon presiden kuat yang ada-Megawati, Amien Rais, Gus Dur, Akbar Tandjung-memang SBY adalah tokoh yang paling kurang dikenal. Umumnya, tokoh-tokoh di atas sudah dikenal lebih dari 90% pemilih. Sementara SBY hanya dikenal kurang dari 70% pemilih.

IRI melakukan survei itu Desember 2003, di 23 provinsi, dan jumlah responden 2.540. Sungguhpun hanya di 23 provinsi, survey itu mewakili lebih dari 90% total populasi. Dengan metodologi yang sahih, jumlah sampel 2.540 itu, dengan margin error tertentu, mewakili total populasi pemilih.

Namun, tokoh yang dikenal belum tentu disukai. Banyak tokoh yang dikenal karena sifat baiknya. Banyak pula yang dikenal karena sifat buruknya. Pertanyaan selanjutnya dari survey adalah seberapa tokoh presiden itu disukai. Mustahil public memilih calon presiden yang tidak disukai.

Ketika kategori suka yang dielaborasi, SBY mengalahkan semua calon presiden lainnya. Calon presiden lain hanya disukai 50% responden. Dapat disimpulkan, dari mereka yang mengenal Megawati, Amien Rais, Gus Dur dan Akbar Tandjung hanya separo

(50%) yang menyukainya. Sebaliknya, dari keseluruhan responden yang mengenal SBY, sebanyak 95% menyukainya.

***

Data kedua yang dapat kita analisis berasal dari IFES. Survei IFES dilaksanakan di 32 provinsi dengan 1.250 responden, terakhir diambil Januari 2004. Mengenai presiden pilihan, ranking teratas adalah Megawati, kedua Amien Rais dan ketiga SBY. Selish Mega dan Amien serta selisih Amien dan SBY berada di bawah margin error. Dari kacamata metodologi, selisih itu bisa jadi tidak riil, tetapi akibat keterbatasan sampel saja.

Namun, hasil survei itu jangan dibaca telanjang. Harus pula dibaca potensi di balik data itu. SBY berada di ranking ketiga dalam kondisi dia belum dikenal oleh responden (pemilih) sebanyak Megawati dan Amien Rais. Jika SBY dikenal oleh responden yang sama banyaknya dengan mereka yang mengenal Megawati dan Amien Rais, sangat mungkin SBY mengalahkan mereka berdua dengan angka telak.

Data dari LSI, data ketiga, dapat diolah untuk simulasi itu. Dibuat analisis terbatas dari mereka yang mengenal Megawati dan SBY sekaligus. Jika kepada mereka ditanya, siapa yang akan dipilih sebagai presiden, pilihannya hanya dua, hasilnya justru terbalik. SBY mengalahkan Megawati di atas 10%.

Kesimpulannya, SBY dapat menjadi presiden keenam Indonesia hanya jika dia bisa dikenal pemilih sebanyak pemilih yang mengenal Megawati. Penyebab potensi itu cukup sederhana. Public yang mengenal SBY cenderung menyukai SBY. Tantangan terbesar dari SBY adalah bagaimana agar dia dikenal public sebanyak public yang mengenal Megawati. *

Peta Kekuatan Politik Pasca-Pemilu 2004

AKANKAH peta kekuatan politik berubah setelah pemilu legislatif 5 April 2004 hari ini? Politisi, akademisi, pengusaha, dan birokrat berkepentingan dengan pertanyaan itu dengan alasan yang berbeda. Politisi mempertanyakan sehubungan dengan porsi kekuasaan yang mungkin diperoleh kelompoknya. Akademisi lebih berkepentingan untuk memahami perilaku pemilih dalam hubungannya dengan persepsi atas partai politik. Pengusaha ingin tahu hal itu karena ingin mencari partner politik yang paling berkuasa. Sementara para birokrat sedang berpikir siapakah tuan mereka yang baru dalam pemerintahan nanti.

Pemilu 1999 memang berakhir dengan perubahan kekuatan politik. Untuk pertama kalinya saat itu, Golkar dikalahkan dalam pemilu. Pemain di parlemen juga berubah akibat pemilu. Sebelumnya hanya ada tiga pemain utama, Golkar, PPP dan PDI. Setelah Pemilu 1999, pemain di parlemen bertambah dengan pendatang baru PKB, PPP, PAN, dan PBB.

Dua lembaga survey nasional, LSI dan IFES baru saja melansir penelitian nasional. Dua lembaga ini sama sekali tidak berhubungan dan tidak pernah bersepakat untuk saling mencocokkan temuannya. Namun hasil temuan dua lembaga ini sangat mirip. Penyebabnya, dua lembaga ini mengembangkan metodologi penelitian yang sangat ketat karena harus mempertaruhkan kredibilitas nama lembaga.

Sebagaimana IFES, LSI melakukan survey di era kampanye, 18-22 Maret 2004. Sampel LSI lebih banyak dibandingkan IFES, sekitar 2.670 responden di 345 desa dan kota di seluruh provinsi. Wawancara dilakukan dengan tatap muka. Proporsi responden yang dijaring secara random dengan multistage random sampling, cukup menggambarkan karakteristik populasi.

Misalnya, sekitar 55% responden berasal dari pendidikan SD. Jumlah responden wanita sama dengan pria. Proporsi responden dilihat dari suku, penghasilan, agama, desa-kota dan level pendidikan menyerupai proporsi populasi Biro Pusat Statistik tahun 2000. Dengan margin of error sekitar 2%, responden dapat diklaim mewakili suara 147 juta pemilih.

***

Survey LSI menunjukan bahwa pemilu 2004 akan melahirkan peta kekuatan baru di parlemen. Berdasarkan perolehan suara, partai politik dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori. Pertama, partai politik papan atas. Klasifikasi ini untuk partai yang memperoleh suara di atas 15%. Kedua, partai politik papan tengah. Kategori ini untuk partai yang memperoleh suara antara 5% sampai 15%. Ketiga, adalah partai kecil. Klasifikasi ini untuk partai yang perolehannya di bawah 5%.

Hasil survei pemilu 2004 memperlihatkan temuan yang menarik. Untuk papan atas, partai di atas 15%, penghuninya tetap dua partai, Golkar dan PDIP. Di tahun 1999, partai papan atas juga hanya dihuni

oleh dua partai yang sama, Golkar dan PDIP. Hanya saja di tahun 2004, posisi mereka terbalik. Survei LSI dan juga IFES menunjukan Golkar mengungguli PDIP.

Perolehan Golkar tidak banyak berubah dengan perolehan di tahun 1999. Ditimbang dengan margin of error, LSI memprediksi perolehan Golkar tahun 2004, sekitar 21%-25%. PDIP sebagai pemenang pemilu 1999 tampak sangat merosot sekali. Di tahun 1999, partai ini memperoleh suara sekitar 32%. Kini di tahun 2004, LSI memprediksi perolehan suara partai ini sekitar 17%-22% saja. Kekecewaan publik kepada reformasi telah menjadi palu godam yang menghukum PDIP.

Di papan tengah, pemilu 2004 menghasilkan pemain baru. Di tahun 1999, partai yang masuk papan tengah, antara 5%-15% hanya PKB, PPP, dan PAN. Kini melalui pemilu 2004, ketiga partai itu tetap berada dalam papan tengah. Perbedaannya, sekarang masuk dua pemain baru, PKS dan Partai Demokrat. Dua partai baru ini menjadi the rising star dengan alasan yang berbeda.

Partai Demokrat datang dengan momentum yang sangat tepat. SBY menjadi tokoh baru yang semakin popular. Persepsi public bahwa ia menjadi korban dari Megawati telah mendongkrak popularitasnya. SBY berhasil mengangkat citra Partai Demokrat. Sebagian besar pemilih Partai Demokrat adalah simpatisan SBY.

Sementara PKS menjadi popular untuk alasan lain. PKS tampil dengan kekuatan jaringan dan Islam yang lebih ramah, lebih peduli dengan keadilan sosial dan pemerintahan yang bersih. Berbeda dengan PBB, PKS tdak pernah bermain dengan slogan ingin menegakkan Piagam Jakarta atau syariah Islam di dunia public. Pendekatan baru PKS ini justru terasa lebih pas.

Partai kecil juga punya penghuni baru. PBB yang lolos threshold di tahun 1999, kini berada dalam kesulitan. Survey LSI menunjukkan

bahwa perolehan suara PBB tidak meningkat. Bahkan partai ini terancam tidak lolos threshold. PKPB, partainya Mbak Tutut dan Hartono tidak sepopuler yang diduga. Partai ini tidak masuk papan tengah. Bahkan partai ini juga dipastikan tidak bakal mampu untuk lolos threshold. Satu lagi pemain baru yang masuk dalam definisi partai kecil yang lumayan. PBR, partai pimpinan Zaenuddin MZ juga berada dalam posisi perolehan yang berimbang dengan PBB dan PKPB, di bawah 3% dan di atas 1%.

***

Apa yang dapat terbaca dari peta baru kakuatan politik di atas? Politik Indonesia pasca Pemilu 2004 semakin terfragmentasi. Di tahun 1999, partai yang memperoleh suara di atas 5% hanya lima partai: PDIP, Golkar, PPP, PKB, dan PAN. Kini di tahun 2004, dalam prediksi LSI, partai yang memperoleh suara di atas 5% sekitar 7 partai. Lima partai besar di tahun 1999 tetap di sana dan ditambah lagi oleh dua partai baru, PKS dan partai Demokrat.

Kita sebelumnya berharap, pemilu 2004 dapat melahirkan sistem kepartaian yang lebih sederhana. Jika tahun 1999 ada lima pemain, tahun 2004 seharusnya menyisakan empat partai saja atau bahkan tiga partai. Semakin sedikit jumlah partai, semakin baik dan semakin stabil politik di parlemen. Untuk memperoleh suara mayoritas parlemen, cukup dibutuhkan koalisi dua atau tiga partai saja.

Apa daya, lima tahun reformasi, tampaknya para pemimpin gagal menumbuhkan partai. PDIP adalah kasus gagal yang terburuk. Partai ini diharapkan mampu tumbuh semakin besar. Jika tahun 1999, partai ini memperoleh sekitar 32%, diharapkan di tahun 2004 partai ini mendapatkan tambahan menjadi 35% atau 40%. Yang terjadi justru sebaliknya, partai ini diprediksi menciut di bawah 25% saja.

PKB, PPP dan PAN juga tidak beranjak jauh. Hanya Golkar yang lebih lumayan. Akibatnya, suara yang hilang lari ke partai baru, PKS

dan Partai Demokrat. Dengan penghuni tujuh pemain papan tengah dan papan atas, dapat dipastikan politik di parlemen lebih labil. Untuk memperoleh suara 50% di parlemen, tidak cukup lagi hanya berasal dari koalisi dua partai.

Pemilu 2004 juga menghasilkan tokoh baru yang cukup populer. Untuk pertama kalinya survei LSI dan IFES menghasilkan popularitas tokoh yang mampu melampaui Megawati. Survei LSI sejak bukan Agustus dan November 2003 selalu menempatkan Megawati di urutan pertama. Survei IFES dari bulan Desember sampai Februari 2004 juga menempatkan Megawati di atas kandidat lain.

Kini setelah kampanye, baik IFES ataupun LSI menempatkan SBY di atas Megawati. LSI mengajukan banyak sekali format pertanyaan yang berbeda untuk mengukur popularitas tokoh. Calon presiden yang ada dihadap-hadapkan dengan jumlah capres yang berbeda. Ada format pertanyaan dengan 5 capres, 6 capres dan jumlah capres di atas 10.

Untuk semua jenis pertanyaan itu, SBY secara konsisten mengalahkan Megawati. Semakin sedikit jumlah capres yang ada, semakin besar selisih antara SBY dan Megawati. Bahkan ketika jumlah capres hanya lima tokoh saja: SBY, Megawati, Amien Rais, Akbar Tandjung, dan Siswono Yudohusodo, SBY mengalahkan Megawati dengan margin di atas 10%. Ini selisih terbesar yang pernah ada antara para calon presiden yang bersaing ketat.

Responden juga ditanya apakah mereka menginginkan atau tidak menginginkan Megawati menjadi presiden RI tahun 2004-2009. Jawabannya cukup mengejutkan. Sekitar 70% responden tidak lagi menginginkan Megawati sebagai presiden RI. Angka itu terlalu besar. Jika tidak ada perbaikan dari pihak Megawati, angka ini menunjukan bahwa Megawati akan dikalahkan di putaran kedua pemilihan presiden. SBY potensial menjadi presiden RI yang keenam.

Namun sekali lagi, opini publik adalah medan yang sangat dinamis. Pemilu presiden 5 Juli 2004 masih lama. Segalanya masih dapat berubah. Pihak Megawati dapat secara positif merespon hasil survei LSI dan IFES sebagai lampu peringatan. Jangan terlalu percaya diri. Segera lakukan perbaikan. Jika tidak, Pemilu 2004 akan berujung kepada terbentuknya pemerintahan baru. *

Jajak Pendapat untuk Capres

PEMILIHAN presiden kali ini semakin berwarna-warni karena juga diramaikan dengan aneka jajak pendapat. Mulai dari stasiun televisi, koran, internet sampai kepada berbagai lembaga penelitian mempublikasikan jajak pendapat secara reguler mengenai capres paling populer. Seberapa akurat prediksi berbagai jajak pendapat itu?

Dilihat dari metodologinya, jajak pendapat yang ada tampak beragam. Ada yang mengambil mudahnya saja. Cukup menyediakan nomor SMS untuk dihubungi dan responden dipersilakan aktif sendiri memilih capresnya. Ada pula yang sudah menyediakan format yang sudah rapi. Responden hanya diminta mengklik saja, seperti di internet.

Ada pula jajak pendapat yang menggunakan telepon. Namun, sebagaimana pemilik SMS, pemilik telepon juga hanya 10% dari populasi Indonesia. Hanya dengan menggunakan telepon, apalagi SMS, 90% populasi Indonesia tidak terwakili.

Di antara jajak pendapat, terdapat pula lembaga yang melakukan survei tatap muka. Yang paling rutin dan reguler melakukan survei adalah LSI dan IFES. Metodologi yang digunakan cukup ketat, dengan responden di seluruh provinsi di Indonesia, yang dipilih secara acak. Yang terwakili dalam jajak pendapat itu tidak hanya lapisan menengah ke atas, tetapi juga lapisan bawah yang tidak memilik telepon, dan tidak dapat mengirimkan SMS.

***

Hakim tertinggi bagi aneka jajak pendapat itu adalah hasil resmi pemilu versi KPU. Pemilu parlemen 5 April lalu dapat menjadi indicator jajak pendapat mana yang layak dipercaya, dan yang mana hanya menjadi hiburan lepas senja. Hasil resmi parlemen 5 April 2004 tidak hanya penting bagi partai politik. Bagi lembaga jajak pendapat, hasil resmi itu juga penting untuk melihat peringkat dan keabsahan metodologinya.

LSI menerbitkan sebuah buku kecil yang merekam aktivitas aneka jajak pendapat di Indonesia sejak tahun 1999 sampai 2004. Buku berjudul Jajak Pendapat dan Pemilu di Indonesia itu sangat penting sebagai dokumentasi public yang ingin belajar lebih jauh mengenai hal-ihwal jajak pendapat. Di negara demokrasi yang sudah maju, lembaga jajak pendapat adalah sokoguru demokrasi kelima, di samping eksekutif, legislative, yudikatif, dan pers.

Untuk kasus pemilu parlemen 5 April 2004, data rekaman itu dapat diungkap kembali. Polling SCTV, misalnya, menempatkan PKS sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara sekitar 45%. Kini kita tahu betapa salahnya SCTV. Perolehan PKS hanya sekitar 7 persen dan tidak masuk di lima besar sekalipun. Bahkan partai Golkar yang menang pemilu, tidak memperoleh 45%. Golkar hanya memperoleh separuhnya.

Saat ini SCTV kembali mengulangi jajak pendapat untuk paket presiden dan wakil presiden. Segera kita akan ketahui betapa sekali lagi SCTV akan mengalami kesalahan fatal dalam prediksinya.

Detik.Com melalui internet melakukan Polling bekerja sama dengan Media Indonesia. Yang menjadi pemenang dalam versi Detik. Com dalam pemilu parlemen 2004 adalah PPP, dengan perolehan suara di atas 20%. Kini kita tahu betapa salahnya Detik.Com itu. Sekali lagi Detik.Com membuat jajak pendapat melalui internet. Dan sekali lagi kita akan melihat betapa salahnya survei melalui internet tersebut.

Soegeng Sarjadi Syndicated (SSS) juga membuat prediksi yang sama sebelum pemilu. Menurut SSS, yang akan menjadi pemenang pemilu adalah PDIP. Perolehan PDIP jauh di atas Golkar. Kini juga kita tahu, betapa salahnya SSS. Hasil sebenarnya Golkar di atas PDIP. Kita tidak tahu, apakah SSS jera melakukan survei berikutnya. Seandainya tidak jera, SSS harus lebih hati-hati dalam aspek metodologi, agar tidak diklaim bermain-main saja dengan opini publik.

Dari data yang ada, lembaga yang berhasil memprediksi tiga pemenang teratas pemilu parlemen 2004, hanya LSI, IRI, dan IFES. Tiga lembaga itu jauh hari sebelum pemilu sudah menyatakan urutan pemenang pemilu parlemen berdasarkan perolehan suara (bukan kursi) adalah Golkar, PDIP dan PKB. LSI bahkan sudah memprediksi pula di tanggal 2 April 2004, bahwa PKS dan partai Demokrat akan masuk dalam jajaran partai tengah dengan perolehan kursi di atas 5%.

Diukur dari tingkat kesalahan, jajak pendapat SMS SCTV menderita tingkat kesalahan paling besar. Selisih rata-rata persentase perolehan suara partai yang diprediksi dengan prosentase suara partai yang riil milik SCTV sekitar 12%. Padahal, responden SCTV paling banyak, mendekati 200.000 orang.

Sementara tingkat kesalahan paling kecil adalah berturut-turut LSI, IRI dan IFES. Kesalahan rata-rata LSI untuk 7 partai pemenang pemilu sangat kecil, hanya 1,6%. Skor kesalahan itu bahkan di bawah error sampling sekitar 2-3%. Di tiga lembaga itu, jumlah respondennya 1200-2700 orang saja. Walau respondennya jauh lebih sedikit dibandingkan responden SMS SCTV, tetapi prediksinya jauh lebih akurat. Ini disebabkan oleh kekuatan metodologi.

Buku yang diterbitkan LSI itu menunjukan dengan data dan fakta yang teruji. Bahwa sejak pemilu 1999, prediksi LSI yang paling akurat dan presisi dibandingkan dengan semua prediksi pemilu yang pernah dibuat dalam sejarah Indonesia. Hal itu perlu diungkapkan lebih untuk menggambarkan betapa ilmu pengetahuan sosial sudah mampu memprediksi perilaku 147 juta pemilih beberapa minggu kemudian, hanya dengan sampel 2.000 responden.

Karena publik belum terbiasa dengan kultur jajak pendapat, justru LSI yang paling sering terkena tuduhan konspirasi. Di bulan September-November 2003, survei LSI memperlihatkan Megawati masih menjadi calon presiden paling populer. Segera LSI mendapat label sebagai antek Taufiq Kiemas. Rakyat Merdeka menjadikannya sebagai berita halaman pertama.

Ketika LSI memprediksi Golkar akan menjadi pemenang pemilu, tuduhan berganti. LSI dianggap menjadi kendaraan Golkar untuk menyiapkan psikologi public menerima kemenangan Golkar. Kini prediksi LSI terbukti, memang Golkar menang.

Ketika pada saat yang sama LSI mengumumkan bahwa isu syariat Islam tidak lagi populer di kalangan pemilih muslim religius sekalipun, tuduhan berbeda diterima LSI. Ahmad Sumargono dari PBB menyatakan klaim LSI bias karena pimpinannya menjadi caleg PDIP. Tuduhan pun berganti dari kendaraan Golkar menjadi kendaraan PDIP. Sekali lagi, prediksi LSI akurat. PBB yang memperjuangkan syariat Islam bahkan tidak lolos threshold.

Kini, sejak bulan Maret 2004, survei LSI menunjukan SBY sebagai capres paling populer. Tuduhan kembali berganti. LSI dianggap menjadi corong SBY. Tidak tanggung-tanggung, Harian Kompas membuat berita dengan judul "LSI Terus Kampanyekan Yudhoyono". Belakangan ini, harian Kompas juga melakukan jajak pendapat mengenai capres. Hasilnya tidak tanggung-tanggung, di harian Kompas, SBY juga paling favorit bahkan di atas angka 50%, lebih tinggi daripada yang dihasilkan LSI.

Sejak September 2003 sampai kini, LSI menerima tuduhan yang saling bertentangan satu sama lain. Mulai dari antek Taufiq Kiemas sampai kepada corong Yudhoyono. Padahal, semua tahu betapa Taufiq Kiemas dan Yudhoyono berada dalam posisi bersebrangan. LSI juga mendapatkan label mulai dari kendaraan Golkar sampai kepada tuduhan pimpinannya caleg PDIP. Padahal Golkar dan PDIP bersaing satu sama lain.

Teori konspirasi atas LSI semakin bingung lagi karena berita dari KPU bahwa LSI juga mengerjakan penelitian pihak Wiranto-Gus Solah di bulan Mei 2004. Bagaimana menjelaskan LSI yang dituduh antek Taufiq Kiemas, corong SBY kini berpindah menjadi agen Wiranto? Namun pada saat yang sama tidak dapat dibantah pula bahwa prediksi LSI yang paling tepat dan akurat.

***

Jajak pendapat adalah dunia yang baru di Indonesia. Karena tingginya persaingan presiden dan rendahnya tingkat kepercayaan public, kecurigaan kepada jajak pendapat mudah sekali timbul. Apalagi memang banyak jajak pendapat yang ngawur.

Public juga mungkin masih susah menerima jika ada lembaga jajak pendapat mengerjakan penelitian bagi partai tertentu. Dengan segera, lembaga itu dianggap partisan. Padahal di dunia

internasional, Gallup Poll di AS dan SWS di Filipina juga mengerjakan penelitian pesanan.

SWS bahkan juga mengerjakan penelitian pemerintah. Itu bagian dari dedicated survey yang memang lazim. NDI dan IRI yang juga aktif di Indonesia dan kualitasnya sangat terjaga, lebih jauh lagi adalah bagian dari partai politik di AS.

LSI juga mengerjakan survey pesanan partai Golkar, Metro TV dan lainnya. Namun survei pesanan itu milik klien secara eksklusif dan LSI tidak punya hak untuk mempublikasikannya. Semakin banyak partai dan lembaga mengetahui opini publik, semakin baik buat publik. Lembaga itu akan mendapatkan input bagaimana menyerap aspirasi publik.

Namun khusus untuk memprediksi hasil pemilu, baik SWS, Gallup Poll, dan juga LSI di Indonesia, tidak menerima dana partai atau capres dalam penelitiannya. Data itu sepenuhnya didedikasikan kepada publik. Datanya juga dapat diakses oleh publik untuk berbagai kepentingannya. Untuk kasus LSI, dana penelitian publik itu sepenuhnya sudah dijamin oleh JICA.

Demikianlah, jajak pendapat akan terus melahirkan kontroversi sampai publik terbiasa, dan dapat membedakan mana lembaga yang serius, dan mana yang hanya ingin main-main. *

Wiranto Versus Megawati

SECARA resmi, dalam pemilu presiden 5 Juli 2004, akan bertarung lima paket capres dan cawapres. Namun dalam politik yang riil, pemilu kali ini lebih merupakan ajang seleksi dan kompetisi dua paket saja, capres Wiranto versus capres Megawati. Hanya dua calon itu bersaing sangat ketat. Calon lainnya berada jauh di atas mereka, atau jauh di bawah mereka.

Demikianlah kesimpulan sementara yang dapat ditarik dari hasil dua lembaga survey paling kredibel yang mutakhir. LSI dan IFES. Pemilu parlemen 5 April 2004 menunjukkan, prediksi yang paling akurat adalah dari LSI dan IFES. Kini dua lembaga itu baru saja mempublikasikan hasil riset mereka yang mutakhir mengenai calon presiden bulan Mei dan JUni 2004.

Capres SBY di survei kedua lembaga itu berada diperingkat paling atas dengan dukungan di atas 40%. Bahkan survey LSI dan Metro TV yang paling mutakhir, akhir Mei 2004, dukungan buat

SBY mendekati angka 50%. Sementara di posisi kedua dan ketiga bertenger Wiranto dan Megawati dalam posisi dukungan sekitar 10-15%. Dua kandidat itu berada dalam posisi yang masih mampu untuk saling mengalahkan.

Capres Amien Rais kini kurang beruntung. Di kedua jajak pendapat itu, posisi Amien Rais berada pada posisi keempat, dengan dukungan di bawah 10% sementara posisi capres Hamza Haz makin kurang beruntung lagi di posisi buncit, dengan perolehan di bawah 7%.

Jika bernasib mujur, SBY dapat memenangkan pemilu presiden hanya satu putaran. SBY hanya perlu tambahan beberapa persen saja untuk memperoleh dukungan di atas 50%. Sementara dilihat dari distribusi dukungannya, posisi SBY merata hampir di semua provinsi. Syarat konstitusi bahwa capres harus menang minimal 20% di sekitar provinsi terpenuhi.

Namun jika tidak beruntung, SBY masih harus menghadapi putaran kedua. Di antara semua capres, SBY paling pasti masuk putaran kedua, dan memimpin peringkat sementara. Jika hanya terjadi gempa bumi politik, atau blunder besar dipihak SBY, atau peristiwa besar yang mengjungkirbalikan opini publik itu dapat membuat SBY tersingkir di putaran pertama pemilu presiden. Namun kemungkinan itu sangat kecil.

Pertanyaannya, jika ada putaran kedua pemilu presiden, siapa yang mendampingi SBY? Pilihan paling mungkin adalah capres Wiranto atau capres Megawati. Kampanye 1 Juni-5 Juli 2004 pada dasarnya adalah ajang perebutan posisi kedua antara Wiranto versus Megawati.

Jika ada tim pendukung yang perlu kerja keras dan tegang, itu adalah tim Wiranto dan tim Megawati, untuk saling mengalahkan guna berebut tiket menuju putaran kedua pemilu presiden.

***

Pertarungan Wiranto versus Megawati pada dasarnya adalah pertarungan abadi antara Golkar dan PDIP. Wiranto adalah calon presiden dari partai terbesar, Partai Golkar. Sementara Megawati adalah calon dari partai yang masih berkuasa, PDIP. Dalam sejarah pemilu, dua partai ini saling mengalahkan.

Di era Orde Baru, Partai Golkar menguasai panggung politik. Saat itu PDIP masih berada dalam rahim partai lain bernama PDI. Tidak ada satupun partai yang mampu berkompetisi dengan Golkar, baik di pemilu parlemen ataupun dalam pemilu presiden. Namun zaman Orde Baru tidak dapat sepenuhnya dianggap pemilu bebas. Jumlah partai dibatasi. Kebebasan politik juga sangat dikontrol.

Era reformasi datang di tahun 1999. Untuk pertama kalinya Golkar dikalahkan. Yang mengalahkannya adalah PDIP yang merupakan reinkarnasi dan pembesaran dari PDI. Tidak hanya dalam pemilu parlemen Partai Golkar dikalahkan. Dalam pemilu presiden, calon Golkar, Habibie, juga dipaksa mengundurkan diri. Pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR. Presiden pun berganti ke tokoh PKB, dan akhirnya ke tokoh PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Namun pemilu parlemen 2004, situasi berbalik. Kembali terjadi persaingan utama antara Golkar dan PDIP. Golkar kembali mengalahkan PDIP. Hanya lima tahun Golkar melepaskan supremasi politiknya di parlemen. Lima tahun kemudian, supremasi itu, atau posisi juara utama itu, direbutkan kembali.

Pertarungan Wiranto versus Megawati adalah pertarungan lama yang memang seru antara Partai Golkar dan PDIP. Jika asaat ini presiden masih dipilih oleh parlemen, capres dua partai itu pula yang pasti akan bersaing merebut posisi pertama. Namun karena presiden dipilih secara langsung, selalu mungkin muncul tokoh capres populer dari partai kecil.

Itu yang kini sedang terjadi. Posisi paling favorit saat ini diduduki oleh SBY dari partai yang kekuatannya di parlemen hanya nomor empat. Pertarungan Golkar versus PDIP tetap terjadi dalam pemilu presiden 2004. Namun persaingan itu untuk merebut hanya posisi kedua saja, mengambil tiket yang tersisa untuk maju dalam pemilu presiden babak berikutnya.

***

Pertarungan Wiranto versus Megawati juga paling terasa dalam merebut posisi pihak lain. Di luar PDIP dan Golkar, pihak ketiga yang paling berpengaruh untuk direbut adalah warga NU. Di antara semua ormas yang ada, warga NU paling banyak. Berdasarkan survei LSI, 35% dari seluruh pemilih mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari keluarga besar NU. Tak heran jika NU menjadi gerbong yang paling laris untuk dipengaruhi.

Persaingan Megawati dan Wiranto sangat kentara ketika mereka bersaing memperebutka n elit NU. Dua-duanya lama menunggu jawaban Hasyim Muzadi, Ketua Umum NU saat itu. Berbagai pertemuan kiai digelar untuk menentukan sikap. Hasyim Muzadi bahkan berkisah ia melakukan solat istikarah, mohon petunjuk Allah untuk bersikap. Situasi yang sangat jarang sekali, ia selaku ketua umum PBNU dilamar sebagai wakil presiden baik oleh Golkar (Wiranto) ataupun PDIP (Megawati).

Persaingan dua tokoh itu juga paling terasa dalam merebut restu Gus Dur. Suka atau tidak dengan kontroversi pandangan Gus Dur, ia tetap dianggap jimat bagi kalangan PKB dan sebagian NU. Megawati mencari jalan damai dengan Gus Dur melalui Hamengkubuwono X. Dirancang pertemuan di Yogyakarta walau gagal. Wiranto dan Akbar Tandjung juga sowan ke Gus Dur.

Akhir dari kompetisi Wiranto versus Megawati di kalangan NU sudah kita ketahui. Akhirnya Hasyim Muzadi memilih Megawati.

DENNY J.A

Namun Wiranto tetap tidak kehilangan akal. Ia berhasil mendekati Gus Solah, adik kandung Gus Dur. Sebagai konpensasinya, kini bahkan PKB secara resmi mendukung pasangan Wiranto-Gus Solah.

Tetapi persaingan Wiranto dan Megawati tidak berhenti di sana. Pertarungan opini di antara para kiai dan santri NU terus digalakkan. Politisasi agama akhirnya terjadi. Aneka fatwa haram dan murtad mewarnai pemilu presiden. Persaingan kubu Wiranto dan Megawati tidak lagi dapat dikontrol oleh pihak masing-masing dan mulai memasuki wilayah sakral.

Salah satu kiai pendukung kubu Hasyim membuat pernyataan yang keras sekali. Semua warga NU yang tidak memilih pasangan Megawati-Hasyim Muzadi, ujarnya, adalah murtad. Dalam agama Islam, istilah murtad itu hanya dikeluarkan untuk mereka yang keluar dari Islam. Kini mereka yang tidak memilih Megawati dan Hasyim Muzadi, oleh kiai itu disamakan dengan keluar dari Islam.

Tidak tanggung-tanggung, dari kubu Wiranto lahir pula serangan yang tidak kalah seramnya. Fatwa lama dipopulerkan kembali. Menurut salah seorang kiai kubu Wiranto-Gus Solah, haram hukumnya memilih pemimpin nasional berkelamin wanita. Pemimpin wanita hanya untuk situasi darurat saja.

Fatwa itu dengan segera mendapatkan dukungan dari kalangan Islam garis keras lain. Majelis Mujahidin Indonesia, melalui Fauzan Al-Anzori mengambil posisi yang sama seramnya. Dalam acara Election Watch Metro TV Kamis lalu, ia minta Megawati mengundurkan diri. Jika tetap mencalonkan, Megawati dianggap melanggar syariat Islam dan membuat bangsa Indonesia tertimpa bencana.

Pertarungan Wiranto dan Megawati juga memasuki pertarungan orde politik. Di berbagai kesempatan, Megawati menyatakan bahwa situasi terpuruk saat ini karena warisan Orde Baru. Iklan politik

Megawati sangat keras menyinggung soal Orde Baru itu. mudah sekali publik mengasosiasikan Orde Baru dengan Golkar dan Wiranto.

Sebaiknya, kubu Wiranto dan Golkar menunjukkan kegagalan era reformasi. Dalam salah satu iklan TV Wiranto , tergambar betapa pengangguran dan penggusuran sampai pada tingkat memperihatinkan. Lalu Wiranto bersumpah untuk menanganinya.

Sungguhpun dalam pemilu presiden kali ini yang bertarung adalah lima capres, namun pertarungan kali ini yang bertarung adalah lima capres, namun pertarungan paling seru dan paling menentukan terjadi antara Wiranto versus Megawati. Siapakah yang akhirnya mendapatkan tiket ke pemilu presiden babak selanjutnya di antara mereka berdua? *

Pemilu Capres Mengejutkan?

SEMUA capres mungkin terkejut dengan hasil pemilu presiden 5 Juli 2004. namun, tentu saja alasan mengapa mereka terkejut mungkin berbeda-beda. Respon mereka terhada hasil pemilu itu juga mungkin beragam.

Memang hasil akhir perhitungan suara versi KPU belum selesai. Mungkin masih butuh sepuluh sampai dua puluh hari lagi untuk membuat hasil resmi KPU itu final. Namun public sudah dapat membaca hasil akhir pemilu presiden melalui quick count yang dibuat oleh NDI dan LP3ES. Berdasarkan pengalaman pada pemilu parlemen 2004, quick count itu cukup akurat dan dapat dipertanggung- jawabkan.

SBY sudah menduga bahwa a akan memimpin pemilu presiden putaran pertama. Namun SBY mungkin terkejut melihat dukungannya melorot dari di atas 40% menjadi hanya 30%. Hamza Haz juga sudah menduga jika ia bakal menjadi nomor buncit. Tetapi mungkin ia tidak

menduga jika memperoleh dukungan hanya 3%. Jumlah ini bahkan jauh lebih kecil dari perolehan PPP dalam pemilu legislatif.

Amien Rais dan pendukungnya mungkin yang paling terkejut dengan hasil quick count. Ia dan timnya tampak begitu optimis. Grafik dan dukungan atasnya terus meningkat. Antusiasme publik luas pada Amien Rais juga semakin terasa. Ia ternyata tidak saja gagal masuk ke puataran kedua versi quick count. Ia bahkan terlempar hanya ke nomor ke empat, dengan jarak yang cukup besar dibandingkan capres di ranking ketiga.

Wiranto dan kelompoknya juga tidak kalah terkejut. Apa yang salah? Ia merasa mengendarai mesin politik yang paling besar, Partai Golkar. Lebih dari itu, PKB sudah pula resmi memberikan dukungan. Ditambah lagi, Gus Dur secara resmi meminta publik NU memilih Wiranto, walau Gus Dur sendiri memilih Golput. Wiranto bukan saja gagal menjadi nomor satu versi Quick Count. Sangat mungkin ia tersingkir di putaran pertama pemilu presiden.

Megawati dan timnya juga mungkin terkejut dengan hasil akhir pemilu presiden. Karena acapkali mengikuti hasil survey, banyak anggota tim ini yang memang tidak terlalu optimis. SBY, Wiranto dan Amien dianggap lawan berat. Namun ternyata Megawati bukan saja lolos di puataran kedua versi quick count. Hasil perhitungan itu menempatkan Megawati hanya terpaut 7% dari SBY. Padahal sepuluh hari sebelumnya, IFES, LSI dan LP3ES menggambarkan Megawati kemungkinan hanya memperoleh separuh dari perolehan SBY.

***

Apa yang salah? Mengapa hasil pemilu presiden banyak membuat orang terkejut? Bahkan banyak pula peneliti lembaga survey yang terkejut. IFES salah dalam membuat prediksi. Nomor dua ternyata Megawati, bukan Wiranto. SSS juga salah dalam menggambarkan ranking. Nomor dua ternyata bukan Amien Rais. LP3ES juga ragu-

ragu menentukan siapakah di posisi kedua. LPSEU milik Fachri Ali juga salah memprediksi Amien Rais masuk ke puataran kedua. LeKade juga salah karena meletakan Amien Rais dan Megawati bersaing ketat memperebutkan tempat kedua.

Hanya LSI yang secara tegas menyebutkan bahwa ronde kedua pemilu presiden hanya diikuti oleh SBY versus Megawati. Ranking selanjutnya berturut-turut Wiranto, Amien dan Hamzah. Ranking yang dibuat LSI ini sama persis dengan quick count dan perhitungan sementara KPU.

Mengapa banyak yang terkejut? Jawabnya pemilih dalam pemilu presiden ternyata memang jauh lebih dinamis. Sepuluh hari terakhir sebelum 5 Juli 2004, masih terjadi perubahan dukungan yang cukup signifikan. Contohnya, dukungan buat SBY. Pada tanggal 20-24 Juni 2004, data LSI dan IFES, dukungan buat SBY masih sma, sekitar 43%. Namun, pada tanggal 5 Juli, sepuluh hari kemudian, dukungan itu tinggal 33%. Sekitar 10% suara berpindah ke capres lain.

Untuk kasus SBY hal ini bisa dijelaskan dengan fenomena bekerjanya mesin politik capres lain. Partai Demokrat yang mendukung SBY, kekuatannya hanya 7%. SBY menggelembung menjadi 43% karena banyak pemilih partai lain yang memilih SBY. Namun sepuluh hari terakhir, mesin partai berhasil membuat sebagian pemilihnya pulang kandang untuk mendukung capres partainya sendiri. Dukungan buat SBY pun menyusut.

Hal ini dapat terlihat jelas sekali dengan membandingkan data LSI dan IFES pada akhir Juni, dengan data exit Poll LP3ES pada tanggal 5 Juli. Pemilih Golkar yang tadinya lebih banyak memilih SBY beralih lebih banyak memilih Wiranto. Pemilih PKB yang awalnya lebih banyak memilih SBY juga beralih memlih Wiranto. PKS yang awalnya lebih banyak memilih SBY pindah mendukung Amien Rais. Yang relative stabil hanya pendukung dari Partai Demokrat saja.

***

Bagaimana menjelaskan Amien Rais yang hanya mendapatkan 15%? Pendukung PAN memang hanya sekitar 6%. Bahkan komunitas Muhammadiyah berdasarkan survei LSI juga hanya sekitar 6%. Amien Rais tidak memiliki pesona seperti SBY yang dapat menyerap banyak pemilih partai lain. Akibatnya dukunan buat Amien memang terbatas.

Benar di sana ada Siswono, Sophan Sopian, Eros Djarot yang juga datang dari kubu nasionalis. Namun di segmen nasionalis, Amien Rais kalah mentereng dibandingkan Megawati, Wiranto, dan SBY. Memang ada begitu besar komunitas NU. Namun sulit bagi NU mendukung Amien yang diklaim sebagai calon presiden Muhammadiyah.

Bagaimana pula menjelaskan perolehan Hamza Haz-Agum Gumelar? Pasangan ini adalah satu-satunya paket yang perolehannya jauh di bawah perolehan partainya sendiri. Jangankan untuk menarik pemilih partai lain. Di kalangan pemilih PPP sendiri, Hamzah Haz ditinggalkan. Sementara kehadiran Agum Gumelar tampaknya tidak memberikan suara yang berarti.

Loyalitas pemilih pada kasus Hamzah Haz tidak kepada partai. Padahal sebesar 90% pemilih partai Demokrat memilih SBY. Sekitar 70% pemilih PDIP memilih Megawati. Namun untuk kasus Hamzah Haz, kurang dari 30% pemilih PPP memilih Hamzah. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya konsolidasi internal PPP selaku partai yang mengkampanyekan Hamzah Haz. Namun mungkin pula memang ada persoalan kualifikasi individual pada Hamzah Haz yang tidak sesuai dengan selera politik bahkan pemilih PPP sekalipun.

Memang banyak yang mengejutkan dalam pemilu presiden 5 Juli 2004. yang lebih mengejutkan lagi jika capres dan pendukung capres yang kalah dengan legowo menerima kekalahannya. Lalu mereka

menyerukan pendukungnya untuk menerima hasil pemilu dan mendukung siapapun yang menjadi presiden kelak. Jika ini terjadi, inilah kejutan yang paling mengembirakan. *

Golkar di antara Dua Capres

JAUH hari sebelum pemilu presiden, konvensi Partai Golkar dan pemilu parlemen, saya sudah membuat prediksi berdasarkan data LSI (Lembaga Survei Indonesia). Golkar akan menang dalam pemilu parlemen, tetapi kalah dalam pemilu presiden. Data LSI menunjukan keunggulan telak Golkar atas PDIP dan partai lain sejak enam bulan sebelum pemilu parlemen dimulai. Namun, pada saat yang sama, tokoh yang ikut konvensi Partai Golkar tidak ada yang populer.

Juga jauh hari sebelum pemilu presiden, sekitar bulan September 2003, LSI juga sudah membuat prediks yang saat itu kontroversial. Golkar diprediksi hanya memainkan peran sebagai King Maker bagi pertarungan capres antara Megawati versus SBY. Di antara semua penantangnya, saat itu SBY yang paling disukai.

Juga jauh hari sebelum pemilu presiden, Jusuf Kalla mengundurkan diri dari konvensi Partai Golkar. Ia lalu mendekat dan menjadi calon wakil presiden bagi SBY. Saat itu hampir berkembang wacana untuk

menuduh langkah Jusuf Kalla sebagai penghianatan. Bagaimana mungkin tokoh Golkar menyeberang membela capres lain yang akan berhadapan dengan capres Partai Golkar sendiri?

Saat itu, melalui aneka kolom dan talk show, saya nyatakan pula bahwa langkah Jusuf Kalla justru harus dilihat Golkar sebagai langkah sekoci. Jusuf Kalla jangan dianggap penghianat. Pada waktunya, ia justru dapat menjadi penyelamat Golkar jika pada putaran pertama capres Golkar sudah tenggelam.

Semua yang dipaparkan di atas tercatat dengan baik di banyak media yang dapat dilihat kembali. Cukup menyenangkan, semua yang saya prediksi itu terjadi. Jelas prediksi itu tidak dilakukan melalui metode spekulasi rasional, apalagi dengan intuisi paranormal. Semua dikerjakan secara imiah, dengan data survei LSI dan aneka informasi kelas A1.

***

Kini, what next? Sangat besar kemungkinan Wiranto-Salahuddin Wahid gagal maju ke babak berikutnya. Sebuah ironi, Partai Golkar, partai pemenang pemilu 2004, partai dengan SDM yang paling siap, partai dengan jam terbang paling tinggi, kini hanya menjadi penonton dalam pemilu presiden putaran kedua. Mempelainya adalah SBY versus Megawati. Golkar datang ke pesta itu tidak sebagai tuan rumah, tetapi sebagai tamu.

Tapi pilihan kini terbuka buat Golkar, sebuah lembaga politik. Pilihan pertama, Golkar meneruskan skenario sekoci itu. karena calon resmi partai gugur di babak pertama, Golkar masih punya kader lain, Jusuf Kalla. Berbeda dengan Wiranto, Jusuf Kalla tidak hanya lolos di putaran kedua. Ia bersama SBY bahkan menjadi pemenang pemilu presiden putaran pertama.

Pilihan kedua, Golkar justru berbelok arah. Bukan SBY-Jusuf Kalla yang didukung, tetapi Megawati-Hasyim Muzadi. Pertimbangan dukungan Golkar juga sangat rasional. Mendukung Megawati pada tahun 2004, akan membuka peluang Golkar pada tahun 2009. Megawati sudah berkuasa dua periode jika terpilih kembali. Pada tahun 2009, Megawati tidak boleh lagi menjadi presiden. Saat itu kesempatan buat Golkar.

Tentu akan berbeda jika SBY yang didukung, jika memang ada kesempatan, SBY kembali mencalonkan diri pada 2009. Kesempatan buat tokoh Golkar menjadi presiden pada 2009 menjadi lebih kecil karena akan bersaing dengan SBY jika memang pada 2004 SBY terpilih. Golkar juga berpikir, akan mendapatkan porsi kekuasaan lebih besar jika mendukung capres underdog. Saat ini posisi Megawati di bawah SBY. Mega lebih membutuhkan dukungan Golkar. Harga Golkar akan menjadi lebih mahal. Tidak hanya kursi menteri yang akan dtawari, tetapi sangat mungkin pula beberapa posisi kunci di BUMN.

Pilihan ketiga, Golkar sebagai lembaga sma sekali tidak mengambil posisi. Golkar memang tidak menjadi oposisi. Golkar juga akan tetap senang jika diajak dalam pemeintahan baru. Namun, semua itu dipulangkan kepada inisiatif tokoh Golkar dan pemilih Golkar sendiri. Mereka bebas ke SBY atau ke Mega. Bahkan, mereka bebas pula untuk Golput. Sebagai partai, Golkar tidak akan mendukung siapapun.

Di antara tiga pilihan itu, mana yang paling baik buat Golkar dan buat bangsa? Bagi Golkar, pilihan ketiga memang yang paling aman. Siapa pun yang menang, nanti akan juga datang ke Golkar untuk memperkuat pemerintahan. Secara cerdas, bahkan Golkar dapat memainkan dua kaki. Ada orang Golkar yang ditanam di SBY, ada pula tokoh Golkar yang diperbantukan di Megawati.

Tetapi justru pilihan ketiga itu yang paling sulit dilakukan Golkar. Elit Golkar akan membuat maneuver. Hukum ekonomi dalam politik praktis juga akan bekerja. Siapa yang berinvestasi politik paling besar, juga punya kesempatan memperoleh kompensasi yang lebih besar pula. Akan ramai sekali politisi Golkar mencoba mengarahkan dukungan partai ke SBY atau Mega. Ini era menunjukan jasa.

Jangan pula lupa, akhir tahun ini akan ada Munas Golkar untuk pergantian ketua umum. Manuver dukungan atas capres juga sangat terkait dengan kesempatan menjadi ketua umum. Dekat dengan presiden terpilih dan menguasai sumber ekonomi dari pemerintahan baru membuat kesempatan sang tokoh terpilih menjadi ketua umum cukup besar.

Jika Akbar Tandjung tetap ingin menjadi ketua umum, tentu kesempatan mendukung capres tertentu adalah jembatannya. Hal yang sama, jika ada tokoh ingin menggantikan Akbar Tandjung sebagai ketua umum. Dekat dan berjasa kepada capres tertentu yang kemudian terpilih menjadi presiden juga salah satu tangga emas.

Walau Golkar sebagai partai idealnya tidak mendukung capres mana pun, manuver elit Golkar membuat sikap itu sulit terlaksana. Lewat tengah bulan Juli, isu yang paling hot di dunia politik kita justru terjadi dalam dinamika internal elite Golkar.

Seandainya pun akan menentukan dukungan, partai Golkar harus benar-benar membuat perhitungan. Jangan sampai Golkar diarahkan untuk mendukung capres yang kemudian kalah. Sebagai partai pemenang pemilu, Golkar akan mengalami demoralisasi dan penurunan semangat juang. Apa jadinya, jika Golkar kalah di babak pertama, lalu kalah lagi di babak kedua pemilu presiden?

Jika memang akan diarahkan mendukung capres tertentu, pastikan capres yang didukung Golkar itu akan memenangkan pemilu presiden babak kedua. Bagaimana cara untuk tahu? Lembaga survei

yang kredibel dapat memberikan indikator. Spekulasi intelektual dan pemikir mana pun akan menjadi salah jika ia tidak punya data.

Sementara sudah dibuktikan, lembaga survei seperti LSI, paling akurat tidak hanya dalam pemilu parlemen, tetapi juga pemilu presiden. Dalam Pemilu Presiden 5 Juli, hanya LSI, lembaga survei yang secara tegas mengatakan yang maju ke babak kedua adalah SBY dan Megawati.

Tidak hanya itu, LSI juga menggambarkan peringkat capres di urutan satu sampai lima yang sama persis dengan quick count dan hasil sementara KPU.

Bulan Juli dan Agustus, LSI kembali membuat survei. Semua pihak, termasuk elite Golkar dapat menggunakan data itu untuk mengambil sikap, agar tidak mendukung capres yang bakal kalah. *

SBY VS Megawati

JIKA SBY berhadap-hadapan dengan Megawati, head to head, hanya berdua saja, di putaran kedua, bagaimana hasilnya? Ini pertanyaan yang kini paling banyak diajukan. Seminggu setelah pemilu 5 Juli semakin menunjukkan bahwa yang akan maju ke babak selanjutnya adalah SBY dan Megawati.

Data terakhir LSI (Lembaga Survei Indonesia) menunjukkan angka yang mencolok. Jika mereka berdua saja yang berhadap-hadapan, SBY mendapatkan dukungan sebesar 65%, Megawati 25%, dan sekitar 10% belum memutuskan. Namun, ini data tertanggal 20-24 Juni 2004. Saat itu popularitas SBY di survey yang sama sangat tinggi sekali, sekitar 43%. Sementara Megawati saat itu hanya separuhnya, sekitar 21%.

Sepuluh hari kemudian, pada 5 Juli 2004, sudah terjadi pergeseran dukungan. SBY melorot ke 33%, dan Megawati menanjak ke 26%. Pada 5 Juli 2004, belum lagi ada data SBY versus Megawati, yang head to head.

Sampai 20 September 2004, banyak hal dapat terjadi. SBY dapat saja terus semakin popular dan meningkat. Namun dapat pula sebaliknya, SBY terus merosot. Hal yang sama terjadi dengan Megawati. Selaku presiden yang sedang memerintah, banyak hal yang dapat membuat Megawati semakin populer. Namun, banyak hal pula yang dapat membuatnya terperosok.

Opini public mengenai pemilu presiden jauh lebih labil dan dinamis dibandingkan pemilu parlemen. Memilih tokoh dalam pemilu presiden, ternyata jauh lebih tidak pasti ketimbang memilih partai dalam pemilu parlemen. Jangankan public awam atau intelektual yang tidak punya data, bahkan banyak lembaga survey terkecoh oleh hasil pemilu presiden.

Hanya LSI yang berani secara tegas mengatakan yang maju ke babak kedua pemilu presiden adalah SBY dan Megawati. Deklarasi prediksi ini sudah disampaikan pada 2 Juli 2004. selanjutnya LSI mengumumkan bahwa Wiranto di ranking ketiga, Amien Rais keempat, dan Hamzah Haz kelima. Prediksi LSI ini akurat dan sama persis dengan hasil quick count dan hasil sementara KPU.

Lembaga survey lain salah atau ragu-ragu. IFES yang juga sebelumnya terkenal akurat, menempatkan Wiranto di urutan kedua dan Megawati ketiga. LeKade milik tokoh PDIP menempatkan Megawati dan Wiranto di posisi kedua. Dua tokoh ini dianggap berada dalam jarak margin of error.

***

Memang hanya LSI yang tegas dan akurat soal ranking kelima capres itu. Namun, presisi LSI mengenai persentase cukup jauh. Pada 24 Juni, survey LSI dan IFES menunjukkan angka yang sama, bahwa SBY didukung oleh 43%. Pada tanggal itu pula, baik LSI, IFES, ataupun LP3ES menunjukkan angka yang sama, bahwa Megawati

tertinggal dari SBY hampir separuh. Sepuluh hari kemudian, ternyata jarak SBY dan Megawati hanya 7% saja. Apa yang terjadi?

Pemilu presiden babak pertama pertama menunjukan realitas baru. Betapa dalam tempo sepuluh hari, suara dan dukungan publik dapat berubah jauh dan cepat sekali. Mesin politik partai politik memang mulai memanas di sepuluh hari terakhir.

SBY hanya didukung oleh PD, PBB, dan PKPI, yang total suaranya di bawah 13%. SBY dapat melonjak melampaui 40% karena ia didukung oleh pemilih partai lain. Sesuai dengan iklannya, partai boleh beda, tetapi presidennya SBY. Bahkan pada 24 Juni itu, lebih banyak pemilih Golkar dan PKB yang memilih SBY ketimbang memilih Wiranto.

Namun, dalam sepuluh hari terakhir, mesin partai dapat membuat pemilih kembali ke kandangnya masing-masing. Lebih banyak dari mereka yang memilih capres yang didukung oleh partainya. Pemilih Golkar dan PKB pulang kandang dan lebih banyak memilih Wiranto. Pemilih PKS juga lebih banyak memilih Amien Rais. Akibatnya, suara SBY melorot.

Hal yang sama terjadi dengan Megawati. Walau masih terbatas, Megawati memperbaiki sikapnya terhadap pers. Ia mencoba melakukan interview dengan sejumlah media televise, one to one conversation. Ia juga tidak seburuk yang diduga banyak orang dalam acara dialog Calon Presiden. Seperti yang disarankan banyak orang. Ia kunjungi beragam wong cilik dan meresmikan aneka proyek. Ia masuk dalam berita TV hampir setiap hari. Upaya Megawati membuahkan hasil.

***

SBY telah mengalahkan Megawati di putaran pertama. Maupukah ia mengalahkan Megawati di putaran kedua? Ataukah situasinya dapat berbalik. Megawati memperoleh momentum baru dan mengalahkan SBY?

Delapan puluh lima hari menuju 20 September 2004 adalah hari yang panjang. KPU membatasi kampanye hanya 3 hari. Merebut hati dan pikiran 150 juta pemilih sangat tergantung dari kegiatan public relation kedua tokoh tersebut.

Dapat diduga, kubu SBY akan menggunakan slogan " Koalisi Perubahan Melawan Status Quo." SBY akan menampilkan diri sebagai kekuatan pembaruan. Ia mencoba menarik seluruh segmen yang kecewa dengan situasi ini. Akan ia gambarkan betapa situasi sekarang harus diperbaiki. Pengangguran dan setengah pengangguran berjumlah 45 juta. Korupsi justru lebih luas seperti yang dicatat oleh Transparency International. Buruh kecil Indonesia di luar negeri tidak terlindungi.

Sebaliknya, Megawati jutsru menggunakan slogan "Kepastian versus Ketidakpastian." Megawati menunjukan bahwa leadershipnya semakin hari semakin baik. Data ekonomi juga mempertontonkan hasil yang semakin positif. Publik sudah mengujinya. Sementara capres baru, dianggap masih tidak pasti leadership nya. Pendukungnya juga memasukan sentimen militerisme untuk menyerang SBY.

Sekali lagi, siapa pun yang menang di antara mereka berdua, sejauh pemilu tetap demokratis dan damai, yang menang adalah demokrasi. SBY dan Mega bukanlah musuh. Mereka atau pendukung mereka seharusnya akan tetap saling membutuhkan siapa pun yang menang kelak. *

Jika SBY versus Megawati Hari Ini

JIKA pemilu presiden dilaksanakan hari ini, siapakah yang Anda pilih? Ini pertanyaan standar yang diajukan semua lembaga jajak pendapat di dunia untuk merekam opin publik secara reguler. Di AS, Gallup Poll bahkan mengajukan pertanyaan itu tiap hari menjelang seminggu sebelum pemilu presiden. Di Filipina, Social Weather Station (SWS) mengajukan isu serupa secara reguler menyambut kompetisi para capres.

Pertanyaan serupa diajukan oleh IFES, lembaga internasional yang sudah melakukan jajak pendapat di Indonesia sejak pemilu 1999. Jumat, 6 Agustus 2004, IFES mempublikasikan temuannya. Survey IFES dilaksanakan pada tanggal 7-14 Juli 2004, setelah selesai pemilu presiden tahap pertama.

Survei IFES dilaksanakan di seluruh provinsi. Metode yang digunakan multi stages random sampling. Responden yang dipilih mewakili semua karakter populasi. Wawancara dilakukan tatap muka

tidak hanya kepada pemilik telepon atau segmen perkotaan, tetapi juga di pedesaan, di kalangan penduduk miskin, dan di komunitas pendidikan rendah, yang terpilih secara random sebagai responden.

Hasilnya cukup sensasional. Yang mendukung SBY sebanyak 66%. Sedangkan pendukung Megawati hanya 24%. Sebanyak 10% belum menentukan sikap atau merahasiakan jawabannya. Selisih pendukung SBY dan Megawati sangat tinggi sekali, sekitar 40%.

IFES juga mengelaborasi ke mana larinya pendukung capres yang kalah. Di semua pendukung capres yang kalah, mayoritas mengalihkan suaranya ke SBY. Dari 100% pendukung Wiranto, misalnya, 72,4% mendukung SBY dan 14,7% mendukung Megawati. Di antara 100% pendukung Amien Rais, sebesar 77% mengalihkannya ke SBY dan 13% ke Megawati. Bahkan di kalangan 100 pemilih Hamzah, 60% memilih SBY dan 40% memilih Megawati.

Karena menggunakan metodologi yang sama dalam kurun waktu yang mirip, survey IFES tidak banyak berbeda dengan hasil survey LSI. Setelah 5 Juli, LSI juga mendapatkan rekaman opini public yang mirip. Dari 100 persen responden di seluruh Indonesia, 68% mendukung SBY, dan 22 % mendukung Megawati. Sekitar 9% menyatakan rahasia atau belum memutuskan.

Membaca publikasi IFES, wajar jika muncul dua pertanyaan penting. Pertama, seberapa jauh hasil survey itu dapat dipercaya sebagai gambaran kenyataan. Apakah hasil itu tidak dipolitisasi, misalnya? Kedua, mengapa Megawati dikalahkan telak sekali dalam survey itu?.

***

Amerika Serikat mungkin menjadi kiblat lembaga jajak pendapat mengenai pemilu presiden. Tradisi jajak pendapat di sana sudah dimulai sebelum Perang Dunia Kedua. Melalui aneka modifikasi,

akurasi jajak pendapat di Amerika Serikat sangat tinggi. Gallup Poll menjadi salah satu tonggak lembaga survei yang kredibel.

Sejak Perang Dunia Kedua, hanya dengan beberapa perkecualian, prediksi pemilu presiden AS oleh Gallup Poll terbukti benar. Sebelum pemilu presiden dilaksanakan, public sudah tahu siapa yang akan menjadi presiden AS. Ilmu pengetahuan, melalui revolusi statistic dan metodologi penelitian, sudah membantu public mengetahui suara populasi hanya dengan system sampel saja.

Reaksi kubu capres terhadap hasil Gallup Poll juga standar. Pihak yang diprediksi akan kalah selalu mencari cara agar public tidak mempercayai hasil survey. Selalu dikemukakan kasus bahwa Gallup Poll pernah salah. Memang benar Gallup Poll pernah salah tetapi itu di era awal jajak pendapat, sebelum dilakukan modifikasi metodologi. Namun sejak tahun 80-an, Gallup Poll selalu benar tentang siapa yang akan menjadi presiden AS.

Akurasi lembaga serupa di dunia ketiga juga teruji. SWS di Filipina, misalnya, kembali menunjukan kebolehan prediksinya. Ketika publik merasa Arroyo mungkin dikalahkan pada bulan Mei 2004, beberapa hari sebelum pemilu, SWS mengeluarkan hasil jajak pendapat bahwa Arroyo menang. Publik skeptis. Namun akhirnya terbukti bahwa Arroyo memang menang.

Di Indonesia, baik LSI atau IFES juga menunjukan akurasi dan presisi serupa. Pada pemilu parlemen 2004, sebelum pemilu dimulai, baik LSI dan IFES menyatakan Golkar akan menang dan PDIP nomor dua. LSI bahkan pada tanggal 2 Juli 2004, tiga hari sebelum pemilu, sudah menggambarkan akan ada dua partai, PKS dan Partai Demokrat, yang akan menjadi partai papan tengah dengan perolehan di atas 5%.

Dilihat dari indeks kesalahan rata-rata, kesalahan prediksi LSI dalam pemilu parlemen sangat kecil sekali, sekitar 1,6%. Tingkat

kesalahan itu bahkan di bawah margin of error 2%. Publikasi LSI dan IFES soal pemilu parlemen dapat dilihat dari aneka laporan koran di masa itu.

Dalam pemilu presiden 5 Juli 2004, LSI telah mengumumkan hasil survei pada tanggal 2 Juli 2004, tiga hari sebelum pemilu, bahwa yang lolos ke putaran kedua adalah SBY dan Megawati. Berturut-turut LSI, menggambarkan ranking ke 3,4,5 adalah Wiranto, Amien Rais dan Hamzah Haz. Publikasi atas hasil LSI itu juga dapat dilihat di aneka media.

Namun memang ada selisih persentase. Survei LSI dan IFES menyatakan SBY mendapatkan 43%. Sementara Megawati di LSI di atas 20%, tetapi di IFES di bawah 20%. Kenyatannya, SBY mendapatkan 33% dan Megawati 26%.

Bagaimana menjelaskan perbedaan itu? perlu diingat, survei itu dilakukan sekitar 10 hari sebelum 5 Juli 2004. Dalam waktu sepuluh hari, terjadi mobilisasi suara oleh partai politik yang mengubah persentase. Namun perubahan itu tidak merubah ranking teratas.

***

Bukankah selisih Megawati dan SBY pada putaran pertama hanya 7%? Mengapa hasil survei di puatan kedua, jika pemilu dilaksanakan di hari itu, selisihnya di atas 40%? Selisih 7% itu terjadi jika peserta capres ada lima. Suara dengan sendirinya tersebar ke banyak calon.

Namun jika peserta hanya dua, head to head antara SBY dan Megawati, pemilih dapat bersikap lebih tegas. Ternyata memang dibuktikan oleh survey, mayoritas pemilih capres yang kalah lari ke SBY. Selisih SBY dan Megawati akibatnya semakin besar. Dua alasan dapat dikemukakan mengapa mereka mengalihkan suara ke SBY.

Pertama, public kecewa dengan leadership Megawati. Indikatornya sederhana saja. Jika public puas dengan Megawati,

pada pemilu parlemen 5 April 2004, PDIP akan menang melampaui Golkar. Bahkan PDIP memperoleh dukungan yang jauh lebih besar dibandingkan dukungan tahun 1999. kenyataannya, PDIP justru merosot menjadi nomor 2, dan kehilangan hampir separuh suara.

Jika puas dengan Megawati, pada pemilu presiden putaran pertama 5 Juli 2004, Megawati akan pula berada di urutan teratas. Sebagai Capres yang masih menjadi presiden, selayaknya dukungan Megawati jauh melampaui capres lainnya. Tetapi kenyatannya, Megawati hanya nomor dua, dengan selisih 7% dibandingkan SBY. Bahkan Megawati nyaris tidak lolos dikalahkan Wiranto.

Kedua, variabel figur capres ternyata sangat menentukan. Dalam memilih siapa yang seharusnya menjadi pemimpin bangsa, bukan mesin politik yang ditinjau, tetapi kepribadian capres.

Dari berbagai indikator kepribadian, mulai dari wawasan yang luas, kewibawaan, perhatian kepada rakyat, kecerdasan, ketegasan dan kemampuan memimpin, di mata publik, SBY jauh di atas Megawati. Tidak heran jika dukungan atas keduanya juga berjarak cukup jauh.

Apakah dukungan pada dua capres ini masih mungkin berubah? Tentu saja perubahan dukungan selalu mungkin karena opini public sangat dinamis. Namun harus pula dikatakan, jarak 40% yang memisahkan SBY dan Megawati cukup jauh. Di samping itu, persepsi atas kpribadian capres juga sangat sulit diubah dalam waktu cepat. *

Potret Warna-Warni Presiden SBY

MENJELANG akhir tahun 2004, terjadi perubaha signifikan dalam politik elite secara nasional. Jusuf Kalla, yang kini wakil presiden, terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, partai terbesar. Perubahan segera terjadi, tidak hanya pada orientasi politik Partai Golkar. Akan pula terjadi perubahan pada koalisi Kebangsaan, yang sebelumnya menjadi kekuatan utama oposisi. Yang lebih signifikan lagi, akan pula terjadi pergeseran dalam politik parlemen.

Namun bagaimana dengan politik public luas di akhir tahun? Akankah juga terjadi pergeseran di kalangan 150 juta pemilih di seluruh Indonesia, mengikuti perubahan di tataran elite nasional? Publik luas ini, bukan hanya elite, memilih pemerintahan baru. Mereka menentukan siapa dan partai mana yang berkuasa di parlemen. Mereka pula yang akhirnya menentukan siapa yang menjadi presiden RI.

Sekitar dua bulan setelah dilantiknya DPR dan presiden baru, adakah persepsi politik publik luas ini juga akan berubah? Hanya survei yang mampu menangkap suara mereka. Sejauh survei itu dikerjakan dengan metodologi yang valid, walau hanya dengan 1.200 responden, suara mereka dapat dipotret. Pengalaman dua pemilu di tahun 2004 sudah membuktikan bahwa hasil survei beberapa lembaga cukup akurat.

Untuk memotret perubahan opini publik itu, LSI menyelenggarakan survei akhir tahun. Berdasarkan rekaman publikasi yang sudah dibuat, cukup beruntung LSI punya akurasi paling tinggi dibanding semua lembaga jajak pendapat yang pernah dibuat untuk pra-pemilu.

Indeks kesalahan LSI, perbandingan antara hasil pra-pemilu dengan hasil resmi KPU, baik untuk pemilu legislatif, ataupun pemilu presiden tahap dua, adalah yang paling kecil dibandingkan semua lembaga jajak pendapat yang melakukan kegiatan serupa.

Survei akhir tahun LSI menunjukan potret berwarna-warni persepsi publik mengenai pemerintahan SBY dan DPR. Ada potret buram. Publik menilai kinerja pemerintahan yang menurun. Namun ada pula potret cerah. Publik masih optimis dengan leadership presiden baru dan ketokohannya.

***

Yang mencolok dalam potret buram itu adalah merosotnya popularitas SBY. Untuk survey pra-pemilu, popularitas di sini dikaitkan dengan electability, atau peluang seorang tokoh untuk terpilih. Semakin besar peluang seorang tokoh terpilih dalam pemilu, semakin ia popular. Namun setelah pemilu usai dan seorang tokoh sudah terpilih, popularitas dikaitkan kepuasan public atas kinerjanya. Semakin puas public dengan kinerja seorang tokoh, semakin tokoh itu popular.

Dalam waktu kurang lebih sebulan, memang terjadi penurunan popularitas SBY. Melalui dua survey, di bukan November dan Desember 2004, penurunan itu rata-rata sebesar 13%. Jika dipilah lebih jauh, berbagai segmen masyarakat memiliki respond dan persepsi yang berbeda atas popularitas SBY. Penurunan, popularitas SBY di kalangan menengah atas, lapisan terdidik dan wilayah perkotaan lebih tinggi. Segmen itu memang paling sensitive dengan perkembangan terakhir politik nasional.

Ketika kepuasan public itu dipilih menjadi berbagai isu, juga tampak respon penurunan yang berbeda. Untuk kasus korupsi, SBY justru sedikit bertambah popular. Ini terkait dengan aneka kampanye anti-korupsi. Kebijakan anti-korupsi juga sangat kongkret dengan ditangkapnya beberapa ikan besar seperti Abdulah Putteh.

Namun untuk isu lain, khususnya ekonomi, menurunnya popularitas SBY lebih tajam. Untuk isu pengangguran dan naiknya harga kebutuhan pokok, popularitas SBY bahkan merosot di atas 20%.

Apa yang menjadi penyebab menurunnya popularitas SBY? Beberapa penyebab saling bertumpang tindih. Sebagian, itu adalah persoalan dalam psikologi public sendiri yang sudah lama berada dalam situasi krisis. Sebagian lagi juga disebabkan oleh aneka tindakan dan citra pemerintahan SBY sendiri. LSI mencatat empat penyebab.

Pertama, harapan awal public atas presiden baru cukup tinggi. Sebelum presiden baru terpilih, public sudah sangat gandrung dengan isu perubahan yang diajukan SBY. Mereka segera berharap dan berkeyakinan bahwa SBY segera membawa perubahan itu. Bahkan banyak dari mereka yang tidak peduli dengan kompleksitas masalah.

Karena tingginya harapan, tinggi pula kemungkinan kecewa. Harapan yang tinggi dari publik itu agaknya kurang dikelola secara baik oleh pemerintahan baru. Akibatnya, sebagian harapan itu berubah kekecewaan.

Kedua, publik juga semakin tidak sabar mengharapkan hasil perubahan segera. Yang sabar menunggu hasil kongkret pemerintahan baru dalam jangka waktu 4-5 tahun sangatlah minoritas. Mayoritas public menginginkan perubahan kongkret yang sudah mereka rasakan hanya dalam jangka waktu 3-6 bulan saja, atau 1-2tahun.

Mereka berharap presiden baru seperti superman atau penyulap sakti. Hanya dengan satu ketukan, bim salabim, perubahan itu segera tersaji di hadapan mereka. Setelah satu bulan menunggu, dan umumnya mereka tidak melihat perubahan berarti terutama dalam kehidupan ekonomi, sebagian mereka menjadi kecewa.

Ketiga, public juga mengembangkan persepsinya sendiri mengenai beberapa menteri di cabinet SBY-JK. Beberapa figure itu dianggap bertentangan dengan citra SBY-JK yang banyak mengangkat symbol Perubahan dan pemerintahan yang bersih. Dipukul rata-rata, mayoritas public tidak yakin kabinet itu mampu untuk bersih dari praktek KKN.

Keempat, komunikasi politik pemerintahan SBY dan seni public relation atas isu popular dianggap sangat kurang. Selama memerintah, banyak isu popular yang terjadi, mulai dari kasus tabrakan beruntun di Jagorawi sebelum datang iringan mobil presiden, kematian Munir yang diracun, sampai bencana alam di Alor. Penanganan pemerintahan SBY atas kasus itu justru menimbulkan kemarahan public.

Publik paling tidak puas dalam penanganan tabrakan tol Jagorawi. Tingkat kepuasan public atas kasus itu paling rendah dibandingkan

kasus lainnya. Ketika public berduka dan ingin mendengarkan simpati, juru bicara bersama polisi justru menyalahkan pihak tertentu sebagai penyebab.

Walau secara rasional, tudingan itu mungkin benar, tetapi itu dirasakan kurang pas dengan psikologi publik. Sejumlah ahli komunikasi mencatat penjelasan itu sebagai kesalahan fatal dan mendasar dalam merebut simpati public. Duka public bahkan berubah menjadi kemarahan kepada presiden.

***

Namun public juga mencatat potret yang cerah atas pemerintahan SBY. Sisi optimis ini lebih disebabkan oleh figure SBY sendiri, bukan kebijakannya. Mayoritas public masih percaya atas berbagai kualifikasi leadership SBY, yang membuatnya nanti mampu membawa kebaikan bagi bangsa. Ia dianggap cukup punya determinasi dan focus perhatian.

Dalam konstelasi politik elite, SBY juga jauh lebih popular dan didukung dibandingkan aneka kekuatan lain. Jika SBY dan DPR bersilang pendapat, misalnya, siapa yang akan didukung rakyat? SBY lebih didukung ketimbang DPR. Jika antar elite terjadi konflik, misalnya antara SBY, Megawati, Akbar Tandjung, Gus Dur dan Amien Rais, siapa yang dianggap public paling berpengaruh? Sekali lagi SBY jauh melampaui bahkan semua tokoh itu digabung menjadi satu.

Jika koalisi kerakyatan yang pro-SBY bertentangan dengan Koalisi Kebangsaan yang kontra SBY, siapa yang akan didengar public? Mayoritas responden tetap lebih mendukung koalisi kerakyatan. Dengan tiga kasus di atas, ketokohan SBY masih dominant dan paling mengakar dalam benak public saat ini.

SBY memiliki kualifikasi leadership untuk berhasil. Ia bahkan berpotensi memimpin pemerintahan yang kuat. Publik percaya

kepada kejujuran, perhatian, dan kompetensinya. Yang perlu diperkuat oleh SBY di tahun 2005 adalah " pendukung public relation-nya."

Selama sekitar dua bulan memerintah, sangat terasa sisi public relation itu yang kurang. Begitu banyak potensi success story yang tidak dikapitalisasi, dan potensi kerusakan yang tidak dikontrol atau diminimalisasi. *

George Bush Mengutip Data LSI

PRESIDEN AS George Bush, mantan Presiden Bill Clinton, dan mantan Presiden George Bush Senior mengutip data LSI (Lembaga Survei Indonesia). Ketiga tokoh itu mengapresiasi penemuan LSI, yang bekerja sama dengan lembaga nonprofit Terror Free Tomorrow, mengenai persepsi publik Indonesia atas peran bantuan kemanusiaan AS di Aceh.

Bill Clinton dan George Bush Senior ditugaskan oleh presiden AS saat ini menjadi duta bangsa AS untuk korban tsunami. Dua tokoh itu sudah berkeliling ke berbagai wilayah, termasuk Aceh. Dunia melihat, ujar Clinton sambil mengutip hasil survey LSI, AS bukan saja berkepentingan menjaga keamanan AS sendiri, tetapi juga tergerak dengan bantuan kemanusiaan. Sentuhan bantuan kemanusiaan itu adalah pesan universal yang dapat membuat dunia Muslim melihat AS secara berbeda.

Demikianlah cuplikan berita yang disiarkan banyak media internasional, termasuk Reuters. Sengaja berita ini diangkat untuk dua hal. Pertama, untuk menunjukan adanya peluang besar menjembatani AS dan dunia Muslim selama ini. Jembatan yang paling efektif adalah aneka program dan bantuan kemanusiaan di jantung komunitas Muslim. Jika program kemanusiaan itu dilakukan secara sistematis dengan publikasi yang pas, pelan-pelan AS tidak lagi terkesan garang.

Selama ini AS terkesan menaklukan dunia Muslim dengan bom, perang, dan propaganda. Secara fisik, mungkin AS dapat menguasai teritori wilayah Muslim itu. Namun AS segera kehilangan dukungan dari hati dan pikiran mayoritas Muslim. AS justru akan dianggap sebagai common enemy. Kekerasan demi kekerasan justru akan tumbuh untuk melawan AS. Dunia Muslim justru harus didekati dengan sentuhan yang lebih universal dan non-kekerasan, seperti bantuan kemanusiaan.

Kedua, berita itu diangkat untuk menunjukkan, sebuah lembaga penelitian dapat berperan di luar komunitas ilmiah. Jika yang diteliti adalah pusat dari gravitasi politik, hasil temuan itu dapat mempengaruhi kebijakan public. Bukan saja kebijakan public domestic yang dipengaruhi, tetapi lembaga survey juga berpeluang ikut mempengaruhi persepsi pemimpin dunia.

***

Sebuah negara demokrasi yang kuat tidak hanya memerlukan partai politik yang kuat. Demokrasi juga membutuhkan lembaga jajak pendapat yang kredibel, dengan metodologi yang valid. Selama ini jajak pendapat hanya dikutip dalam era kampanye untuk melihat dukungan publik atas calon tertentu. Seusai pemilu, lembaga jajak pendapat sebenarnya justru berperan lebih penting untuk ikut dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Dalam sejarah pembuatan kebijakan publik, jajak pendapat merupakan salah satu penemuan terpenting. Penemuan jajak pendapat dalam kebijakan publik sama pentingnya dengan penemuan penisilin dalam ilmu kedokteran, atau penemuan roda dalam dunia otomotif. Melalui jajak pendapat, hanya dengan menggunakan seribu atau dua ribu responden, kita dapat mengetahui persepsi, aspirasi, harapan atau ketakutan dua ratus juta penduduk satu negara. Hal itu dapat dianalogikan dengan satu kuali besar sup ayam. Dengan hanya mencicipi satu sendok sup itu, kita sudah dapat tahu rasa dari keseluruhan satu kuali sup ayam. Tentu saja analogi itu hanya tepat, jika pengambilan responden dan keseluruhan jajak pendapat itu mengikuti metodologi yang benar dan ketat.

Ilmu statistik sudah menyumbangkan sejenis revolusi dalam kebijakan publik. Akibatnya mudah bagi kita mengetahui apa kehendak mayoritas masyarakat. Agar tidak ada jarak lebar antara kebijakan publik dengan opini publik; antara politik elite dengan politik yang tumbuh di masyarakat; jajak pendapat menjadi mediumnya.

AS diuntungkan oleh keejahteraan mayoritas rakyatnya. Lebih dari 90% populasi di AS sudah memiliki telepon. Gallup Poll sangat mudah sekali merekam opini publik hanya melalui telepon. Bahkan sebulan sebelum pemilu presiden, Gallup Poll dapat melakukan jajak pendapat setiap hari secara nasional, hanya dengan mengajukan satu pertanyaan saja. Biayanya relatif murah. Pelaksanaan surveinya relatif murah.

Namun, dunia ketiga, ada contoh lembaga jajk pendapat yang baik. Di Filipina, SWS memiliki reputasi internasional. Karena jumlah pemilik telepon di Filipin sama sedikitnya dengan Indonesia, metode jajak pendapat yang dikembangkan oleh SWS adalah wawancara tatap muka ke seluruh wilayah negeri. Biaya survei pun menjadi sangat mahal.

***

Dalam pemilu presiden di Amerika Serikat tahun 1996, Bob Dole, calon presiden dari partai republik, tidak dikalahkan oleh Bill Clinton, dari Partai Demokrat. Yang mengalahkan Bon Dole adalah tim jajak pendapat. Demikian seloroh soal pentingnya jajak pendapat dalam pertarungan pemilihan presiden di AS.

Dua tahun setelah terpilih pada 1992, Bill Clinton saat itu berada dalam puncak ketidakpopulerannya. Lalu ia kemudian mencari bantuan kepada Dick Morris, seorang penasihat politik kelas satu di AS.

Langkah pertama yang dilakukan Dick Morris adalah membuat jajak pendapat. Ia ingin tahu bagaimana sebenarnya public menilai Clinton. Ia juga mencari tahu, program, isu, harapan, ketakutan dan citra yang diinginkan oleh mayoritas pemilih. Hasil jajak pendapat itu ia gunakan untuk mengubah Clinton. Maka pada 1996, Clinton muncul sebagai sosok baru, dengan program baru. Dengan mudah Clinton akhirnya terpilih kembali.

Namun, tidak hanya pemilu yang kini menggunakan jajak pendapat. Berbagai kebijakan public di AS dibuat dengan mempertimbangkan opini yang berkembang di masyarakat. Di satu sisi kebijakan public itu dibuat untuk merespons kebutuhan yang memang berkembang di masyarakat. Di sisi lain, bentuk kebijakan public yang akan dilemparkan kembali ke masyarakat juga mempertimbangkan respons public.

Untuk kebijakan yang akan mendapatkan reaksi besar, tidak jarang naskah konsep kebijakan itu diuji coba dalam aneka survey dan focus group discuss in. Reaksi public luas dapat terbaca melalui uji coba itu. Pemerintah segera mendapatkan feedback untuk menyempurnakan kebijakan agar lebih dapat diterima.

Kebijakan pemerintah Indonesia atas BBM, misalnya, akan lebih didukung public jika secara seksama mendengarkan masukan melalui survey. Hal yang biasa, bahkan sangat bagus jika presiden negara adikuasa mengutip data survey. Ini tradisi yang baik pula untuk dikerjakan pemimpin politik di negara demokrasi lainnya, termasuk Indonesia. *

SBY-JK Masih Populer?

UNTUNG saja SBY-JK masih populer. Public masih mendengar imbauan dua tokoh puncak ini. Jika tidak, gonjang-ganjing rupiah, naik turunnya saham, kontroversi perdamaian dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), isu kenaikan harga BBM, bakal segera diikuti oleh kerusuhan massa. Politik dapat menjadi bola liar.

Namun, dua tokoh itu harus segera mencari jalan kongkret dan cepat untuk mengatasi krisis ekonomi dan hilangnya kepercayaan public atas tim ekonomi pemerintah. Bagi mayoritas public luas (sekitar 60%), masalah ekonomi adalah prioritas. Sebaik apa pun kinerja dua tokoh itu di bidang lain, jika public merasa secara ekonomi semakin sengsara, mereka berdua segera kehilangan dukungan.

Demikianlah salah satu temuan survey yang dikerjakan Lingkaran Survei Indonesia menjelang setahun presiden. Berbagai pihak mulai memberikan review atas kinerja setahun SBY-JK. Para pakar, politisi,

dan pers dengan berbagai gaya dan opini mulai memanaskan tensi politik dengan kritiknya.

Lingkaran Survei Indonesia menampilkan pihak yang secara moral paling berhak berbicara mengenai setahun SBY-JK. Mereka adalah 150 juta pemilih di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua.

Mereka inilah yang tempo hari dalam pemilu telah memberikan mandat kepada pasangan SBY-JK sebagai presiden dan wakil presiden. Mereka pula yang paling harus didengar suaranya, untuk menilai apakah mandat itu sudah dijakankan oleh SBY-JK setahun kemudian.

Survei dilakukan di seratus desa dan kota di seluruh provinsi Indonesia. Jumlah responden 1.000 yang diambil dengan standar multi-stage random sampling. Wawancara dilakukan dengan tatap muka, sehingga mencakup seluruh populasi, tidak hanya pemilik telepon yang hanya 10% dari totalitas populasi. Data lapangan diambil pada pertengahan Agustus 2005.

***

Ekonomi memang menjadi titik lemah setahun SBY-JK di mata publik. Jauh lebih banyak populasi yang mengatakan situasi ekonomi saat ini buruk ketimbang yang menyebutnya baik. Yang menyatakan buruk hampir dua kali lipat dibandingkan yang menyatakan baik. Sebaliknya, di bidang lain, oenegakan hukum, politik, keamanan, dan demokrasi, lebih banyak populasi yang menyatakan situasi saat ini baik ketimbang buruk.

Hal yang sama terhadap kinerja para menteri. Untuk kementrian bidang politik dan keamanan, serta bidang kesra, kepuasan publik masih di atas 40%. Namun untuk kementrian ekonomi dan keuangan, kepuasan publik di bawah 40%.

SBY-JK masih populer. Lebih dari 60% populasi merasa puas dengan kinerja Yudhoyono secara umum. Persentase itu memang tidak setinggi di masa awal pemerintahannya, di mana persentase Yudhoyono mencapai angka hampir 80%. Namun, angka kepuasan publik saat ini sudah di atas perolehan Yudhoyono dalam pemilu babak kedua.

Jusuf Kalla juga masih populer. Persentase kepuasan publik atasnya sekitar 57%. Persentase ini memang tidak setinggi respon public atas Yudhoyono. Namun popularitas Kalla ini cukup stabil dilihat dari setahun terakhir.

Gonjang-ganjing ekonomi saat ini memang oleh public ditimpakan kepada tim ekonomi. Bagi public luas, tim ekonomi yang harus bertanggung jawab, bukan SBY-JK. Public masih percaya Yudhoyono adalah pemimpin yang jujur, bekerja keras, dan perhatian kepada rakyat. Persepsi atas personalitas itu, bukan hasil kongkret pemerintahannya, yang membuatnya masih popular.

Di luar masalah ekonomi, public cukup mengapresiasi prestasi dan gebrakan SBY-JK. Pemberantasan korupsi, judi, premanisme, walau masih awal, namun mendapatkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi, sekitar 70%. Publik masih percaya, jika para pembantu presiden cakap, SBY-JK masih bisa berprestasi seperti pada masalah pemberantasan korupsi dan judi.

Namun, seberapa jauh pasangan itu masih bisa popular jika ekonomi tetap gonjang-ganjing? Soeharto yang begitu kuat saja bisa rontok seketika jika ekonomi rapuh dan merosot. Menjelang setahun pemerintahannya, SBY-JK dituntut mengambil langkah kongkret. Jika bisa bahkan memberikan time-line kebijakannya.

***

Saat ini publik menanti respon dua tokoh itu atas dua isu yang paling panas: reshuffle tim ekonomi dan kenaikan harga BBM. Dua isu itu adalah buah simalakama. Apa pun yang dilakukan presiden atas dua isu itu, potensial menghilangkan sebagian dukungan politik. Jika presiden lakukan tindakan, akan kehilangan dukungan dari kelompok tertentu.

Sebaliknya, jika tidak dilakukan tindakan, presiden kehilangan dukungan dari pihak lainnya. Jika presiden mengulur dan mencari waktu terbaik untuk mengambil tindakan, penguluran waktu itu juga potensial membuat sebagian pendukungnya pergi.

Kepemimpinan SBY-JK sedang diuji minggu-minggu ini. Melalui isu reshuffle tim ekonomi dan kenaikan harga BBM dua hal segera tampak dalam kepemimpinan SBY-JK. Pertama, apakah SBY-JK tipe pemimpin yang memiliki visi dan komitmen sehingga berani mengambil tindakan yang tegas dan terkalkulasi? Ataukah mereka tipe pemimpin yang ragu-ragu, yang mudah sekali goyah oleh tekanan?

Kedua, apakah tim SBY-JK kompak? Apakah Yudhoyono masih mengontrol para pembantunya dan masih menjadi pemimpin utama? Ataukah Yudhoyono mulai didikte para pembantunya sendiri dan tidak lagi menjadi pemimpin utama? Yudhoyono, misalnya, memang resmi sebagai presiden, tetapi kehilangan spirit seorang pemimpin yang diberi mandat secara langsung dan tegas terhadap para pembentunya untuk tetap berada dalam satu komando?

Sebagai contoh kasus. Dalam satu waktu, dinyatakan BBM akan naik tahun depan. Lalu dinyatakan lagi, BBM akan naik setelah Oktober 2005. kemudian muncul pola pernyataan pembantunya BBM akan naik September 2005 ini.

Hal itu tentu sinyal yang buruk bagi kepemimpinan presiden. Perbedaan pandangan antara presiden dan pembantunya, soal kapan

saat yang tepat bagi kenaikan BBM, sebaiknya terjadi dalam sidang kabinet saja. Namun, di publik luas, pernyataan presiden tidak boleh disanggah pembantunya.

Suatu ketika dinyatakan bahwa sedang dipertimbangkan untuk mengevaluasi kabinet. Akan dilihat siapa yang bisa diajak kerja sama. Namun, di lain kesempatan, ada pula sanggahan dari dalam sendiri. Bahwa yang akan dilakukan hanyalah evaluasi bukan reshuffle kabinet. Walau menteri diganti sepuluh sekali, situasi tidak dengan sendirinya baik.

Akibatnya semakin beredar aneka joke dan humor mengenai kepemimpinan SBY-JK dikomunitas elite. Dalam tradisi politik kita yang cukup panjang humor atas presiden acap kali menjadi sinyal melemahnya dukungan dan kepercayaan. Namun, humor atau olok-olok itu tentu tidak berdiri sendiri. Tak ada asap jika tidak ada api.

Beruntunglah kita saat ini karena SBY-JK masih populer. Imbauannya masih didengar publik luas. Namun ibarat tabungan, kepercayaan public itu dapat terus terkikis jika public tidak merasakan perubahan kongkret dalam kehidupan ekonomi mereka menjelang setahun pemerintahan mereka. *

DENNY J.A

SUMBER NASKAH

1. Politik Jajak Pendapat, *Republika*, 4 Oktober 2003
2. Menebak Presiden 2004, *Republika*, 15 Maret 2003
3. Kemenangan Kembali Partai Golkar, *Suara Pembaharuan*, 16 Juni 2003
4. Kegagalan Partai Politik, *Indo Pos*, 19 Juni 2003
5. Merindukan Kembali Orde Baru, *Suara Pembaharuan*, 29 September 2003
6. Manuver Konvensi Partai Golkar, *Media Indonesia*, 29 September 2003
7. Manuver Partai Golkar Berikutnya, *Suara Pembaharuan*, 13 Oktober 2003
8. Ironi Politik Amien Rais?, *Media Indonesia*, 3 November 2003
9. Mengalahkan Megawati di tahun 2004, *Suara Pembaharuan*, 10 November 2003
10. Tumbuhnya Muslim Demokrat, *Republika*, 22 November 2003
11. Hidayat Nur Wahid, Presiden SMS?, *Media Indonesia*, 22 Desember 2003
12. Kampanye Melawan Politisi Hitam, *Republika*, 27 Desember 2003
13. Menjadi Presiden Melalui SMS, *Suara Pembaruan*, 29 Desember 2003
14. Potret Buram Pemilih, *Indo Pos*, 22 Januari 2004

15. Menghitung Peluang SBY, *Indo Pos*, 11 Maret 2004

16. Peta Kekuatan Politik Pasca Pemilu 2004, *Suara Pembaruan*, 5 April 2004

17. Jajak Pendapat Untuk Capres, *Suara Pembaruan*, 7 Juni 2004

18. Wiranto Versus Megawati, *Suara Pembaruan*, 14 Juni 2004

19. Sentimen Anti Partai, *Republika*, 14 Juni 2004

20. Pemilu Capres Mengejutkan, *Indo Pos*, 8 Juli 2004

21. Golkar di antara Dua Capres, *Suara Pembaruan*, 12 Juli 2004

22. SBY Versus Megawati, *Media Indonesia*, 12 Juli 2004

23. Jika SBY Versus Megawati Hari Ini, *Suara Pembaruan*, 9 Agustus 2004

24. Potret Warna-warni Presiden SBY, *Suara Pembangunan*, 27 Desember 2004

25. George Bush Mengutip Data LSI, *Suara Pembaruan*, 14 Maret 2005

26. SBY-JK Masih Populer?, *Suara Pembaruan*, 5 September 2005

DAFTAR BUKU DENNY J.A

1. DEMOCRATIZATION FORM BELOW PROTEST EVENTS AND REGIME CHANGE IN INDONESIA Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2006
2. THE ROLE OF GOVERNMENT IN ECONOMY AND BUSINESS, Penerbit LKIS, 2006
3. VARIOUS TOPICS IN COMPARATIVE POLITICS, Penerbit LKIS 2006
4. DEMOKRASI INDONESIA : Visi Dan Praktek (Kumpulan Tulisan Di Harian Kompas), Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2006
5. JALAN PANJANG REFORMASI (Kumpulan Tulisan Di Suara Pembaruan), Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2006
6. MELEWATI PERUBAHAN Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia (Kumpulan Tulisan Di Jawa Pos Dan Indopos), Penerbit LKIS, 2006
7. POLITIK YANG MENCARI BENTUK (Kumpulan Kolom Di Majalah Gatra), Penerbit LKIS, 2006
8. MEMBANGUN DEMOKRASI SEHARI-HARI (Kumpulan Tulisan Di Media Indonesia), Penerbit LKIS, 2006
9. PARTAI POLITIK PUN BERGUGURAN (Kumpulan Tulisan di Republika), Penerbit LKIS 2006
10. MANUVER ELIT, KONFLIK DAN KONSERVATISME POLITIK (Kumpulan Tulisan di Koran Tempo), Penerbit LKIS, 2006
11. PARA POLITISI DAN LAGUNYA (Kumpulan Tulisan di Rakyat Merdeka dan Harian Seputar Indonesia), Penerbit LKIS 2006

12. MEMPERKUAT PILAR KELIMA, Pemilu 2004 dalam Temuan Survei LSI, Penerbit LKIS 2006

13. VISI INDONESIA BARU SETELAH REFORMASI 1998, Penerbit LKIS 2006

14. CATATAN POLITIK, Penerbit LKIS 2006

15. JATUHNYA SOEHARTO DAN TRANSISI DEMOKRASI, Penerbit LKIS 2006

16. MEMBACA ISU POLITIK, Penerbit LKIS 2006

17. GERAKAN MAHASISWA DAN POLITIK KAUM MUDA ERA 80-AN, Penerbit LKIS 2006

18. ELECTION WATCH :MERETAS JALAN DEMOKRASI (Talkshow Denny J.A di Metro TV), Penerbit Pustaka Sinar Harapan 2006

19. PARLIAMENT WATCH: EKSPERIMENT DEMOKRASI: DILEMA INDONESIA (Talkshow Denny J.A. di Metro TV).Penerbit Pustaka Sinar Harapan 2006

20. NAPAK TILAS REFORMASI POLITIK INDONESIA (Talkshow Denny J.A. Dalam "Dialog Aktual" Radio Delta FM), Penerbit LKIS 2006

21. JEJAK-JEJAK PEMILU 2004 (Talkshow Denny J.A. Dalam "Dialog Aktual" Radio Delta FM), Penerbit LKIS 2006